

**PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF TENTANG PERSEPSI DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROYEK PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI DESA DOPLANG  
KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI)**



Disusun oleh:

**Riani Musrifah**

**D.0104112**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Ilmu Administrasi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2009**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional yang bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi juga berkaitan dengan persoalan-persoalan non ekonomi seperti politik, sosial, budaya, aset, dan lingkungan. Menurut Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) Yogyakarta 1993, orang miskin mengalami *deprivation trap* atau jebakan kekurangan yang terdiri dari kerentanan dan ketidakberdayaan (PPSK dalam Awan, 1995: 224).

Parwoto menjelaskan bahwa akar permasalahan kemiskinan terletak pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan. Dimana masyarakat menjadi miskin oleh sebab adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadai ke sumberdaya-sumberdaya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Akibatnya mereka terpaksa hidup di bawah standar yang tidak dapat lagi dinilai manusiawi, baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek sosial dan secara politikpun mereka tidak memiliki sarana untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hidup mereka. Proses ini berlangsung timbal balik saling terkait dan saling mengunci dan akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin. (Parwoto

dalam Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2005: Modul II hal.1).

Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat miskin menunjukkan bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar, kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, berjangka pendek dan parsial serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

Di Indonesia, masalah kemiskinan menjadi prioritas pembangunan dalam bidang peningkatan kualitas penduduk miskin, maka diperlukan strategi untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara mempersiapkan unsur manusia, hal tersebut mampu memperbaiki akses terhadap empat hal, yaitu sumber daya, teknologi, pasar, dan pembiayaan (Gunawan, 1998: 45). Untuk mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya dengan membagi-bagi dana bantuan, sebab kemiskinan berkaitan dengan rendahnya kesejahteraan. Oleh karena itu, konsep untuk mengatasi kemiskinan lebih banyak pada upaya pemberdayaan masyarakat dan bagaimana masyarakat memanfaatkan program-program pemerintah untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Sehingga fokus dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat miskin sehingga pengentasan kemiskinan menjadikan manusia cerdas dan mengetahui akar penyebab kemiskinan mereka sendiri.

Bangsa Indonesia sekarang masih dihadapkan pada usaha mengikis habis sisa-sisa kemiskinan (*core poverty*). Maka strategi yang dijalankan harus memiliki

sasaran dan tujuan yang jelas lewat *core poverty strategy*. Untuk itu dibutuhkan langkah baru, dimana segala daya upaya bangsa, negara dan seluruh lapisan masyarakat dikerahkan untuk bersama-sama menghapus kemiskinan. Untuk itu perlu kesamaan visi bahwa pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah menuju terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Pembangunan yang demikian muncul dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan hasilnya untuk masyarakat (Gunawan, 2007: 100).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997 lalu telah menambah panjang daftar penduduk miskin di Indonesia. Krisis yang pada awalnya hanya krisis ekonomi telah melebar menjadi krisis multidimensional yang menghancurkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan persentasenya terhadap jumlah penduduk yang terus bertambah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia**  
**Menurut Daerah Tahun 1996-2006**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97
2006	14,29	24,76	39,05	13,36	21,90	17,75

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)  
Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2005 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama. Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20 persen pada tahun 2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Selama periode Februari 2005-Maret 2006, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,06 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 1,89 juta orang. Persentase penduduk miskin meningkat dari 15,97 persen pada tahun 2005 menjadi 17,75 pada tahun 2006. ([www.simpuldemokrasi.com](http://www.simpuldemokrasi.com)).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ini. Namun upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan

pemerintah tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan (Heru dalam Awan, 1995: 32). Kegagalan tersebut disebabkan oleh kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan hanya berupa paket bantuan ekonomi seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), beras untuk orang miskin (Raskin) yang cenderung bersifat karitas (*derma*), artinya menempatkan si miskin sebagai objek semata dari suatu kegiatan yang bersifat proyek dan hanya mampu menjawab masalah dalam jangka pendek dan tidak mengubah apapun, sehingga kurang efektif dalam memecahkan masalah-masalah kemiskinan (Agus Dwiyanto dalam Awan, 1995: 65).

Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan ini, pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, *charity* dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Akibatnya program-program dimaksud tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari program-program penanggulangan kemiskinan tersebut ([www.ngo-link.com](http://www.ngo-link.com)).

Untuk itu diperlukan suatu kebijakan pengentasan kemiskinan yang berpedoman pada sebuah kebijakan yang mampu memberikan ruang gerak, fasilitas publik serta didasarkan pada kemandirian yaitu memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri (*self help*).

Dalam usahanya untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah telah menyelenggarakan berbagai bentuk program dengan mentransfer dana-dana dari pemerintah pusat untuk diteruskan ke daerah, antara lain melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT), PDM-DKE (Program Pemberdayaan Masyarakat Dampak Krisis Moneter), Jaring Pengaman Sosial (JPS). Selain itu pemerintah juga memberikan berbagai bentuk fasilitas kredit seperti KIK (Kredit Investasi Kecil), KCK, BKK, Kupedes, Kredit Bimas, BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan), KUT (Kredit Usaha Tani) yang berubah menjadi KKP (Kredit Ketahanan Pangan), dan sebagainya.

Dalam perkembangannya, untuk menindaklanjuti program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti IDT (Inpres Desa Tertinggal) maupun PPK (Program Pengembangan Kecamatan), maka berdasarkan Instruksi Presiden No. 21 tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, pada bulan Juli 1998 Pemerintah Indonesia melalui Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) meluncurkan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dirancang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dengan menggunakan pendekatan Tridaya. Pendekatan Tridaya merupakan pendekatan yang menekankan proses pemberdayaan sejati dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia, yaitu daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi, dan daya

pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan sehingga tercipta lingkungan yang lestari.

Proyek ini mempunyai lima prinsip pengentasan kemiskinan, yaitu: *Satu*, Berasal dari masyarakat yang bersangkutan. Adanya rasa memiliki merupakan komponen terpenting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan syarat mutlak untuk kesinambungan proyek pengentasan kemiskinan. *Dua*, Berorientasi pada hasil dan proses yang benar, artinya masyarakat harus diajak secara bersama-sama untuk mengetahui kondisi kemiskinan dan penyebab kemiskinan yang dihadapinya. Kebijakan BKM harus didesain dengan baik agar dapat dilaksanakan secara disiplin dan mudah dimonitor. *Tiga*, Komprehensif. Kemiskinan bersifat multidimensional sehingga kebijakan BKM harus bersifat menyeluruh. *Empat*, Kemitraan. Kebijakan BKM harus diintegrasikan dengan para stakeholders, yaitu Pemda, Pemdes, LSM, masyarakat setempat, pengusaha dan lain-lain. *Lima*, Bersifat Jangka panjang. Harus ada perubahan institusi dan pengembangan kapasitas KSM dan BKM secara terus-menerus. (Juklak P2KP II).

Dari kelima prinsip tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa P2KP mempunyai strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal sehingga menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dengan intensitas keterlibatan sampai pada pengambilan keputusan. Sehingga diharapkan setelah proyek berakhir, upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.



P2KP mengembangkan konsep penanggulangan kemiskinan di perkotaan secara komprehensif dan utuh dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui proses transformasi sosial dari kondisi masyarakat miskin menjadi masyarakat berdaya, dan selanjutnya menuju masyarakat mandiri dan harapan akhirnya terbangun masyarakat madani. Inti dari konsep P2KP adalah bahwa kemiskinan pada dasarnya tidak mungkin diatasi dengan bantuan pihak luar semata, namun hanya bisa diselesaikan oleh upaya masyarakat itu sendiri, yang telah mampu mentransformasikan dirinya ke arah tatanan masyarakat madani (*civil society*), yakni tatanan masyarakat yang mampu mengurus persoalannya sendiri (*Self community management*). (Tim Persiapan P2KP, Dirjen Perumahan dan Permukiman, Departemen Kimpraswil, 2005: 1).

Dalam pelaksanaan P2KP tersebut di tingkat kelurahan dibentuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang bertindak sebagai lembaga yang memfasilitasi peran serta atau partisipasi yang tumbuh dari bawah. Untuk melaksanakan program kegiatan BKM dibantu Unit-unit Pengelola (UP) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah, namun setidaknya terdiri dari Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL). Sedang masyarakat miskin dapat berpartisipasi aktif dengan membentuk Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

P2KP bukan sekedar proyek penyaluran dana bantuan, melainkan sebagai proses membangun kemandirian dan keberdayaan masyarakat berlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan, agar pada akhirnya masyarakat mampu lebih efektif dalam menanggulangi dan menangkal kemiskinan di

wilayahnya secara berkelanjutan. Bantuan kepada masyarakat diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana tersebut diperlukan pendampingan secara teknis tentang pengelolaan dana tersebut agar proyek P2KP tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

P2KP bertujuan mempercepat upaya menanggulangi kemiskinan melalui: (1) penyediaan dana pinjaman untuk mengembangkan usaha produktif dan membuka lapangan kerja baru, (2) penyediaan dana untuk membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi secara langsung maupun tidak langsung, (3) peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang produktif dengan berbasis pada usaha kelompok, (4) penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kelembagan masyarakat di tingkat kelurahan agar dapat memberdayakan masyarakat, dan (5) mencegah turunnya kualitas lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana dan sarana fisik. (Gunawan, 2007: 64).

Proyek ini menyediakan dana langsung bagi desa-desa yang terpilih sebagai penerima bantuan P2KP yaitu perorangan dan keluarga miskin yang berada di satuan wilayah administrasi pemerintahan di tingkat kota, baik yang berstatus kelurahan maupun desa perkotaan yang tersebar di seluruh wilayah perkotaan Indonesia dan yang memiliki jumlah penduduk miskin cukup banyak. Proyek ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999. Mengenai pendanaan keseluruhannya berjumlah US \$ 100.000.000 (untuk P2KP tahap I dan II). Dana tersebut adalah pinjaman dari World Bank dan lembaga-lembaga donor. Untuk

P2KP tahap II, dilaksanakan pada tahun 2005 dengan total BLM sebesar Rp. 451.000.000,- untuk 13 Propinsi yang mencakup 210 Kecamatan dan 2.058 desa/kelurahan serta dengan sasaran pemanfaat sebanyak 877.973 KK miskin. Dana P2KP tersebut dialirkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan sepengetahuan lembaga masyarakat setempat. Untuk besarnya pengalokasian dana di tiap wilayah disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah KK miskin. (Juklak P2KP II).

Adapun bentuk bantuan dalam P2KP ini ada 3 macam, yaitu:

1. Bantuan pengembangan ekonomi, dibedakan menjadi 2 macam kegiatan:
  - a. Kegiatan ekonomi produktif, yaitu pemberian dana pinjaman bergulir dengan bunga ringan dan tanpa agunan sebagai tambahan/modal usaha.
  - b. Kegiatan ekonomi hibah, yaitu bantuan hibah untuk mengadakan pelatihan manajemen usaha maupun pelatihan teknis (pengembangan sumber daya manusia).
2. Bantuan pengembangan sosial, untuk membantu meringankan beban keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan normatifnya.
3. Bantuan pengembangan lingkungan, yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar fisik/lingkungan yang menunjang peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. (Juklak P2KP II).

Di Kabupaten Boyolali, proyek ini dilaksanakan pada Januari 2005 dengan memulai sosialisasi kepada masyarakat umum di setiap desa/kelurahan yang menjadi sasaran proyek. Kabupaten Boyolali mendapat dana bantuan sebesar Rp. 11.200.000.000,- untuk 4 kecamatan yang tersebar di 50 desa/kelurahan. Dana ini

diluncurkan ada tahun ke-2 yaitu pada tahun 2006 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Kecamatan dan Alokasi Dana P2KP di Kabupaten Boyolali**

No	Nama Kecamatan	Jumlah			
		Penduduk / Jiwa	Desa / Kelurahan	KK Miskin (KK)	BLM (Rp)
1.	Boyolali	57.488	9	5.160	2.250.000.000,-
2.	Teras	43.320	13	5.683	2.750.000.000,-
3.	Banyudono	45.082	15	4.471	2.950.000.000,-
4.	Klego	44.675	13	7.211	3.250.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>190.565</b>	<b>50</b>	<b>22.525</b>	<b>11.200.000.000,-</b>

Sumber: Bagian Sosial Ekonomi Bappeda Kab. Boyolali, Tahun Anggaran 2005/2006-2006/2007.

Besar Bantuan BLM yang diterima masing-masing desa tidak sama, disesuaikan dengan tingkat / jumlah keluarga miskin yang terdapat wilayahnya.

Sementara rincian dana BLM yang disalurkan untuk desa-desa di Kecamatan Teras adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Daftar Desa dan Alokasi Dana P2KP di Kecamatan Teras**

No	Nama Desa	Jumlah		
		Pdd. / Jiwa	KK Miskin (KK)	BLM (Rp.)
1.	Krasak	2.394	554	250.000.000,-
2.	Gumukrejo	2.818	418	250.000.000,-
3.	Tawang Sari	3.819	628	250.000.000,-
4.	Mojolegi	3.282	527	250.000.000,-
5.	Teras	4.505	730	250.000.000,-
6.	Randusari	4.941	774	250.000.000,-
7.	Sudimoro	2.556	274	150.000.000,-
8.	Bangsalan	2.221	279	150.000.000,-
9.	Salakan	2.589	502	250.000.000,-
10.	Nepen	2.528	92	150.000.000,-
11.	Kopen	3.429	297	150.000.000,-
12.	Kadireso	3.819	185	150.000.000,-
13.	Doplang	3.642	456	250.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>43.543</b>	<b>5.716</b>	<b>2.750.000.000,-</b>

Sumber: Bagian Sosial Ekonomi Bappeda Kab. Boyolali, Tahun Anggaran 2005/2006-2006/2007.

Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 13 desa di Kecamatan Teras yang mendapatkan bantuan dana BLM P2KP II sebesar Rp. 250.000.000,-. Alokasi pemanfaatan BLM P2KP II tersebut melalui 3 tahap pencairan, yaitu *tahap pertama* dana cair sebesar 20% (Rp. 50.000.000,-) yang digunakan untuk bantuan sosial kemanusiaan, pelatihan ketrampilan, dan pengembangan sarana lingkungan. Sedang *tahap kedua* dana cair sebesar 50% (Rp. 125.000.000,-) digunakan untuk pinjaman bergulir dan sarana pengembangan lingkungan. Dan *tahap ketiga* dana cair sebesar 30% (Rp. 75.000.000,-) digunakan untuk penyempurnaan di ketiga bidang kegiatan (sosial, ekonomi, dan lingkungan) tersebut.

Untuk alokasi bantuan pinjaman dana bergulir sendiri berjumlah keseluruhan Rp. 97.475.000,- yang dicairkan pada tahap dua senilai Rp. 61.100.000,- dan pada tahap tiga senilai Rp. 36.375.000,-. Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada KSM-KSM yang telah terbentuk.

Jumlah total penduduk Desa Doplang sebanyak 3.642 jiwa yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.869 perempuan. Berdasarkan hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh Tim pemetaan swadaya P2KP bersama-sama kader dan relawan, ditemukan bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Doplang adalah sebanyak 456 KK yang tersebar di 3 RW 19 RT. Hasil dari pemetaan swadaya tersebut sesuai dengan kriteria dan kemiskinan Desa Doplang yang telah disepakati melalui FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan dari tingkat RW, RT, dan desa. Adapun persebaran jumlah penduduk Desa Doplang menurut KK miskin dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.4**  
**Persebaran Jumlah Penduduk Desa Dopleng Menurut KK Miskin**  
**Hasil Pemetaan Swadaya (PS) P2KP**

No	RT / RW	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Prosentase (%)
1.	01 / I	62	35	7,65
2.	02 / I	63	33	7,22
3.	03 / I	77	39	8,75
4.	04 / I	41	30	6,5
5.	01 / II	69	31	6,78
6.	02 / II	54	26	5,68
7.	03 / II	48	22	4,81
8.	04 / II	52	26	5,68
9.	05 / II	55	26	5,68
10.	06 / II	39	21	4,59
11.	01 / III	65	23	5,03
12.	02 / III	50	18	3,93
13.	03 / III	53	19	4,15
14.	04 / III	49	25	5,47
15.	05 / III	68	11	2,40
16.	06 / III	57	16	3,50
17.	07 / III	45	18	3,93
18.	08 / III	56	19	4,16
19.	09 / III	59	18	3,93
<b>JUMLAH</b>		<b>1062</b>	<b>456</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Data Pemetaan Swadaya Tiap RT, Sekretariat BKM Adil Makmur Desa Dopleng.*

Alasan Desa Dopleng dipilih sebagai daerah sasaran P2KP karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tim P2KP yang menyatakan bahwa Desa Dopleng masuk ke dalam kategori desa perkotaan yang mempunyai warga miskin dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat dan telah disepakati berdasarkan diskusi / rembung warga. Selain itu dari hasil Pemetaan Swadaya dapat diketahui bahwa di Desa Dopleng terdapat jumlah keluarga miskin yang cukup besar yaitu 456 KK yang tersebar di 19 RT dan segera perlu mendapatkan penanganan, serta masyarakat desanya dinilai mempunyai komitmen yang tinggi untuk berswadaya dalam pembangunan desa. Sebagian warga Desa Dopleng termasuk dalam batasan

miskin akibat terkena dampak krisis ekonomi, PHK oleh pabrik atau industri-industri lokal serta lemahnya daya tawar masyarakat untuk mengakses modal, padahal di desa tersebut sebenarnya cukup banyak mempunyai usaha produktif yang apabila mendapat bantuan modal, maka usaha-usaha tersebut akan berkembang.

Potensi produksi desa Doplang sebenarnya cukup banyak sampai saat ini, bahkan menjadi semacam "trade mark" atau ciri khas dari masing-masing RT, seperti produksi rambak / kerupuk, produksi pengasapan tembakau, produksi pembuatan bata merah, pembuatan genteng, dan beberapa usaha ternak yang mampu memberikan alternatif untuk pembangunan dan pengembangan usaha. Untuk lebih jelasnya mengenai potensi perekonomian desa Doplang, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Potensi Perekonomian Desa Doplang**

No	Potensi Ekonomi	Jumlah (unit)
1.	Perdagangan:	
	a. Toko	6
	b. Warung	10
	c. Kios	14
	d. Kaki Lima	7
2.	Industri:	
	a. Industri Rambak / Kerupuk	53
	b. Industri Genteng	13
	c. Industri Bata Merah	11
	d. Pengasapan Tembakau (Omprong)	18
	e. Ternak ayam dan puyuh	10
	f. Perikanan (Lele)	5
	g. Jahit	6
	h. Makanan kecil	4
	i. Kerajinan bambu	1
	j. Katering	3
	<b>Jumlah</b>	<b>161</b>

*Sumber: Diolah dari Data Monografi Desa Doplang.*

Lewat program bantuan ini, terutama untuk kegiatan bantuan ekonomi dalam bentuk pinjaman dana bergulir untuk usaha produktif, diharapkan kegiatan usaha ekonomi mikro bisa tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada guna membantu peningkatan kesejahteraan keluarga miskin secara berkelanjutan.

Penggunaan dana maupun perkembangan dari alokasi dana BLM P2KP, baik untuk pelatihan, prasarana fisik maupun ekonomi produktif diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup dan mampu menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkesinambungan.

Atas dasar uraian di atas maka Desa Doplang dijadikan sebagai objek penelitian.

Adapun beberapa penelitian yang meneliti tentang keberhasilan atau kegagalan P2KP dalam memberdayakan masyarakat miskin dilakukan oleh Bimo Dwi Darminto (2004) dan Puji Limaningsih (2001). Hasil penelitian Bimo tentang Evaluasi P2KP Tahap I ditemukan bahwa pelaksanaan P2KP di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman mengalami banyak permasalahan antara lain masih kurangnya pengawasan terhadap pengurus BKM, masih lemahnya kinerja BKM, dan kurangnya koordinasi antara pengurus BKM dengan aparat pemerintah desa dalam perencanaan proyek fisik sarana dan prasarana dasar lingkungan. Sedangkan hasil penelitian Puji Limaningsih tentang Implementasi P2KP ditemukan bahwa implementasi P2KP di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dinilai belum berhasil, tingkat pengetahuan pelaksana BKM mengenai P2KP belum dikatakan baik dan dampak dari adanya proyek



P2KP belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat peserta proyek. Dua penelitian tersebut memberikan acuan bahwa tingkat pengetahuan pelaksana, koordinasi antar pelaksana serta keaktifan pengelola program mempengaruhi berhasil / gagalnya program.

Dari kedua hasil penelitian di atas, muncul keingintahuan peneliti mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap kemanfaatan P2KP dalam memberdayakan masyarakat di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaannya, beserta hal-hal yang mendukung dan menghambat upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaannya.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kemanfaatan P2KP dalam memberdayakan masyarakat di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui P2KP di Desa Doplang?
3. Hal-hal apa saja yang mendukung dan menghambat upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui P2KP di Desa Doplang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kemanfaatan P2KP dalam memberdayakan masyarakat di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui P2KP di Desa Doplang.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang mendukung dan menghambat upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui P2KP di Desa Doplang.
4. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai persepsi masyarakat terhadap kemanfaatan P2KP dalam memberdayakan masyarakat di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dan partisipasi masyarakat, beserta hal-hal yang mendukung dan menghambat upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaannya.
2. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dalam P2KP di Desa Doplang.

3. Sebagai bahan masukan dan bantuan pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan maupun para pembaca dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui P2KP.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kemiskinan**

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, salah satunya bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Di lain pihak, kemiskinan menjadi semacam input sekaligus output bagi pembangunan yang gagal. Untuk menanggulangi kemiskinan dan meratakan pembangunan beserta hasil-hasilnya merupakan upaya untuk memadukan berbagai kebijaksanaan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah.

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata "miskin", yang menurut WJS Poerwodarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 1988, berarti "tidak berharta benda dan serba kekurangan". Sementara The Concise Oxford Dictionary memberi definisi *poor* (miskin) sebagai: "*Lacking adequate money or means to live comfortably*" (Kekurangan uang atau sarana yang memadai untuk tinggal atau hidup dengan nyaman). Dari kedua pengertian tersebut jelas sekali bahwa pengertian kemiskinan tidak semata-mata berhubungan dengan "uang" saja. Pengertian sarana lebih luas dari sekedar uang. Karenanya, definisi kemiskinan lebih luas dari sekedar "miskin pendapatan" (dalam SPKD Bappeda Kabupaten Boyolali, 2006: 14).

Depdikbud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata "miskin" sebagai:

"Situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makan, pakaian dan perumahan yang sangat dipelukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan minimum". (Depdikbud, 1988).

Hal senada juga dikemukakan oleh Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, 2000 (dalam Nurhadi, 2007: 13) sebagai berikut:

"Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty treshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya".

Lebih lanjut, Siti Pariani dalam (Bagong Suyanto, 1995: 65) mendefinisikan kemiskinan sebagai standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Bappenas dan Depdagri (dalam Gunawan Sumodiningrat, 1996: 110) dengan memberikan pengertian kemiskinan sebagai:

"Situasi kekurangan yang terjadi karena bukan dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari oleh kekuatan apapun atau kemampuan yang ada padanya. Kemiskinan itu sendiri ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang mau menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat berubah yang tercermin dalam lemahnya kemauan untuk maju,

rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan”.

Sedangkan Tadjuddin Noer Effendi (dalam Gunawan Sumodiningrat, 1996: 16) mengatakan:

”Kemiskinan ini meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, kekurangan perlindungan dari hukum dan pemerintahan”.

Sementara Gunawan Sumodiningrat (1998: 26) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kehidupan masyarakat yang ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan dan pengangguran, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan antardaerah, antarsektor, dan antargolongan penduduk.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ted K. Bradshaw (dalam Community Development: International Journal of The Community Development Society, Vol. 38, No. 1, 2007) mengemukakan bahwa:

”Poverty in its most general sense is the lack of necessities. Basic food, shelter, medical care, and safety are generally thought necessary based on shared values of human dignity. However, what is a necessity to one person is not uniformly a necessity others. Needs may be relative to what is to possible and are based on social definition and past experience (Sen, 1999), Valentine (1968) says that ”the essence of pverty is in equality. In slightly different words, the basic meaning of poverty is relative deprivation.” A social (relative) definition of pverty allows community flexibility in addressing local concerns, although objective definitions allow tracking progress and comparing one area to another.” (Ted K. Bradshaw, Academic Research Library 19. 7., ”Community Development” : International Journal of The Community Development Society, Vol. 38, No. 1, page 9, Spring 2007).

Menurut jenisnya, konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

## 1. Kemiskinan Absolut

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1998: 26), seseorang dikatakan miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang digambarkan dengan garis kemiskinan tersebut. Kebutuhan hidup minimum ini antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Sedangkan David Harry Penny (dalam Nurhadi, 2007: 16) mendefinisikan kemiskinan absolut dalam kaitannya dengan suatu standar materi. Batas bawah absolut adalah tingkat penguasaan sumber-sumber materi, yang di bawahnya tidak ada kemungkinan kehidupan bisa berlanjut, dengan kata lain hal ini adalah tingkat kelaparan.

Batasan lain tentang kemiskinan absolut dikemukakan oleh Sayogyo, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standart kehidupan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekeja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Seorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memperoleh penghasilan per kapita setara 320 kilogram beras untuk daerah pedesaan, atau 480 kg beras untuk penduduk perkotaan (dalam Bagong Suyanto, 1995: 65).

## 2. Kemiskinan Relatif

Adalah perhitungan kemiskinan yang didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan dalam suatu negara. Dinyatakan dengan berapa persen dari

pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan pendapatan tertentu, dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan tingkat pendapatan lainnya. World Bank menyusun ukuran kemiskinan relatif yang sekaligus digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan, yaitu jika 40 % jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 % pendapatan nasional, maka disebut pembagian nasional sangat timpang. Jika 40 % jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12 -17 % dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang. Jika 40 % jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima 17 % dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan rendah (World Bank dalam Nurhadi, 2006: 17).

Berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian (Gunawan Sumodiningrat, 1998: 26-27):

- a. Kemiskinan natural (alamiah): keadaan miskin, karena dari asalnya memang miskin. Mereka tidak mempunyai sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan lainnya, sehingga mereka tidak dapat ikut serta dalam pembangunan atau jikapun terlibat mereka hanya mendapatkan pendapatan yang rendah.
- b. Kemiskinan struktural: kemiskinan yang disebabkan karena hasil pembangunan yang tidak seimbang. Pembangunan yang tidak seimbang dikarenakan pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang dan ketidaksamaan kesempatan,

menyebabkan tingkat keikutsertaan menjadi tidak merata dan perolehan pendapatan tidak seimbang menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Perbedaan struktur masyarakat inilah yang menyebabkan kemiskinan. Oleh karena struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk golongan miskin, tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Mereka hanya mampu keluar dari jerat kemiskinan melalui suatu proses perubahan struktural yang mendasar.

- c. Kemiskinan kultural: kemiskinan yang mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya, dimana mereka sudah merasa kecukupan dan tidak merasa kekurangan. Masyarakat ini sulit diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mudah untuk melakukan perubahan, menolak untuk mengikuti perkembangan, dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya.

Kemiskinan lebih dari sekedar soal kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya modal untuk mengembangkan usaha. Dalam pandangan Chambers, kemiskinan merupakan kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan studinya yang dilakukan di Afrika dan Asia Selatan, Chambers sampai pada kesimpulan bahwa pangkal dari kemiskinan adalah *deprivation trap* (perangkap kemiskinan, sindrom kemiskinan, atau lingkaran setan kemiskinan).(dalam Nurhadi, 2007:31).



Masih menurut Chambers (dalam Nurhadi, 2007: 31), perangkap kemiskinan terdiri dari lima unsur yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, isolasi atau keterasingan, kerentanan atau kerawanan, dan ketidakberdayaan. Dari kelima unsur tersebut, kerentanan dan ketidakberdayaan menurut Chambers perlu mendapat perhatian utama. Kerentanan merupakan "roda penggerak kemiskinan" yang menyebabkan keluarga miskin semakin terpuruk dalam jerat kemiskinan. Ketidakberdayaan menyebabkan keluarga miskin mudah ditipu dan ditekan oleh pihak yang memerlukan kekuasaan. Ketidakberdayaan seringkali mengakibatkan terjadinya penyelewengan bantuan untuk si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi.

Masyarakat miskin umumnya terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki peluang/akses lebih besar. Secara terperinci, John Friedmann mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: (1) modal yang produktif atas aset, misalnya tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan; (2) sumber keuangan seperti *income*, pekerjaan, kredit yang memadai; (3) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi, partai politik; (4) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa; (5) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (dalam Bagong Suyanto, 1995: 207).

Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, politik). Karena sifat

multidimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*). Frank Ellis (dalam Nurhadi, 2007: 14-15) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. *Pertama*, secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah finansial saja, tetapi juga meliputi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. *Kedua*, secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari rendahnya tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam memjangkau dan menggunakan *resources*. *Ketiga*, secara sosial-psikologi, kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangikan seseorang dalam memanfaatkan kesempatan yang ada di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal.

Lewis (dalam Tadjuddin, 1993: 218) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri. Menurut dia kaum miskin di kota tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, apatis dan cenderung menyerah pada nasib. Selanjutnya Lewis

(dalam Tadjuddin, 1993: 218) menyimpulkan bahwa keadaan tersebut berakar dari kondisi lingkungan yang serba miskin yang cenderung diturunkan dari generasi ke generasi.

Meskipun kebudayaan kemiskinan mempunyai andil sebagai penyebab kemiskinan, namun tidak sepenuhnya dapat menjelaskan penyebab kemiskinan. Konsep kebudayaan kemiskinan mengandung kelemahan karena konsep tersebut anti sejarah yang mengesampingkan asal-usul kelakuan dari norma-norma yang ada (Gans dalam Tadjuddin, 1993: 203). Sedang Baker (dalam Tadjuddin, 1993: 218) berpendapat bahwa konsep kebudayaan kemiskinan itu sangat normatif dan merupakan kumpulan kecurigaan dan prasangka buruk golongan atas terhadap golongan miskin. Kelemahan lain yang perlu disebutkan adalah konsep itu terlalu membesar-besarkan kemapanan kemiskinan. Namun bukti empiris mengungkapkan bahwa kaum miskin, terutama di kota, bekerja keras dan mempunyai aspirasi untuk hidup layak dan motivasi untuk memperbaiki nasib. Mereka mampu menciptakan pekerjaan sendiri serta bekerja keras untuk memenuhi tuntutan hidup mereka (Bromley dan Gerry 1979; Papanek dan Kuncorojakti 1986, dalam Tadjuddin, 1993: 218). Disamping itu setiap saat berusaha memperbaiki nasib dengan cara beralih dari satu usaha ke usaha lain dan tidak mengenal putus asa (Sethuraman dalam Tadjuddin, 1993: 219). Upaya ini dapat dipandang sebagai kiat kaum miskin untuk berusaha keluar dari kemelut kemiskinan.

Suparlan 1984 dan Rebong dkk 1984 (dalam Tadjuddin, 1993: 219) mengatakan bahwa dalam bidang ekonomi, bahkan, kaum miskin di kota

mempunyai andil dalam menopang kehidupan kota. Melalui kegiatan kecil-kecilan dan mandiri di bidang ekonomi yang sering disebut informal. Mereka memberikan peluang bagi masyarakat elit kota untuk menikmati pelayanan dan jasa murah, baik di bidang angkutan maupun jasa lainnya. Ini mengisyaratkan bahwa penduduk miskin di kota secara ekonomi terintegrasi dengan masyarakat luar kota, meskipun integrasi itu cenderung menghalangi perkembangan ekonomi mereka yang pada gilirannya memapankan kemiskinan.

Jika demikian halnya, maka ikhwal kemiskinan mereka tidaklah semata-mata karena kebudayaan tetapi lebih berkaitan dengan adanya hambatan struktural yang tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam perekonomian kota. Breman (dalam Tadjuddin, 1993: 219) mengatakan bahwa kaum miskin di kota "jalan menuju ke atas seringkali dirintangi, sedangkan jalan menuju ke bawah terlalu mudah dilalui". Dengan kata lain, munculnya kemiskinan di kalangan masyarakat miskin lebih disebabkan hambatan struktural. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu muncul bukan semata-mata dari kebudayaan kemiskinan tetapi lebih berkaitan dengan tatanan kehidupan ekonomi yang tidak memberikan peluang bagi kaum miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan (Breman dalam Tadjuddin, 1993: 219).

Kajian yang dilakukan oleh Jazairy, dkk. (dalam Mohtar Mas'ood, 2003: 142-143) menemukan adanya delapan indikator yang dianggap penting untuk memahami masalah kemiskinan:

1. Deprivasi materiil, yang diukur dari kurangnya pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, kesehatan, papan, dan kebutuhan konsumsi dasar lain.
2. Isolasi, tercermin dari lokasi geografisnya dan juga dari marginalisasi keluarga miskin secara sosial dan politik. Pada umumnya mereka tinggal di daerah terpencil, jauh dari pusat pembangunan, jauh dari pusat pelayanan, dan mereka tidak mampu mempengaruhi keputusan-keputusan politik, mereka juga tidak memiliki sarana transportasi dan komunikasi.
3. Alienasi, yaitu perasaan tidak punya identitas dan kontrol atas dirinya sendiri. Hal ini timbul akibat isolasi dan hubungan sosial yang bersifat eksploitatif. Masyarakat miskin terasing dari proses pertumbuhan. Walaupun proses pembangunan berjalan seru dan menghasilkan teknologi baru, mereka tidak bisa ikut serta memanfaatkannya.
4. Ketergantungan, merupakan faktor yang melemahkan kapasitas orang miskin untuk melakukan *bargaining* dalam dunia hubungan sosial yang secara struktural memang sudah timpang.
5. Ketidakmampuan membuat keputusan sendiri dan tiadanya kebebasan memilih dalam produksi, konsumsi, dan kesempatan kerja, serta kurangnya keterwakilan secara sosial-politik.
6. Kelangkaan aset, membuat penduduk miskin di desa bekerja dengan tingkat produktivitas yang rendah.
7. *Vulnerability*, yaitu kerentanan terhadap guncangan eksternal dan terhadap konflik-konflik sosial internal. Kerentanan itu bisa timbul karena faktor alamiah (kemarau panjang, banjir, hama), karena perubahan pasar (merosotnya harga komoditi), kondisi kesehatan (penyakit), karena PHK.
8. *Insecurity*, tidak adanya jaminan keamanan bagi masyarakat miskin terhadap tindak kekerasan akibat status sosial mereka yang rendah, karena gender, ras, agama, etnis, dan sebagainya.

Berbagai kondisi tersebut mendefinisikan kemiskinan dalam pengertian yang lebih luas. Dan kemiskinan yang diakibatkannya bisa diklasifikasikan menjadi lima tipe, yaitu: (1) Kemiskinan interstitial: penduduk miskin yang hidup di tengah-tengah lingkungan orang kaya, atau kantong-kantong kemiskinan; (2) Kemiskinan perifer: kemiskinan yang terdapat di wilayah pinggiran dan di daerah marginal yang sulit dijangkau, terjadi akibat deprivasi materiil yang

berlangsung dalam keadaan isolasi dan alienasi; (3) Kemiskinan *overcrowding* : miskin karena tidak memiliki sarana materiil akibat terlalu padatnya penduduk sedangkan sumber daya terbatas; (4) Kemiskinan sporadik atau traumatik: timbul akibat kerentanan terhadap bencana alam (misalnya kemarau panjang), hilangnya lapangan pekerjaan dan ketidakamanan yang mungkin sementara tetapi seringkali berkembang menjadi endemik; (5) Kemiskinan endemik: timbul akibat kombinasi antara isolasi, alienasi, deprivasi teknologis, ketergantungan, dan kelangkaan asset. (Jazairy dalam Mohtar Mas' oed, 2003: 144-145).

Untuk menentukan ukuran kemiskinan bukanlah hal yang mudah. Kesulitan tersebut bukan hanya pada indikator apa yang akan digunakan, akan tetapi juga bagaimana menggunakan indikator tersebut pada suatu individu, keluarga, kelompok orang atau masyarakat. Untuk mempermudah bagaimana mengukur kemiskinan tersebut kemudian muncul konsep *poverty line* (garis kemiskinan). Konsep garis kemiskinan Sajogyo (dalam Nurhadi, 2007: 21) yang didasarkan pada tingkat pengeluaran ekuivalen beras kemudian dirubah menjadi pita kemiskinan, yang membagi garis kemiskinan menjadi tiga tingkatan:

- a. Paling miskin, bila jumlah pengeluaran yang diukur dengan ekuivalen beras hanya mencapai 270 kg per kapita per tahun untuk penduduk kota, dan 180 kg per kapita per tahun untuk penduduk desa.
- b. Miskin sekali, bila jumlah pengeluaran yang diukur dengan ekuivalen beras 360 per kapita per tahun untuk penduduk kota, dan 240 kg per kapita per tahun untuk penduduk desa.

- c. Miskin, bila jumlah pengeluaran yang diukur dengan ekuivalen beras 480 per kapita per tahun untuk penduduk kota, dan 320 kg per kapita per tahun untuk penduduk desa.

Studi yang dilakukan SMERU (dalam Nurhadi, 2007: 19) memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak semata-mata merupakan kondisi kekurangan pangan dan kekurangan aset produktif, tetapi juga ketidaktenangan dan terbatasnya partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Dalam studi ini disebutkan bahwa karakteristik dan kriteria yang digunakan untuk mengenali penduduk miskin bervariasi, tetapi umumnya yang dijadikan acuan adalah penguasaan tanah, jenis pekerjaan atau tingkat pendapatan, kondisi kehidupan sehari-hari, dan hubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Hasil studi konsolidasi memperlihatkan bahwa karakteristik penduduk miskin yang paling banyak dijadikan acuan adalah kondisi fisik rumah, pendidikan anak, jenis pekerjaan atau upah, dan pemenuhan kebutuhan pangan. Jika ditelusuri lebih dalam, meskipun karakteristik yang digunakan sebagai acuan sama, namun standar kemiskinannya berbeda. Perbedaan standar tersebut mencerminkan perbedaan standar kehidupan, budaya, dan ketersediaan sumber daya lokal.

Untuk memerangi kemiskinan di semua sektor lebih diperlukan pendekatan frontal dan komprehensif. Karena itu dibutuhkan upaya-upaya yang memihak, memberi perlindungan bukan sekedar kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan membiarkan masyarakat miskin itu membangun sendiri jaringan sosial dan kemampuannya yang dapat memperkuat posisi tawarnya. Menurut Bagong Suyanto (1995: 214), paling tidak ada empat upaya prioritas

yang harus dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin: *Pertama*, memperkuat posisi tawar dan memperkecil ketergantungan masyarakat miskin dari kelas sosial di atasnya dengan cara memperbesar kemungkinan mereka melakukan diversifikasi usaha. *Kedua*, memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat miskin dengan bunga yang rendah dan berkelanjutan. *Ketiga*, memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk bisa terlibat menikmati hasil keuntungan dari produksinya dengan cara menetapkan kebijakan harga yang adil. *Keempat*, mengembangkan kemampuan masyarakat miskin agar memiliki ketrampilan dan keahlian untuk memberi nilai tambah pada produksi dan hasil usahanya.

## **2. Pemberdayaan**

### **a. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan terkait erat dengan konsep alternatif pembangunan. Konsep ini menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Fokusnya adalah lokalitas, karena *civil society* lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi, tapi juga politik, sehingga masyarakat memiliki posisi tawar secara nasional maupun internasional. (Gunawan Sumodiningrat, 2007: 29).

Dalam berbagai literatur pembangunan, konsep pemberdayaan memiliki pengertian yang lebih luas. Andrew Pears dan Michael Stiefel mengatakan bahwa



menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Sedangkan Samuel Paul menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan dari perspektif lingkungan, Borrini mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu konsep yang mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003: 43). Konsep pemberdayaan juga mengandung konteks pemihakan kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (Gunawan Sumodiningrat, 2007: 29).

Istilah pemberdayaan merupakan penerjemahan dari istilah *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power*. Korten (1987) merumuskan pengertian *power* sebagai kemampuan untuk mengubah kondisi masa depan melalui tindakan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, *power* dalam proses pembangunan dapat diartikan sebagai penguasaan atau kontrol terhadap sumber daya, pengelolaan sumber daya dan hasil serta manfaat yang diperoleh (Korten dalam Soetomo, 2006: 404). Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan, dimana kekuatan tersebut berasal dari diri sendiri yang digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, dalam artian mendorong dengan menampilkan dan merasakan hak-haknya.

Sedangkan definisi pemberdayaan menurut *Merriam Webster dan Oxford English Dictionary*, dimana kata *empower* mengandung dua arti, yaitu: pertama, *"to give power or authority"* (memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; kedua *"to give ability to or enable"* (upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan). Jadi esensi dari pemberdayaan adalah memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dsb. (dalam Nurhadi, 2007: 68).

Beberapa definisi mengenai pemberdayaan dapat kita lihat dari pendapat para ahli berikut. Menurut Huntington dan Nelson 1994, pemberdayaan dimaknai sebagai suatu strategi dan usaha untuk mengembangkan peran rakyat dalam kegiatan pembangunan lewat kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif dan demokratis. Disini, makna partisipasi dapat bersifat mobilisasi dan dapat pula bersifat otonom atau mandiri. Selain itu menurut David Korten 1981, pemberdayaan dapat juga bermakna bahwa pembangunan harus didasarkan kepada kebutuhan, keinginan, perencanaan, dan kemampuan rakyat yang akan melaksanakan pembangunan. Robert Chambers menambahkan bahwa apa yang disebut sebagai *"people centered development"* atau pembangunan mulai dari belakang (*bottom up development*) merupakan salah satu model pembangunan yang mendasarkan diri pada pemaknaan pemberdayaan. Sedangkan Sarah Cook dan Macaulay 1996 mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu strategi mengembangkan rakyat dan memulainya lewat penyadaran, pencerahan, pemberdayaan pada para pelaksana, atau lewat kelompok elite pemimpin rakyat,

ataupun dimulai dengan memberdayakan institusi yang ada di sebelah atas. (dalam Kutut Suwondo, 2002: 225-226).

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah usaha untuk memberikan kekuatan, tenaga, dan kemampuan dengan akal atau cara kepada masyarakat, dalam hal ini berkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan yang berlangsung. Dalam konteks ini manusia bukan sebagai obyek dalam pembangunan, melainkan mampu berperan sebagai subyek atau pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Dengan demikian, tujuan dalam pemberdayaan ini adalah tercapainya kekuatan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan sosial.

Menurut Korten, ciri-ciri pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan antara lain:

- a. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhannya harus diletakkan pada masyarakat atau komunitas itu sendiri.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat atau komunitas untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang ada untuk mencukupi kebutuhannya.
- c. Mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya amat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
- d. Menekankan ada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek.
- e. Proses pembentukan jaringan antara birokrasi lembaga swadaya masyarakat dan satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horisontal. (Moeljarto T., 1995: 26).

Berdasarkan ciri pendekatan tersebut maka pemberdayaan masyarakat harus melakukan pendekatan berikut:

1. Upaya itu harus terarah. Ini secara populer disebut pemihakan dan ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhannya.
2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yaitu supaya bantuan tersebut efektif sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, dan juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. (Tri Winarni dalam Laporan Penelitian Is Hadri Utomo dkk, 2000: 15).

Suparjan dan Hempri Suyatno (2003: 44) mengemukakan bahwa:

”Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek tapi juga sebagai subyek. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur secara sistematis, apalagi dengan sebuah pembatasan waktu dan dana. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan *community awareness*, yaitu adanya kesadaran komunitas, dan diharapkan dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan serta mengeliminir terbentuknya solidaritas komunal semu pada masyarakat.”

Kutut Suwondo (2002: 74) mengemukakan bahwa dalam pemberdayaan atau *empowerment* terdapat tujuan, yaitu: *Pertama*, meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat dalam penguatan kelembagaan, organisasi sosial ekonomi melalui sosialisasi, pembinaan, pelatihan keterampilan. *Kedua*, mewujudkan masyarakat dengan peran keswadayaan dari masyarakat sebagai pelaku pembangunan. *Ketiga*, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi

masyarakat miskin dengan mengembangkan sistem perlindungan sosial dan dukungan bantuan sebagai upaya stimulan.

    Ginanjart Kartasasmita dalam Yuwono, dkk. (2006: 21) mengatakan bahwa:

”Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga jurusan yaitu: *pertama*, menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. *Ketiga*, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat yang lemah menjadi amat mendasar sifatnya. Melindungi disini harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah”.

    Gunawan Sumodinigrat (1999: 44) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Sedang menurut Drajat Tri Kartono (dalam Arbi Sanit, dkk., 2001: 53-54), gagasan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh berkembangnya kekuatan daerah termasuk juga penguatan IPTEK yang berbasiskan pada kekuatan masyarakat setempat. Dalam kerangka tersebut keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat melainkan juga aspek-aspek penting dan mendasar lainnya. Di samping itu pemberdayaan masyarakat harus mampu diarahkan pada proses-proses pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan serta menjamin terciptanya kemandirian dan keberlanjutan. Hal-hal mendasar dan penting yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Pengembangan organisasi atau kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisasi kegiatan masyarakat.
- b. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok atau organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam masyarakat.
- c. Kemampuan kelompok masyarakat dalam mengakses sumber-sumber lain yang dapat mendukung pengembangan kegiatan.
- d. Jaminan atas hak-hak masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal.
- e. Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik.
- f. Terpenuhinya kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka serta mampu menjamin kelestarian daya dukung lingkungan bagi pembangunan. (Drajat Tri Kartono dalam Arbi Sanit, dkk., 2001: 54).

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Loekman Soetrisno adalah sebagai berikut:

”Pemberdayaan masyarakat berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan mengentaskannya untuk pembangunan masyarakatnya”. (Loekman Soetrisno dalam Anggito Abimanyu, 1995: 136).

Hal senada juga diungkapkan oleh Goulet bahwa:

”Dilihat dari aspek manusia sebagai aktor utama proses pembangunan, maka pemberdayaan juga dapat berarti proses untuk mengaktualisasikan potensi manusia. Dalam kaitan dengan potensi manusia yang perlu diaktualisasikan agar dapat terpenuhi kehidupan sesuai harkat dan martabat manusia, di dalamnya terkandung tiga nilai yaitu kelestarian hidup, harga diri dan kebebasan”. (Goulet dalam Soetomo, 2006: 403).

Dalam konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan sebenarnya merupakan proses belajar yang menekankan orientasi pada proses serta pelibatan masyarakat (partisipasi).

Loekman Soetrisno (dalam Soetomo, 2006: 404) mengemukakan adanya dua versi yang berbeda dalam pendekatan pemberdayaan, yaitu versi Paulo Freire dan versi Schumacher. Menurut versi Paulo Freire pemberdayaan bukan sekedar memberi kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan sumber daya alam dan dana pembangunan saja, tetapi lebih dari itu pemberdayaan juga merupakan upaya mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan sosial, yang hanya mungkin

dilakukan melalui partisipasi politik. Di lain pihak, dalam versi Schumacher nuansa partisipasi politik ini kurang kental. Schumacher percaya bahwa manusia itu mampu membangun diri mereka sendiri tanpa harus terlebih dahulu menghilangkan ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat, asalkan mereka diberikan kail, bukan ikan. Loekman Soetrisno (dalam Anggito Abimanyu, dkk., 1995: 141) menambahkan bahwa menurut Schumacher "lebih baik memberi kail daripada memberi ikan" dengan demikian akan dapat menumbuhkan kemandirian. Tetapi Schumacher dalam usaha membentuk kelompok mandiri juga sangat memerlukan dukungan politik, artinya bahwa apabila membantu orang dengan memberi kail tapi orang tersebut tidak diberi hak untuk mengail di sungai maka pastilah mereka tidak akan dapat hidup dengan baik.

Dari berbagai konsep pemberdayaan secara luas di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memandirikan masyarakat dengan cara menggali potensi yang dimilikinya, kemudian memperkuat potensi tersebut dengan memberi masukan atau input dan kesempatan untuk mengembangkan potensi tersebut. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan perlu mendapat perhatian khusus, karena pembangunan dari dalam diri masyarakat miskin itu sendiri yang sebenarnya diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Maksudnya yakni membangun potensi-potensi yang ada dalam diri masyarakat miskin dengan menggunakan strategi dan pendekatan yang efektif sehingga menimbulkan kepercayaan diri dan membangkitkan kekuatan baru untuk bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya.



## **b. Pemberdayaan dalam Program Pengentasan Kemiskinan**

Mubyarto (1994: 182) mengemukakan bahwa orang miskin harus diberdayakan, dibangun dari ketidakberdayaan dan kata kunci bagi mereka menurutnya adalah keberdayaan, keswadayaan dan kemandirian. Hal senada juga ditegaskan oleh Heru Nugroho (dalam Awan, 1995: 33) dengan mengatakan bahwa mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya maupun politik sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mengentaskan dirinya sendiri dari problem kemiskinan yang dihadapi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Gunawan Sumodiningrat (1998: 37) mengemukakan bahwa:

”Pedoman utama dalam merumuskan kebijaksanaan pengentasan kemiskinan adalah mendukung dan menunjang berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peranserta, produktivitas dan efisiensi. Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap, terus-menerus dan terpadu, didasarkan pada kemandirian, yaitu meningkatkan kemampuan penduduk miskin untuk menolong diri mereka sendiri”.

Oleh karena itu setiap program untuk pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan usaha pemberdayaan masyarakat ini, Mohtar Mas’oed (2003: 32) mengemukakan bahwa:

”Cara paling efektif untuk menangani persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh rakyat adalah dengan membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri, untuk itu wewenang pembuatan keputusan mengenai pembangunan harus diserahkan kepada rakyat atau komunitas lokal, karena itu mekanisme pembangunan yang diandalkan adalah kekuatan rakyat (*”people power”*).”

Herbert J. Rubin dalam *Journal of Public Administration Review*; Sep/Oct 1993; 53, 5; ABI/INFORM Research pg. 431) mengemukakan bahwa:

“The ideology of holistic empowerment, to Community-Based Development Organizations (CBDOs) leaders, physical development is a tool, the means, toward accomplishing the broader end of economic empowerment and economic transformation for the poor. To aid the CBDOs in the efforts, those in the public sector must first understand the holistic version for the community held by CBDOs in which physical and social consequences of project overlap and the equity consequences of development are as important as its profitability.” (dalam Herbert J. Rubin: *Journal of Public Administration Review*; “*Understanding The Ethos of Community Based Development : Ethno Graphic Description for Public Administrators*”, Sep/Oct 1993; Vol. 53, No. 5; ABI/INFORM Research pg. 431. Northern Illinois University).

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (Heru dalam Awan, 1995: 34), untuk dapat menanggulangi kemiskinan terdapat beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan lapisan masyarakat miskin, yaitu: *pertama*, pemberdayaan masyarakat merupakan prasarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politis. *Kedua*, setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya dan pemutusan hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin harus dilakukan. *Ketiga*, tanamkan rasa kebersamaan (*egalitarian*) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi merupakan penjelmaan konstruksi sosial. *Keempat*, merealisasikan perumusan pembangunan yang memusatkan pada masyarakat miskin secara penuh. *Kelima*, perlunya pembangunan sosial budaya bagi masyarakat miskin. *Keenam*, diperlukan adanya redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata.

Chambers mengatakan bahwa permasalahan kemiskinan cukup kompleks yang tidak jarang melibatkan banyak faktor. Keseluruhan faktor tersebut saling kait-mengkait dan saling memperkuat sehingga membentuk perangkap kemiskinan. Dalam hal ini, pemberdayaan dapat dijadikan sebagai pintu keluar dari perangkap kemiskinan tersebut. Melalui upaya pemberdayaan diharapkan akan dapat mengurangi isolasi, kerawanan, kelemahan fisik dan pada gilirannya akan mengurangi kondisi kemiskinan. Dengan pemberdayaan diharapkan akan dapat meningkatkan akses kelompok miskin dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap fasilitas dan pelayanan, akses terhadap bantuan hukum, meningkatkan posisi tawar, serta mengurangi peluang terjadinya eksploitasi oleh kelompok lain. (Chambers dalam Soetomo, 2006: 407-408).

Dengan usaha pemberdayaan masyarakat miskin ini diharapkan nantinya akan terwujud suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat miskin tersebut akan mengurangi ketergantungan terhadap segala bantuan dari luar, sehingga meskipun program bantuan telah dihentikan mereka masih dapat berswadaya dengan memanfaatkan potensi yang telah ada pada diri mereka untuk lepas dari lingkaran kemiskinan.

Dengan cara demikian setidaknya masyarakat miskin akan lebih menyadari bahwa kemiskinan yang dialaminya hanya dapat dirubah dengan keinginan untuk maju dan menggunakan segala kemampuan yang ada. Bantuan dari pemerintah ataupun pihak lain bukan merupakan hal utama tetapi yang terpenting adalah keinginan dan usaha dari masyarakat miskin sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya membantu masyarakat miskin dari ketidakberdayaannya melalui dana P2KP yaitu dengan menggunakan dana tersebut untuk menciptakan suatu usaha atau mengembangkan usaha yang telah ada. Selain itu juga diadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknik dan manajerial dalam berusaha serta adanya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat, sehingga mereka bisa lebih berdaya dan meningkat kesejahteraan hidupnya.

### **3. Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Namun upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan (Heru dalam Awan, 1995: 32). Kegagalan tersebut disebabkan oleh kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan hanya berupa paket bantuan ekonomi yang cenderung bersifat karitas (derma), artinya menempatkan si miskin sebagai objek semata dari suatu kegiatan yang bersifat proyek dan hanya mampu menjawab masalah dalam jangka pendek dan tidak mengubah apapun, sehingga kurang efektif dalam memecahkan masalah-masalah kemiskinan (Agus Dwiyanto dalam Awan, 1995: 65).

Upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan melalui bantuan ekonomi yang sifatnya karitas saja. Kebijakan pembangunan model paket-paket bantuan ekonomi di satu sisi akan rawan bias dan memperlebar ketimpangan, dan di sisi lain upaya karitas dengan cara menyantuni secara penuh dan menjadikan

rakyat miskin sebagai obyek amal justru akan menimbulkan ketergantungan pada pihak sasaran program dan membunuh tekad kemandirian masyarakat miskin itu sendiri (Bagong Suyanto, 1995: 213).

Untuk menindaklanjuti program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti IDT (Inpres Desa Tertinggal) maupun PPK (Program Pengembangan Kecamatan), maka berdasarkan Instruksi Presiden No. 21 tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan, pada bulan Juli 1998 Pemerintah Indonesia melalui Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) meluncurkan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dirancang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat miskin. Proyek ini menganut pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu syarat untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

P2KP mempunyai strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal sehingga menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dengan intensitas keterlibatan sampai pada pengambilan keputusan. Sehingga diharapkan setelah proyek berakhir, upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam proses pemberdayaan ini, peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan. Dari desain programnya, P2KP mengandung unsur adanya pelibatan masyarakat melalui proses belajar dan upaya untuk membangun kemandirian serta keberlanjutan melalui proses institusionalisasi. Dalam pemanfaatan dana P2KP

dibentuk organisasi yaitu BKM dan KSM. Selain itu ada beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukakn berupa pendampingan pada BKM dan KSM dan juga adanya sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial dalam berusaha. Sesuai dengan kebijaksanaan umum P2KP, kegiatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat yang sedang dialami, melainkan lebih bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang.

Soetomo (2006: 218) menyatakan bahwa P2KP sangat memperhatikan proses perencanaan dari masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai mekanisme *bottom up* dibandingkan yang bersifat *top down*. Di samping itu, P2KP juga memberikan perhatian bagi tumbuhnya institusi lokal yang diharapkan dapat memfasilitasi mekanisme perencanaan dan pengelolaan oleh masyarakat. Dengan tumbuhnya institusi lokal diharapkan keberlanjutan usaha pengentasan kemiskinan pasca program dapat lebih dijamin. Hal itu disebabkan oleh karena institusionalisasi merupakan prasarat bagi usaha dan aktivitas yang berkelanjutan.

Berdasarkan desain programnya, Soetomo (2006: 221) mengemukakan bahwa visi P2KP adalah masyarakat yang mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan. Sementara untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi P2KP yaitu memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarkat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan membudayakan kemitraan strategis antara masyarakat dan

pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, maka dalam pelaksanaan P2KP dibentuk tim koordinasi dalam beberapa tingkatan. Pada tingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi P2KP Pusat dan dipilih lembaga konsultan melalui suatu lelang terbuka yang disebut sebagai Konsultan Manajemen Pusat (KMP). Pada tingkat wilayah, ditempatkan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang masing-masing menangani satu Satuan Wilayah Kegiatan (SWK). Pada tingkat kelurahan dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang bertindak sebagai lembaga yang memfasilitasi peran serta atau partisipasi yang tumbuh dari bawah. BKM adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat yang mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. Di samping itu, BKM mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga. BKM beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan warga kelurahan. Untuk melaksanakan program kegiatan BKM dibantu Unit-unit Pengelola (UP) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah, namun setidaknya terdiri dari Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL). Sedang masyarakat miskin dapat berpartisipasi aktif dengan membentuk Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Untuk memperoleh bantuan dana, setiap KSM menyiapkan sebuah usulan subproyek dengan menggunakan format baku yang disediakan oleh fasilitator dan kemudian ditandatangani oleh seluruh kelompok.

Bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan dalam bentuk pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dana bantuan P2KP merupakan dana hibah dan pinjaman yang disalurkan kepada Kelompok-kelompok Swadaya (KSM) secara langsung dengan sepengetahuan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang ditunjuk, dan sepengetahuan warga masyarakat setempat melalui kelembagaan masyarakat yang dibentuk. Dana bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pelatihan teknis dan manajerial, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, dan bantuan sosial kemanusiaan.

Penggunaan dana maupun perkembangan dari alokasi dana BLM P2KP, baik untuk pelatihan, prasarana fisik maupun ekonomi produktif diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Lewat bantuan tersebut, terutama untuk kegiatan bantuan ekonomi dalam bentuk pinjaman dana bergulir untuk usaha produktif, diharapkan kegiatan usaha ekonomi mikro bisa tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada guna membantu peningkatan kesejahteraan keluarga miskin secara berkelanjutan. Dengan bantuan pinjaman modal bergulir itu pula, diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat yang mandiri dengan membangun dan mengorganisir diri atas dasar ikatan pemersatu dan kepercayaan bersama.



#### **4. Pengertian Kota (*City*) dan Perkotaan (*Urban*)**

Dalam kehidupan sehari-hari kota selalu nampak sibuk. Warga kota yang menjadi penghuni kota memerlukan tempat berteduh, tempat bekerja, tempat bergaul, dan tempat menghibur diri. Oleh karena itu, kita dapat melihat beberapa aspek kehidupan di kota antara lain aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek pemerintahan, dan sebagainya. Pada zaman paleolitik sebelum orang tahu akan logam dan sedikit-sedikit sudah menggunakan batu sebagai alat, makna pada waktu itu yang dianggap kota ialah tempat tinggal di gua-gua, di lembah-lembah atau tempat-tempat yang terlindung. Pola permukiman dalam hal ini kota, mengalami perubahan dan kemajuan dari zaman ke zaman sesuai dengan kemampuan manusia setempat dan tata geografi daerah tersebut. Untuk membuat sebuah batasan atau definisi mengenai kota tidaklah demikian mudah. Ternyata masih ada beberapa pandangan definisi yang belum dapat disatukan. (R. Bintarto 1977 dalam R. Bintarto, 1989 : 35-36).

Menurut Bintarto, definisi kota adalah:

”Dari segi geografi, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

Dari fakta, kota merupakan tempat bermukim warga kota, tempat bekerja, tempat hidup dan tempat rekreasi. Oleh karena itu, kelangsungan dan kelestarian kota harus didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai untuk waktu yang selama mungkin.

Dari foto udara, kota itu nampaknya sebagai aglomerasi atau pengelompokan bangunan yang dikelilingi atau dibatasi oleh jalur-jalur

jalan atau dan sungai-sungai yang diselang-seling dengan kelompok pepohonan besar-kecil.” (R. Bintarto, 1989: 36).

Selanjutnya, Bintarto mengatakan bahwa:

”Istilah kota dan daerah perkotaan dibedakan di sini karena ada dua pengertian yaitu: kota untuk *city* dan daerah perkotaan untuk *'urban'*. Istilah *city* diidentikkan dengan kota, sedang urban berupa suatu daerah yang memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern, dapat disebut perkotaan.” (R. Bintarto, 1989: 36).

Di Swedia, Polandia, dan Romania apa yang disebut dengan urban adalah kot-kota dan kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam wilayah administrasi urban. Di Hongaria, suatu pemukiman dapat disebut urban apabila pemukiman tersebut memenuhi persyaratan *'urban'* dan tidak memandang pada besar kecilnya daerah pemukiman tersebut. Di Kanada semua kota, kabupaten dan desa-desa yang digabungkan disebut *'urban'*. Pengertian urban di Australia adalah ibu kota dari propinsi atau ibu kota karesidenan, kota-kota yang memiliki ciri-ciri khusus lain juga dianggap *'urban'*. Batas wilayah kekotaan mempunyai luas dan bentuk yang berbeda-beda tergantung pada tingkat budaya dan teknologi penduduk setempat. (R. Bintarto, 1989: 37).

Penggolongan kota dapat didasarkan pada fungsi, struktur mata pencaharian, tipe masyarakat, jumlah penduduknya, besar-kecilnya daerah permukiman dan sebagainya. Jadi penggolongan kota ini dapat dilihat dari segi ekonomi, segi sosiologi, segi demografi, dan segi geografis yang abstrak.

Dalam konteks P2KP ini, yang dimaksud dengan perkotaan disini adalah urban/kecamatan urban (dengan menggunakan kriteria BPS; kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan lebih banyak dari pada jumlah desa) dan ditambah

dengan kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten, serta keduanya bukan lokasi sasaran Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan merupakan lokasi sasaran proyek yang telah disepakati sesuai dengan hasil koordinasi interdept dan proyek-proyek lainnya serta adanya pemekaran wilayah administratif di daerah. (Pedoman Umum P2KP, 2004: 14).

Kecamatan Teras adalah salah satu dari lima kecamatan di wilayah Kabupaten Boyolali yang menjadi wilayah sasaran P2KP 2.2 KMW SWK-XIII Jateng-Kabupaten Boyolali.

## **5. Persepsi**

Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka (Robbins, 2002: 46). Sedangkan Hamner dan Organ dalam Adam I. Indrawijaya (1989: 45) menyatakan bahwa persepsi adalah:

*”The Process by which people organize, interpret, experience, and process cues or material (input) received from the external environment. (Suatu proses di mana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya).”*

Bagaimana segala sesuatu tersebut mempengaruhi persepsi seseorang, nantinya akan mempengaruhi pula perilaku yang akan dipilihnya. Duncan dalam Miftah Thoha (1993: 139) juga berpendapat bahwa persepsi dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku khususnya psikologi, istilah ini digunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu.

Pandangan lain dikemukakan oleh Combs dan kawan-kawan dalam Adam

I. Indrawjaya (1989: 47) sebagai berikut:

*"Each time a person is confronted with a familiar stimulus, the information is assembled and compared with existing data. How any person interprets the stimulus depends on his or her personality and aspirations. (Setiap kali seseorang dihadapkan pada suatu rangsangan yang sudah biasa ia hadapi, maka ia akan langsung mengumpulkan informasi (dari pengalamannya) dan membandingkannya dengan data yang ada. Bagaimana ia memberikan arti terhadap rangsangan tersebut tergantung keadaan kepribadian dan aspirasi yang bersangkutan)."*

Dari pendapat Combs dkk. secara singkat dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu masukan atau rangsangan yang menghasilkan informasi dan perbandingan antar masukan sehingga memberikan sebuah arti terhadap masukan atau rangsangan tersebut. Masukan-masukan atau rangsangan-rangsangan tersebut bisa berbentuk data, yang kemudian diolah menjadi informasi. Menurut Luthans, persepsi itu adalah lebih kompleks dan luas kalau dibandingkan dengan penginderaan. Proses persepsi meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan, dan penafsiran. Walaupun persepsi sangat tergantung pada penginderaan data, proses kognitif barangkali bisa menyaring, menyederhanakan, atau mengubah secara sempurna data tersebut. Dengan kata lain proses persepsi dapat menambah, dan mengurangi kejadian senyatanya yang diinderakannya oleh seseorang (Miftah Thoha, 1993: 139-140).

Dari beberapa definisi mengenai persepsi di atas, dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan hasil pengamatan terhadap suatu obyek melalui panca indera sehingga diperoleh suatu pemahaman atau penilaian. Jadi dalam persepsi mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a. Merupakan hasil penginderaan.
- b. Merupakan hasil penilaian.
- c. Merupakan pengolahan akal dari data indrawi yang diperoleh melalui pengamatan.

Menurut Tjahya Supriatna (2000: 96), istilah lain dari persepsi adalah "pengamatan". Tjahya mengemukakan bahwa persepsi (pengamatan) adalah suatu proses seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan. Lebih lanjut, Tjahya Supriatna (2000: 97) menjelaskan bahwa *seleksi* disini berarti bahwa seseorang tidak akan dapat menangkap dan menyadari seluruh rangsangan yang setiap saat berubah, karenanya diperlukan suatu kegiatan seleksi yang bertujuan mencegah terjadinya keaburan dalam menerima rangsangan serta agar dapat mengelola dan memberikan makna kepada rangsangan tersebut. Sedangkan *pengorganisasian dan interpretasi* terhadap rangsang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh/dipelajari. Berdasarkan pengalaman, setiap benda, obyek, manusia telah diberikan sifat atau tanda yang tetap akan melatarbelakangi seseorang dalam mengorganisasi dan menginterpretasi rangsang.

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan istilah yang memiliki pengertian yang berhubungan dengan pandangan atau daya menanggapi, memahami apa yang ada di sekeliling individu. Dengan kata lain persepsi adalah cara seseorang memandang atau menanggapi suatu obyek atau peristiwa yang ada di sekitarnya dengan menyimpulkan informasi yang sampai

kepadanya. Persepsi seseorang terhadap suatu obyek ini tidak terlepas dari kerangka pemikiran ataupun pengalamannya, karena persepsi merupakan suatu proses memahami mengenai hubungan peristiwa-peristiwa atau obyek-obyek sosial dengan cara merasakan dan menginterpretasikan lewat pengalaman-pengalamannya. Jadi persepsi menunjuk pada aktivitas merasakan, menginterpretasikan, dan memahami obyek-obyek fisik maupun sosial.

Persepsi merupakan suatu penilaian, sebagai persiapan perilaku kongkrit dan nilai-nilai itu dengan melalui emosi, motivasi dan ekspektasi akan mempengaruhi persepsi, nilai-nilai yang berbeda juga mempengaruhi persepsi perilaku tersebut. Dalam memandang sesuatu hal, baik itu benda, perbuatan, peristiwa maupun sesuatu yang lain, kita selalu mempunyai pendapat atau pandangan tersendiri yang mungkin berbeda dengan pendapat orang lain. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. Karena persepsi juga merupakan sebuah internal yang dilakukan oleh individu untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal.

Persepsi timbul karena adanya dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya tergantung pada proses pemahaman terhadap sesuatu termasuk didalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan, dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai (Miftah Thoha, 1993: 135). Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Adam I. Indrawijaya antara lain:

1. Faktor lingkungan, yang secara sempit menyangkut warna, bunyi, sinar, dan secara luas dapat menyangkut faktor ekonomi, sosial dan politik.
2. Faktor konsepsi, yaitu pendapat dan teori seseorang tentang manusia dan segala tindakannya. Seseorang yang mempunyai konsepsi, pendapat, dan teori bahwa manusia pada dasarnya baik, cenderung menerima semua rangsangan sebagai sesuatu yang baik atau paling tidak sebagai sesuatu yang bermanfaat, dan sebaliknya.
3. Faktor yang berkaitan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri (*the concept of self*). Seseorang mungkin saja beranggapan bahwa dirinyalah yang terbaik, sedang orang lain selalu kurang baik atau sebaliknya.
4. Faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan, berkaitan dengan dorongan dan tujuan seseorang untuk menafsirkan suatu rangsangan.
5. Faktor pengalaman masa lampau. Pengalaman dan latar belakang kehidupan seseorang pada waktu kecil akan menentukan kepribadiannya dan mempengaruhi perilakunya (Adam I. Indrawijaya, 1989: 48-49).

Sedangkan Tjahya Supriatna (2000: 97) berpendapat bahwa dalam berinteraksi dengan lingkungannya, seseorang secara sadar maupun tidak sadar melakukan penilaian terhadap lingkungannya, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh dalam penilaian. Variabel-variabel dalam persepsi (pengamatan) tersebut adalah penghayatan, situasi, perhatian. Pengamatan diri mempengaruhi seseorang dalam ketepatan pengamatannya dan juga dalam memutuskan. Variabel-variabel tersebut juga dipengaruhi oleh status seseorang, peran maupun kondisi dalam diri seperti kebutuhan, kecemasan.

Tak jauh berbeda dengan pendapat Tjahya Supriatna, Robbins mengemukakan bahwa:

”Ketika seorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi tersebut meliputi sikap, kepribadian, motif,

kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan.” (Stephen P. Robbins, 2002: 46).

Herberth dalam Winardi (2001:48) menjelaskan bahwa agar muncul adanya persepsi maka stimulus atau rangsangan perlu diidentifikasi atau diketahui. Hal tersebut berarti bahwa perlu digunakan peraturan seleksi tertentu, guna membedakan informasi yang dipersepsi dan informasi yang diabaikan. Maka informasi tersebut perlu diorganisasikan dengan cara yang mengandung arti, maksudnya ditafsirkan sehubungan dengan situasi yang sedang dihadapi dan pengalaman masa lalu. Sebagai hasil langsung dari proses tersebut di mana terjadi pembentukan persepsi, maka individu mampu memasuki informasi relevan dari lingkungan eksternalnya ke dalam perilaku.

Hal senada juga dikemukakan oleh Miftah Thoha (1993: 138) bahwa persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Demikian halnya dengan apa yang dikatakan oleh Adam I. Indrawijaya (1989: 47) bahwa manusia dalam mengorganisasikan, menafsirkan, dan memberi arti kepada suatu rangsangan selalu menggunakan inderanya, yaitu melalui proses mendengar, melihat, merasa, meraba, dan mencium, yang dapat terjadi terpisah-pisah atau serentak. Intensitas dan tingkat penggunaan indera mempengaruhi pula



tingkat kepekaan seseorang dan ini kemudian turut mempengaruhi persepsi dari seseorang.

Dengan demikian orang akan secara selektif menafsirkan apa yang mereka saksikan berdasarkan kepentingan, latar belakang, pengalaman, dan sikapnya. Menurut Kast, betapapun sempurnanya sesuatu upaya untuk melaksanakan kegiatan komunikasi, ia akan menjadi tidak efektif apabila ia tidak mencapai tujuan yang diinginkan oleh sumber pengirim pesan atau berita (*source*). Begitu pula halnya sebuah stimulus yang akan dipersepsikan tidak menimbulkan dampak atas perilaku (Kast dalam Winardi, 2001: 48).

Persepsi yang dimiliki oleh seorang individu terhadap sesuatu akan mempengaruhi tingkah lakunya, dan juga orang lain di sekitarnya. Persepsi meliputi semua proses yang dilakukan untuk memahami informasi mengenai lingkungannya. Dalam penelitian ini akan diungkapkan mengenai persepsi masyarakat (dalam hal ini adalah masyarakat sebagai sasaran proyek) terhadap kemanfaatan P2KP dalam memberdayakan masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang menjadi sasaran proyek. Maksudnya, sejauh mana P2KP (sebagai proyek yang hadir untuk menanggulangi masalah kemiskinan) mampu memberdayakan masyarakat sasaran proyek, menurut persepsi masyarakatnya.

Jadi persepsi dalam penelitian ini merupakan suatu penilaian subjektif masyarakat Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali terhadap kemanfaatan P2KP dalam upayanya memberdayakan masyarakat di Desa tersebut.

Tentunya masyarakat mendambakan adanya suatu dampak yang positif dari hadirnya P2KP sebagai proyek yang memberdayakan masyarakat, yaitu terwujudnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan di sini bukan hanya dalam arti ekonomi tetapi juga politik, sosial, budaya maupun aset. Lebih jauh lagi dengan hadirnya P2KP melalui pendekatan pemberdayaannya diharapkan tercipta suatu perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kemudian harapan-harapan tersebut akan sesuai atau tidak dengan realitasnya setelah masyarakat menerima dan melaksanakan proyek melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaannya. Realitas itulah yang memunculkan persepsi bagi masyarakat sebagai sasaran proyek terhadap kemanfaatan P2KP dalam memberdayakan masyarakat di Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali.

## **6. Partisipasi**

Partisipasi menurut Hoofsteede (dalam Khairuddin, 1992: 124) didefinisikan sebagai "*The taking of part in one or more phases of the process.*" (Partisipasi berarti ambil bagian dalam satu tahapan atau lebih dari suatu proses). Agak berbeda dengan pendapat di atas, Keith Davis (dalam Khairuddin, 1992:

124) memberikan pengertian partisipasi sebagai *"As mental and emotional involvement of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them."* (Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya). Dalam pengertian tersebut paling tidak dijumpai adanya tiga hal pokok, yaitu:

- a. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi.
- b. Partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok.
- c. Partisipasi merupakan tanggung jawab terhadap kelompok.

Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Dwight V. King digambarkan sebagai keikutsertaan rakyat atau suatu kelompok masyarakat dalam program-program pemerintah (Dawam Raharjo, 1985: 78). Sedangkan Gordon W. Allport mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan ego atau diri sendiri / pribadi / personalitas (kejiwaan) lebih dari pada hanya jasmaniah / fisik saja (dalam Santoso Sastropetro, 1986: 51).

Selanjutnya menurut Totok Mardikanto, partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Masih menurut Totok Mardikanto dalam kamus Sosiologi Bomby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan

keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (dalam Yuwono, dkk., 2006: 69).

Mikkelsen mengemukakan bahwa tafsiran mengenai kata partisipasi sangat beragam menurut Organisasi Pangan Sedunia (FAO), yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan,
- b. Partisipasi masyarakat adalah pemekaan "membuat peka" pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek,
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, untuk mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan untuk melakukan hal tersebut,
- d. Partisipasi adalah dialog antara masyarakat setempat dengan para staff yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial,
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang dtentukannya sendiri,
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. (dalam Yuwono, dkk., 2006: 68-69).

Partisipasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah partisipasi dalam pembangunan. Totok Mardikanto (dalam Yuwono dkk, 2006: 82) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah adanya kesukarelaan anggota masyarakat untuk terlibat dan atau melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut, Glenn A. Bowen: *Community Development Journal* Vol 43 No 1 January 2008 pp. 65 & Oxford University Press and *Community Development Journal*. 2007) mengemukakan bahwa :

"Citizen participation has long been regarded as the hallmark of a democratic society. Community development practitioners are among the strongest proponents of citizen participation as an integral element of economic improvement and social change efforts. Over the years, there has been an ebb and flow of interest among social science scholars regarding citizen participation in planning and decision-making processes. Recently, however, researchers have shown renewed interest in participatory processes and outcomes involving citizens at the local community level ( (Naparstek and Dooley, 1997; Poole and Colby, 2002; Schafft and Greenwood, 2003; Silverman, 2005)" ( dalam Glenn A. Bowen: "Community Development Journal" Vol 43 No 1 January 2008 pp. 65 & Oxford University Press and *Community Development Journal*. 2007. [journals.permissions@oxfordjournals.org](mailto:journals.permissions@oxfordjournals.org); doi:10.1093/cdj/bsm011. Advance Access publication 26 April 2007).

Loekman Soetrisno menjelaskan bahwa ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat. Definisi *pertama* adalah definisi yang diberikan oleh kalangan aparat perencana pembangunan formal di Indonesia, yang mendefinisikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Definisi *kedua* adalah definisi yang ada dan berlaku universal, yaitu partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. (Loekman Soetrisno, 1995: 221-222).

Selanjutnya Dawam Raharjo menjelaskan bahwa partisipasi aktif adalah keterlibatan seseorang dalam membuat keputusan dan melaksanakan keputusan

untuk menentukan perbuatan mereka sendiri, peranan mereka, dan dalam banyak hal akan menentukan kelembagaan dan lingkungan sosial mereka. Inilah yang disebut sebagai pembangunan oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat ( Y. Slamet, 1994: 28).

Karena pembangunan semakin berkembang sehingga sangat mungkin terjadi penafsiran yang berbeda tentang partisipasi. Hal ini juga dijelaskan oleh Ginanjar Kartasmita (dalam Yuwono, 2006: 69) dimana partisipasi masyarakat disesuaikan dengan kondisinya, yaitu bahwa partisipasi melibatkan warga masyarakat khususnya kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil-hasilnya. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Slamet Margono (dalam Yuwono, 2006: 70) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi merupakan suatu bentuk dari interaksi komunikasi yang berkaitan dengan pembagian wewenang, tanggungjawab dan manfaat.

Keith Davis (dalam Santoso Sastropetro, 1986: 16) mengemukakan bentuk dan jenis partisipasi adalah sebagai berikut:

Bentuk Partisipasi:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
2. Sumbangan spontan berupa barang atau uang
3. Sumbangan dari luar dalam bentuk proyek yang bersifat berdikari
4. Proyek yang dibiayai oleh komuniti setelah ada konsensus dalam rapat komuniti
5. Sumbangan dalam bentuk jasa kerja

6. Aksi massal mengerjakan proyek secara sukarela
7. Mengadakan perjanjian bersama untuk bekerjasama mencapai tujuan atau cita-cita
8. Melakukan pembangunan secara endogen atau dalam lingkungan keluarga
9. Pembangunan proyek-proyek komuniti yang otonom.

Jenis-jenis Partisipasi:

1. Partisipasi dengan pikiran (psychological participation)
2. Partisipasi dengan tenaga (physical participation)
3. Partisipasi dengan pikiran dan tenaga (active participation)
4. Partisipasi dengan keahlian (with skill participation)
5. Partisipasi dengan barang (material participation)
6. Partisipasi dengan uang (money participation)
7. Partisipasi dengan jasa (services participation).

Pengertian partisipasi berarti keterlibatan dalam hal proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, dan menunjukkan tujuan serta prioritas dalam rangka mengeksplorasi sumber-sumber potensial dalam pembangunan (Daryono dalam Santoso Sastropetro, 1986: 52). Dan berdasarkan penjelasan tersebut, maka bidang-bidang untuk partisipasi masyarakat menurut Daryono (dalam Santoso Sastropetro, 1986: 21) adalah:

- a. Dalam proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan
- b. Dalam proses pelaksanaan program
- c. Dalam proses monitoring serta evaluasi terhadap program.

Selanjutnya Prof. S. Hamidjojo mengemukakan bahwa untuk mencapai perubahan mengarah kepada perbaikan diperlukan suatu strategi sebagai pola penentuan serangkaian tujuan-tujuan dari perubahan yang diinginkan dengan

partisipasi sosial. Strategi itu mencakup konsepsi atau partisipasi tentang masukan materi perubahan (inovasi dengan dana dan tenaga yang dianggap paling efektif dan efisien dan dituangkan dalam sistem untuk menimbulkan perubahan ke arah kebaikan) (dalam Santoso Sastropetro, 1986: 31). Beberapa syarat yang harus diorganisasikan dalam usaha memelihara partisipasi sosial menurut Prof. S. Hamidjojo antara lain: a) adanya suatu masalah, b) cita-cita, c) iklim sosial, d) strategi, e) obyek partisipasi, f) pembaharu, g) wadah dan saluran (dalam Santoso Sastropetro, 1986: 29).

Menurut Totok Mardikanto, munculnya paradigma pembangunan yang partisipatif dan partisipatoris mengidentifikasi adanya beberapa perspektif yaitu:

1. Pelibatan masyarakat setempat (masyarakat miskin, perempuan) dalam sosialisasi, perencanaan;
2. Pelibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program atau proyek yang mewarnai hidup mereka;
3. Melibatkan masyarakat setempat dalam pengendalian, pelestarian agar program atau proyek dapat dikendalikan atau *sustainable* (dalam Yuwono, dkk., 2006: 70).

Dusseldorp membedakan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaannya, sebagai berikut:

1. *Partisipasi spontan*, yaitu partisipasi yang terbentuk secara spontan dan tumbuh karena motivasi *intrinsic* berupa pemahaman, penghayatan, atau keyakinannya sendiri, tanpa adanya pengaruh yang diterimanya dari penyuluhan atau bujukan yang dilakukan oleh pihak lain (baik individu maupun lembaga masyarakat).
2. *Partisipasi terinduksi*, yaitu partisipasi yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan, penyuluhan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. Motivasi ekstrinsik tersebut bisa



berasal dari pemerintah, lembaga masyarakat, maupun lembaga sosial setempat atau individu.

3. *Partisipasi tertekan oleh kebiasaan*, yaitu partisipasi yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya. Partisipasi yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat, jika tidak berperan serta khawatir akan tersisih atau terkucilkan oleh masyarakat.
4. *Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi*, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
5. *Partisipasi tertekan oleh peraturan*, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan. (dalam Yuwono, dkk., 2006: 82-83).

Dawam Raharjo menjelaskan adanya tiga variasi bentuk partisipasi yang ditunjukkan masyarakat, juga berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi yaitu:

1. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan.
2. Partisipasi penuh (*full scale participation*), yaitu partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
3. Mobilisasi tanpa partisipasi, yaitu partisipasi yang dibangkitkan pemerintah (penguasa) tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadinya dan tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijaksanaan pemerintah. (dalam Yuwono, dkk., 2006: 83).

Sedangkan untuk mengukur tingkatan partisipasi, menurut Stuart Chapin (dalam Y. Slamet, 1994: 82) ada tiga ukuran partisipasi yaitu: kehadiran (*attendance*), keanggotaan di dalam kepengurusan, dan dukungan-dukungan yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain di Jamaica, bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperoleh dari partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan. (Taliziduhu Ndraha, 1990: 105).

Totok Mardikanto menjelaskan bahwa untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela bukan karena paksaan atau ancaman,
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu (fisik, mental, intelegensia, ekonomis, dan non ekonomis),
- c. Menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. (dalam Yuwono, dkk., 2006: 72).

Mubyarto (dalam Suparjan dan Hemptri Suyatno, 2003: 58) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dengan demikian sudah jelas bahwa inti dari partisipasi rakyat adalah

sikap sukarela rakyat untuk membantu keberhasilan program pembangunan, dan bukannya sebuah proses mobilisasi rakyat. Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003: 58) mengungkapkan kaitan partisipasi dengan pembangunan sebagai berikut:

1. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses sosial hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam memobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan dan pembinaan tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu atau masyarakat baik secara fisik, material maupun non fisik untuk mengambil bagian dalam sebuah kegiatan atau perkumpulan baik secara bebas sukarela, spontan dengan pemahaman sendiri, maupun karena terinduksi oleh bujukan dan arahan dari pihak lain, dengan usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan. Kemudian, partisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Glenn A. Bowen dalam *Community Development Journal* Vol 43 No 1 January 2008 pp. 65 & Oxford University Press and *Community Development Journal*. 2007) mengemukakan bahwa :

“The benefits of citizen participation accruing to individuals, groups and communities have been discussed widely for many years (Cahn and Camper Cahn, 1968; Gamble and Weil, 1995; Hardina, 2003; Schafft and Greenwood, 2003). Participation taps the energies and resources of individual citizens, providing a source of special insight, information, knowledge and experience, which contribute to the soundness of community solutions (Cahn and Camper Cahn, 1968). Citizen participation also helps to ensure a more equitable distribution of resources and to improve low-income communities (Gamble and Weil, 1995). Additionally, participation in decision-making may serve as a vehicle for empowerment (Hardina, 2003). Citizen participation is most likely to be effective when public officials regard it as social exchange, involving reciprocity, balance of power and autonomous representation (McNair, 1981). Therein lies a major issue facing proponents of participation. As long as politicians and politically appointed decision-makers perceive citizen participation to be a threat to their positions of power, they will remain resistant, and, as a consequence, power imbalances will persist. Nevertheless, while participation will not erase power differentials, it may, as Schafft and Greenwood (2003, p. 21) argue, help to ‘level the playing field’.” ( dalam Glenn A. Bowen: ”*Community Development Journal*” Vol 43 No 1 January 2008 pp. 65 & Oxford University Press and *Community Development Journal*. 2007. [journals.permissions@oxfordjournals.org](mailto:journals.permissions@oxfordjournals.org); doi:10.1093/cdj/bsm011. Advance Access publication 26 April 2007)).

Suatu kegiatan apapun bentuknya, tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan tanpa keikutsertaan dukungan atau partisipasi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Apalagi usaha-usaha pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, mau tidak mau sangat tergantung pada kesediaan masyarakat untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam hal suksesnya pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan yang diusahakan.

Usaha pembangunan yang dilaksanakan pemerintah inipun tidak mungkin lepas dari peran serta dan keterlibatan aktif anggota masyarakat. Pembangunan tersebut tidak jarang mengalami hambatan, kurang bermanfaat, bahkan mengalami kegagalan karena masyarakat sendiri tidak mau tahu dan tidak mau ikut berpartisipasi di dalamnya, apalagi jika di dalamnya ada unsur inovasi, sesuatu yang baru dan belum dikenal, sehingga masyarakat belum tahu manfaat apa yang bisa mereka peroleh dari usaha pembangunan yang sedang dilaksanakan. Kekurangtahuan masyarakat ini menyebabkan mereka kadang bersikap acuh dan tidak peduli terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan. Akibatnya, hasil-hasil pembangunan tersebut kurang berhasil guna dan berdaya guna, padahal telah memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu dirasa penting dan mendesak upaya menggugah dan membangkitkan masyarakat untuk merasa ikut memiliki, melestarikan, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan terlebih lagi ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini partisipasi yang akan dibahas adalah partisipasi dalam bidang pembangunan, lebih tepatnya adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan melalui hadirnya P2KP sebagai proyek yang memberdayakan masyarakat. Jadi dalam penelitian ini partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan dari masyarakat (khususnya sasaran proyek) dalam satu tahapan atau lebih dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan maka perlu dipahami mengenai konsep partisipasi masyarakat

melalui perspektif pemberdayaan, dimana dalam penelitian ini yang dimaksud "partisipasi masyarakat melalui perspektif pemberdayaan" (menurut Drajat Tri Kartono dalam Arbi Sanit, dkk., 2001: 55) merupakan suatu paradigma di mana individu bukanlah sebagai obyek dalam pembangunan, melainkan mampu berperan sebagai pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa masyarakat harus peduli terhadap lingkungan hidup manusia yang berimbang, sumber daya yang dominan yang merupakan sumber daya informasi, dan prakarsa yang kreatif yang tak kunjung habis dalam meningkatkan pertumbuhan umat manusia yang dirumuskan dalam rangka terealisasinya potensi umat manusia.

#### **F. KERANGKA PIKIR**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi saja, melainkan juga menyangkut aspek sosial, budaya, politik dan aspek lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 21 tahun 1998, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) meluncurkan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dirancang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dengan menggunakan pendekatan Tridaya.

Dalam P2KP ini menganut pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu syarat untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pendekatan pemberdayaan memungkinkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan sifat-sifat kemandirian mereka. Pemberdayaan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan untuk membangun masyarakat miskin yang mandiri agar dapat mengatasi kemiskinannya. Dalam P2KP, pengelolaan seluruh kegiatan baik pengembangan usaha ekonomi melalui pinjaman dana bergulir, bantuan sosial, pelatihan teknis dan manajerial, maupun pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemeliharaan semuanya dilakukan oleh masyarakat dengan bertumpu pada kelompok. Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta memperkuat kelembagaannya.

Pendekatan semacam ini menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Pelaksanaan proyek tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat di sini diartikan sebagai masukan-masukan input yang berasal dari masyarakat yang menjadi sasaran proyek untuk mendukung pelaksanaan P2KP. Dukungan masyarakat ini dapat diwujudkan sebagai keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KP. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan, di lain pihak juga dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil kalau dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi.

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat melalui P2KP di Desa Doplang, meliputi pengembangan institusi lokal dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Adapun pengembangan institusi lokal di sini meliputi pembentukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Sedangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan yaitu pendampingan fasilitator kelurahan (faskel) dalam penyusunan rencana kegiatan BKM dan permasalahan yang dihadapi, penyadaran dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap BKM dan KSM beserta permasalahan yang dihadapi, sosialisasi pengorganisasian masyarakat untuk pembentukan KSM dan permasalahan yang dihadapi, serta kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penciptaan peluang usaha baru dan peluang pengembangan usaha yang telah ada.

Dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam P2KP ini, maka menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proyek mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan. Dalam pembentukan institusi lokal (BKM dan KSM) juga dibentuk atas inisiatif masyarakat sendiri, sehingga dengan begitu akan timbul sikap kemandirian dan kesatuan rasa kebersamaan kelompok. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya bantuan P2KP.

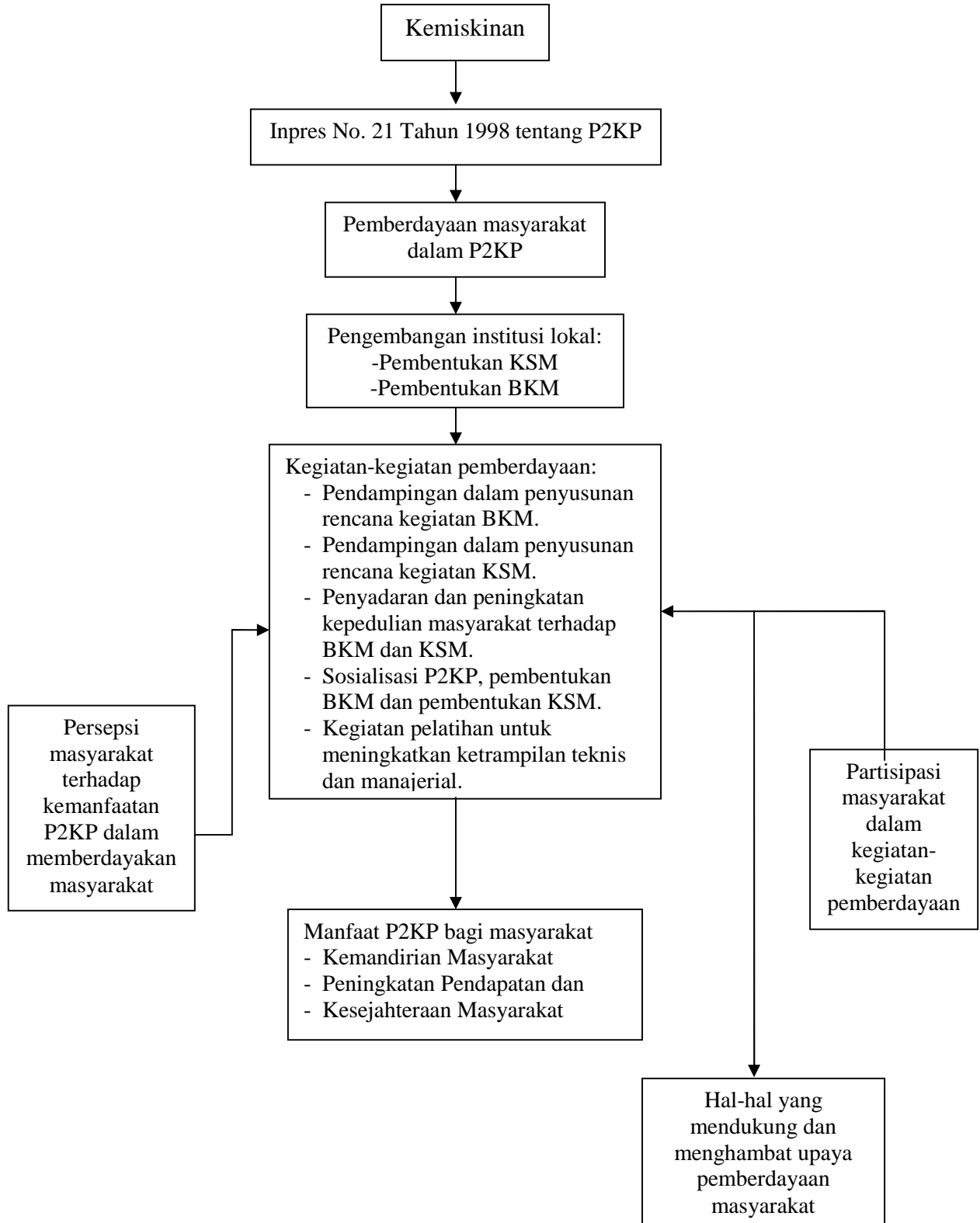
Masyarakat mempunyai persepsi dan harapan tertentu ketika ada suatu program / proyek masuk di daerahnya. Dengan hadirnya P2KP sebagai proyek yang memberdayakan masyarakat, maka masyarakat mempunyai harapan akan terwujudnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat sehingga mereka mampu



meningkatkan kesejahteraannya. Lebih jauh lagi dengan hadirnya P2KP melalui pendekatan pemberdayaannya diharapkan tercipta suatu perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kemudian harapan-harapan tersebut akan sesuai atau tidak dengan realitasnya setelah masyarakat menerima dan melaksanakan proyek melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaannya. Realitas itulah yang memunculkan persepsi bagi masyarakat sebagai sasaran proyek terhadap kemanfaatan P2KP dalam memberdayakan masyarakat. Persepsi dan harapan tersebut akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Proyek P2KP di Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Untuk memperjelas alur pikir, maka penulis tuangkan dalam skema di bawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir**



## **G. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana dalam penelitian tersebut studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (H.B. Sutopo, 2002: 111). Jenis penelitian ini akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh nuansa, data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dalam kalimat atau gambar yang mempunyai arti lebih dari sekedar pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka (H.B. Sutopo, 2002: 35). Berbagai tabel juga disajikan, tetapi hanya bersifat deskriptif untuk mendukung uraian kualitatif yang disajikan. Sebagian data bersifat kualitatif yang didasarkan pada pengamatan langsung ke objek penelitian dan wawancara mendalam dengan sejumlah responden.

Penelitian ini berusaha memperoleh data tentang persepsi masyarakat dan partisipasi masyarakat Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam program P2KP beserta dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, dengan unit analisisnya adalah proyek P2KP. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan ruang lingkup

pembahasan dan sekaligus mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi kebijakan yang diamati. Dipilihnya desa Doplang sebagai obyek penelitian didasarkan pada pertimbangan:

- a. Desa Doplang termasuk sasaran P2KP, hal ini disebabkan karena di desa tersebut terdapat jumlah keluarga miskin yang cukup besar yaitu 456 KK yang tersebar di 19 RT serta masyarakat desanya dianggap mempunyai komitmen yang tinggi untuk berswadaya dalam pembangunan desa.
- b. Di lokasi tersebut memungkinkan untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.
- c. Lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, karena jaraknya yang tidak jauh dari tempat tinggal peneliti.

### **3. Sumber Data**

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut akan digali dari beragam sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Yaitu data pokok yang diperoleh langsung dari informan dan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara yang didukung dengan observasi. Dalam penelitian ini dipilih pihak-pihak yang terkait dengan P2KP. Pihak-pihak tersebut adalah:

- 1) Aparat Desa Doplang

- 2) Fasilitator P2KP Desa Doplang
- 3) Pengurus BKM Desa Doplang
- 4) Manager UPK BKM Desa Doplang
- 5) Pengurus dan anggota KSM Desa Doplang
- 6) Masyarakat penerima bantuan P2KP yang menjadi sampel penelitian.

Selain informan, data primer dalam penelitian ini juga berupa peristiwa atau aktifitas dari BKM dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan P2KP. Selain itu data primer dalam penelitian ini juga berupa lokasi atau tempat. Lokasi yang dimaksud disini adalah lingkungan rumah tangga masyarakat sasaran proyek dan kondisi tempat paska penerapan program kegiatan P2KP seperti bangunan sarana dan prasarana fisik, dan industri rumah tangga yang terbentuk atau berkembang setelah ada perguliran dana P2KP.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber lain selain sumber primer. Data tersebut dimanfaatkan oleh peneliti dari pihak terkait dalam bentuk data olahan yang dapat digunakan untuk mendukung data primer dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Arsip dan dokumen kebijakan resmi yang berkaitan dengan P2KP.
- 2) Dokumen yang digunakan untuk mendapatkan berbagai data yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam P2KP.

- 3) Laporan pelaksanaan P2KP yang diperoleh dari BKM Adil Makmur beserta Unit-unit Pengelolaanya baik UPK, UPL, maupun UPS, serta laporan akhir dari Fasilitator Kelurahan (faskel) Desa Doplang.
- 4) Data Monografi Desa Doplang.
- 5) Catatan statistik, foto-foto kegiatan, buku-buku, dan data lain yang mendukung P2KP secara umum maupun khusus di Desa Doplang.
- 6) Hasil penelitan terdahulu yang digunakan sebagai referensi atau wacana tentang permasalahan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

#### **4. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Atas dasar pertimbangan praktis soal waktu, tenaga, dan biaya, sehingga peneliti hanya mengambil unit sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam teknik ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang mantap. Bahkan di dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data (Patton dalam H.B. Sutopo, 2002: 56).

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interviewing*)

Merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui tanya-jawab secara langsung dengan nara sumber atau informan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan.

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan bisa dilakukan pada informan yang sama (Patton dalam H.B. Sutopo, 2002: 184). Pertanyaan yang diajukan bersifat "open ended" dan semakin terfokus sehingga informasi yang bisa dikumpulkan semakin rinci dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subyek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden. Kelonggaran dan kelenturan dalam teknik ini akan mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan perasaan, sikap, dan pandangan mereka terhadap P2KP.

b. Observasi langsung

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan dan mencatat segala informasi serta hal-hal yang relevan dengan masalah penelitian, sehingga diperoleh keterangan mengenai gejala nyata dari obyek yang diteliti. Observasi ini sering disebut sebagai "observasi berperan pasif" (Spradley dalam H.B. Sutopo, 2002:185). Dalam observasi ini peneliti hanya mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif, namun hadir dalam konteksnya. Observasi langsung ini akan dilakukan dengan cara formal dan informal, untuk mengamati berbagai kegiatan dan

peristiwa yang terjadi pada kegiatan proyek P2KP di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, khususnya di lokasi kegiatan P2KP berlangsung.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen dan arsip ini terdiri dari tulisan atau artikel, foto-foto, data statistik, dan bahan-bahan pustaka yang membahas permasalahan yang sama dengan penelitian. Data-data yang diperoleh dari pengumpulan dokumentasi kemudian dapat dijadikan referensi yang menunjang proses penelitian.

## **6. Validitas Data**

Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka peningkatan validitas data akan dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu teknik pengujian yang mengarahkan peneliti agar memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber data yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya



bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda (H.B. Sutopo, 2002: 79). Misalnya saja, untuk mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap P2KP, peneliti menanyakan pada informan yang berbeda dan pada sumber data yang berbeda pula. Asas dasar dalam triangulasi sumber adalah pemeriksaan silang temuan-temuan dari satu wawancara dengan wawancara yang lain atau pemeriksaan kebenaran hasil wawancara dibandingkan dengan dokumen atau sebaliknya.

## **7. Teknik Analisis Data**

Data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen yang telah disusun teratur perlu dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Dalam analisis data terdapat tiga komponen utama (Miles dan Hiberman dalam H.B. Sutopo, 2002: 91), yaitu:

### **a. Reduksi data (*data reduction*)**

Merupakan proses seleksi dari catatan lapangan (*fieldnote*), baik yang berupa catatan wawancara, dokumen-dokumen, maupun catatan refleksi peneliti. Kegiatan ini berupa pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (*fieldnote*). Dalam proses ini data dikategorikan dan data yang tidak perlu dibuang. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data.

Reduksi data diawali dengan pembatasan terhadap permasalahan penelitian dan membatasi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti membatasi persepsi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan proyek P2KP dilihat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dalam P2KP dan manfaat P2KP bagi masyarakat.

b. Sajian data (*data display*)

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Selain dalam bentuk narasi sajian data juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema maupun tabel sebagai pendukung narasi. Sekumpulan informasi yang tersusun tersebut memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, dapat diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan.

c. Penarikan simpulan dan verifikasi (*conclusion drawing*)

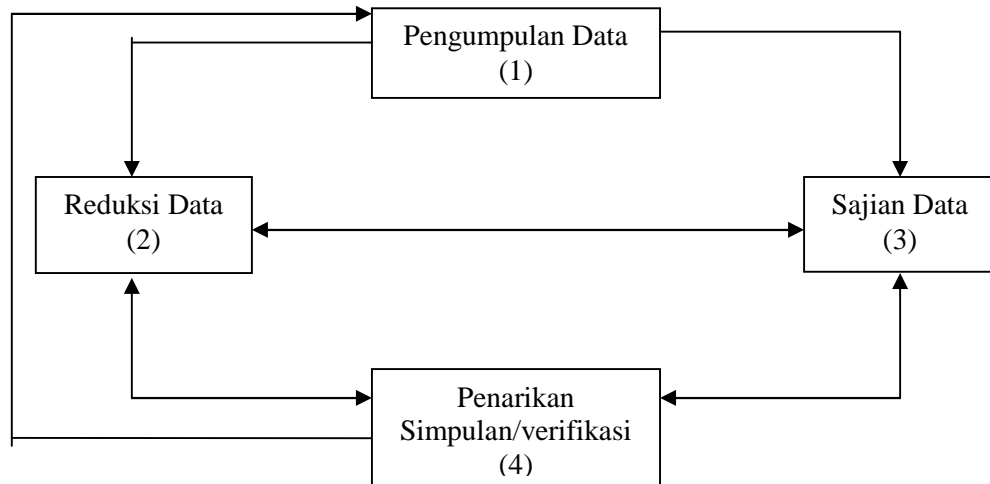
Merupakan tahap pengambilan kesimpulan dari rangkaian data yang diperoleh di lapangan yang telah disusun dan disajikan dalam sajian data. Penarikan kesimpulan ini diawali dari kesimpulan-kesimpulan yang awalnya belum jelas, kemudian makin eksplisit berdasarkan landasan yang kuat. Data-data yang telah diperoleh diuji kembali validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih jelas dan bias dipercaya. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir, karena

itu penelitian bersifat terbuka terhadap data yang dikumpulkan. Dan apabila dalam menyimpulkan terjadi kekurangan data maka peneliti kembali ke lapangan untuk mencari data.

Dalam proses analisa, aktifitas ketiga komponen tersebut berbentuk interaksi sebagai proses siklus. Peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen analisis dengan komponen pengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data selesai pada setiap unitnya, dengan menggunakan waktu yang tersisa dalam penelitian ini maka peneliti hanya bergerak diantara ketiga komponen analisis tersebut, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Proses analisis inilah yang disebut dengan model analisis interaktif (*interactive model analysis*). Untuk lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.2 Model Analisis Interaktif**

Sumber: H.B. Sutopo, 2002 : 96



**Penjelasan gambar 1.2 :**

Dalam pengumpulan data model analisis interaktif Milles dan Huberman ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan / verifikasi. Aktifitasnya dalam gambar ditunjukkan dengan arah anak panah yang merupakan proses pengumpulan data sebagai proses siklus.

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data berlangsung mulai dari pengumpulan data bergerak ke reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi dengan menggunakan waktu yang ada. Dalam pengumpulan data aktifitas peneliti tetap terfokus di antara ketiga komponen analisis tersebut. Setelah pengumpulan data selesai, aktifitas peneliti diorientasikan pada ketiga komponen analisis tersebut. Dari pengumpulan data ke reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah penelitian yaitu persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan proyek P2KP dan kemanfaatan P2KP bagi masyarakat.

## BAB II

### DESKRIPSI LOKASI

#### A. Keadaan Wilayah

Desa Doplang merupakan salah satu desa dari 13 (tiga belas) desa di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang menerima bantuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Desa ini mempunyai luas wilayah 199,5775 Ha yang terbagi menjadi 19 RT dan 3 RW. Secara topografi, Desa Doplang merupakan dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 200 m dpl. Banyaknya curah hujan 350 mm/th serta suhu udara rata-rata 23° C. Secara geografis mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kadireso-Kecamatan Teras
- Sebelah Selatan : Desa Wunut (wilayah Kabupaten Klaten)
- Sebelah Barat : Desa Kopen-Kecamatan Teras
- Sebelah Timur : Desa Tegalrejo-Kecamatan Sawit.

Mengenai Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan Desa / Kelurahan) Desa Doplang, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Jarak Orbitasi Desa Doplang**

No.	Jarak Orbitasi	Km
1.	Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan	9
2.	Jarak dari ibukota Kabupaten / Kota	13
3.	Jarak dari ibukota Propinsi	102
4.	Jarak dari ibukota Negara	520

*Sumber: Monografi Desa Doplang.*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jarak pemerintahan Desa Doplang ke pusat Kecamatan Teras dan pusat pemerintahan Kabupaten Boyolali relatif dekat, sehingga memudahkan adanya koordinasi antar unit lembaga pemerintahan dalam urusan pemerintahan maupun pembangunan.

Dengan luas wilayah sekitar 199,5775 Ha, penggunaan tanah di Desa Doplang sebagian besar berupa lahan persawahan dan ladang, yaitu sekitar 157,0720 Ha atau sekitar 78,70 % dari luas wilayah keseluruhan. Sedangkan untuk panjang jalan Desa Doplang keseluruhan sekitar 10,34 Km. Untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Luas Tanah Menurut Penggunaan di Desa Doplang**

No.	Penggunaan	Luas (Ha)	%
1.	Bangunan Umum	1,0940	0,54
2.	Pemukiman / Perumahan	34,6625	17,37
3.	Sawah dan Ladang	157,0720	78,70
4.	Pekuburan	4,3215	2,16
5.	Sarana Pendidikan	1,0250	0,51
6.	Sarana Olah Raga	0,2000	0,1
7.	Puskesmas / Polindes	0,0025	0,00125
8.	Masjid / Musholla	0,7500	0,37
9.	Lain-lain	0,4500	0,22
	Jumlah	199,5775	100

*Sumber: Monografi Desa Doplang.*

Desa Doplang mempunyai Pendapatan Asli Daerah / Desa (PAD) dengan jumlah yang sangat minim. PAD Desa Doplang hanya bersumber pada lelangan (penyewaan) tanah kas desa yang dilaksanakan 2 tahun sekali dengan total nilai lelang berkisar antara Rp. 14.000.000,- sampai dengan Rp. 16.000.000,- sehingga pendapatan / pemasukan Kas Desa rata-rata sebesar Rp. 7.500.000,-/tahun. Dana tersebut harus bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan belanja desa selama 1

tahun. Dengan jumlah PAD yang minim tersebut, tentu sangat sulit untuk bisa menjawab maupun merealisasikan kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat Desa Doplang yang diusulkan dalam Musbangdes/Musrenbangdes setiap tahunnya. Sangat ironis sekali ketika setiap tahun masyarakat diajak berkumpul untuk melakukan suatu musyawarah dan membuat usulan kegiatan pembangunan baik lingkungan, ekonomi maupun sosial di wilayahnya masing-masing, namun karena keterbatasan dana desa, maka yang terjadi adalah penumpukan usulan kegiatan pembangunan yang belum bisa dan sangat sulit untuk bisa direalisasikan.

Melihat kondisi geografis Desa Doplang, memang masih banyak areal pertanian/sawah. Tapi setelah matinya sumber mata air (umbul) dari Desa Nepen, mengakibatkan banyak sawah menjadi kekeringan. Hal ini menyebabkan banyak warga yang beralih profesi. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan menjamurnya industri-industri rumah tangga (kecil) di Desa Doplang beberapa tahun belakangan ini. Mulai dari industri pembuatan bata merah yang tersebar di wilayah (RT 03 RW I dan RT 02,03,04,05,06 RW II); industri pembuatan genteng di wilayah (RT 01,02,03 RW III); industri pengasapan/omprong tembakau di wilayah (RT 03,04 RW I; RT 03/ RW II dan RT01,02,03,04,05,06,08 RW III) sampai dengan industri pembuatan rambak di wilayah (RT 01,02,03,04 RW I; RT 01,02,05 RW II; RT 01,02,04 RW III). Selain industri produksi, sebagian masyarakat juga mengembangkan usaha peternakan seperti ternak bebek, puyuh, dan lele.

Dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan modal usaha juga menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan usaha produktif warga



miskin di Desa Doplang. Sehingga, kehadiran P2KP di Desa Doplang diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat terkait dengan kebutuhan Tridaya, yaitu perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan, kegiatan-kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan usaha maupun peningkatan keterampilan yang berorientasi pada kegiatan ekonomi produktif, serta fasilitas pelayanan modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak bergulir.

## **B. Keadaan Penduduk**

### **1. Komposisi Penduduk**

Jumlah penduduk di Desa Doplang adalah sebanyak 3642 jiwa yang terdiri atas jumlah laki-laki 1773 jiwa dan jumlah perempuan 1869 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1062 KK. Dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Doplang tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Penduduk Menurut Usia**

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0-6	259	7,11
2.	7-12	451	12,38
3.	13-18	682	18,72
4.	19-24	915	25,12
5.	25-55	1091	29,96
6.	56-79	105	2,88
7.	80 tahun ke atas	139	3,82
Jumlah		3642	100

*Sumber: Data Monografi Desa Doplang.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa golongan usia penduduk yang paling besar jumlahnya berada pada golongan umur 25-55 tahun yaitu sebesar 29,96 %, kemudian menyusul golongan umur 19-24 tahun yaitu sebesar 25,12 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya penduduk di Desa Doplang pada umumnya

masih produktif untuk tetap bekerja dan berkarya untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.

## 2. Pekerjaan Penduduk

Penduduk Desa Doplang mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam, dimana sebagian besar berprofesi sebagai peternak. Mengenai mata pencaharian penduduk Desa Doplang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Table 2.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	%
1.	Petani Pemilik Tanah (Petani Sendiri)	431	26,47
2.	Buruh Tani	213	13,08
3.	Pengusaha Sedang / Besar	148	9,09
4.	Pengrajin / Industri Kecil	54	3,32
5.	Buruh Industri	42	2,58
6.	PNS	63	3,87
7.	TNI	5	0,30
8.	Polri	9	0,55
9.	Pensiunan (PNS/TNI/Polri)	7	0,43
10.	Peternak:		
	a. Sapi Perah	2	= 40,29
	b. Sapi Biasa	25	
	c. Kerbau	33	
	d. Kambing	76	
	e. Ayam	460	
	f. Itik	60	
	Jumlah	656	
	Jumlah	1628	100

Sumber: Data Monografi Desa Doplang.

Bahwa biaya produksi pertanian yang mahal ditambah dengan harga jual yang lemah, membuat banyak penduduk yang berpindah profesi sebagai peternak, yang mencapai angka 40,29 %. Sementara total prosentase penduduk yang bercocok tanam hanyalah 39,55 % (terdiri dari petani pemilik tanah 26,47 % dan buruh tani 13,08 %). Hal ini sangat ironis kalau melihat luas lahan pertanian penduduk yang mencapai 157,0720 Ha.

### 3. Pendidikan Penduduk

Penduduk Desa Doplang yang mengenyam pendidikan dari seluruh jumlah penduduknya berjumlah 3642 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1.	Belum Sekolah	262	7,19
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	247	6,78
3.	Tamat SD / Sederajat	1289	35,39
4.	Tamat SLTP / Sederajat	1071	29,40
5.	Tamat SLTA / sederajat	688	18,89
6.	Tamat Akademi (D1-D3)	38	1,04
7.	Tamat Perguruan Tinggi (S1-S3)	47	1,30
Jumlah		3642	100

*Sumber: Data Monografi Desa Doplang.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Doplang merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 1289 orang (35,39 %), kemudian menyusul lulusan SLTP sebesar 1071 orang (29,40 %). Dengan demikian dapat dilihat bahwa angka yang tamat pendidikan dasar (SD, SLTP) sangat tinggi yaitu 64,79 %. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Doplang masih tergolong rendah, sehingga program-program pelatihan informal dalam rangka meningkatkan kemampuan penduduk sangat dibutuhkan di sini.

### 4. Gambaran Jumlah Penduduk Desa Doplang Menurut KK Miskin

Rumusan permasalahan kemiskinan di Desa Doplang dilakukan melalui beberapa kali rembug warga yang menghasilkan kesepakatan mengenai ciri-ciri dan penyebab kemiskinan sebagai berikut:

- a. Tidak punya pekerjaan tetap
- b. Tanggungan keluarga banyak / besar
- c. Janda tua, orang jompo, orang cacat yang tidak punya saudara / anak

- d. Karena ter-PHK
- e. Tidak punya keahlian / keterampilan
- f. Pola hidup boros
- g. Terbebani hutang
- h. Tidak punya akses peminjaman modal
- i. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok
- j. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap warga miskin
- k. Kurangnya kepedulian warga yang mampu untuk membantu warga miskin
- l. Kurangnya lapangan pekerjaan
- m. Tidak punya alat produksi
- n. Terkena musibah, bencana alam, kebakaran, banjir, bangkrut, dan lain-lain yang disebabkan oleh faktor eksternal
- o. Kondisi rumah / tempat tinggal kurang terawat dan tidak memenuhi standar dasar kesehatan
- p. Penghasilan sedikit / tidak tetap (pendapatan perkapita per bulan kurang dari Rp. 400.000.000,-).
- q. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. (*Sumber : PJM Pronangis Desa Dopleng Tahun 2006-2008, Sekretariat BKM Adil Makmur Desa Dopleng*).

Persebaran penduduk miskin di Desa Dopleng dipisahkan berdasarkan RT/

RW dan KK miskin. Adapun persebarannya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Desa Dopleng Menurut KK Miskin**

No	RT / RW	Dukuh	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Prosentase (%)
1.	01 / I	Bentangan Cilik	62	35	7,65
2.	02 / I	Bendosari	63	33	7,22
3.	03 / I	Karangwuni	77	39	8,75
4.	04 / I	Karangmojo	41	30	6,5
5.	01 / II	Bentangan Tegal	69	31	6,78
6.	02 / II	Bentangan Gede	54	26	5,68
7.	03 / II	Dopleng	48	22	4,81
8.	04 / II	Dopleng	52	26	5,68
9.	05 / II	Dopleng	55	26	5,68
10.	06 / II	Kerten	39	21	4,59
11.	01 / III	Kwarasan	65	23	5,03
12.	02 / III	Daleman	50	18	3,93
13.	03 / III	Daleman	53	19	4,15
14.	04 / III	Tawengan	49	25	5,47
15.	05 / III	Tawengan	68	11	2,40

16.	06 / III	Kuncen	57	16	3,50
17.	07 / III	Mulyorejo	45	18	3,93
18.	08 / III	Mulyorejo	56	19	4,16
19.	09 / III	Mulyorejo	59	18	3,93
<b>JUMLAH</b>			<b>1062</b>	<b>456</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Pemetaan Swadaya Tiap RT, Sekretariat BKM Adil Makmur Desa Doplang.

### C. Kondisi Sarana dan Prasarana

#### 1. Sarana Pemerintahan Desa

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, di Desa Doplang didirikan Kantor Kepala Desa dan Balai Desa yang berukuran 90 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> yang mempunyai banyak fungsi. Di samping sebagai tempat menjalankan tugas pemerintahan desa sehari-hari, juga digunakan sebagai tempat penyuluhan-penyuluhan, bimbingan-bimbingan kepemudaan, rapat atau musyawarah desa yang salah satunya mengenai sosialisasi program P2KP. Di tempat ini juga terdapat kantor sekretariat BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Desa Doplang yang bernama BKM Adil Makmur.

#### 2. Sarana Perekonomian

Letak Desa Doplang yang dekat dengan 2 (dua) pasar desa yaitu Wunut dan Cokro membuat penduduk Desa Doplang dapat dengan mudah mengakses kebutuhan sehari-hari mereka maupun untuk memasarkan hasil pertanian dan juga untuk memasarkan hasil produksi industri kecil mereka. Di Desa Doplang banyak terdapat aneka ragam *home industri* namun masih berskala kecil seperti industri makanan, pengrajin genteng dan bata merah, pengasapan tembakau (omprong), kerajinan bambu, dan sebagainya. Namun aneka ragam industri kecil tersebut seringkali mengalami kesulitan modal dalam produksinya, serta kualitas produk yang dihasilkan masih kurang.

### 3. Sarana Perhubungan

Untuk menghubungkan wilayah-wilayah dalam lingkup Desa Doplang maupun wilayah desa lain serta untuk memperlancar transportasi dan jalannya roda perekonomian, telah dibuat sarana jalan sepanjang 10,34 km yang terbagi menjadi jalan dusun / lingkungan sepanjang 5,34 km dan jalan desa sepanjang 5 km. Sebagian besar jalan tersebut telah diaspal ataupun dibetonisasi oleh warga masyarakat sekitar. Adapun jembatan yang ada di Desa Doplang sebanyak 3 buah. 2 buah diantaranya dalam kondisi sedang (tidak rusak), masing-masing sepanjang 5 m. Sedangkan 1 buah yang lain sepanjang 6 m dan dalam kondisi rusak.

### 4. Sarana Komunikasi dan Informasi

Kemampuan masyarakat dalam menangkap arus informasi dari luar sangat ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana komunikasi yang cukup memadai. Untuk mempermudah komunikasi diperlukan sarana komunikasi yang menunjang bagi kelangsungan hubungan dalam kaitannya untuk dapat membina hubungan antara warga dusun satu dengan dusun yang lain. Sarana komunikasi Desa Doplang dirasa cukup mengarah pada perkembangan teknologi yang sudah maju yang meliputi antara lain Orari, pesawat televisi, radio, pesawat telepon, dan sebagainya. Hal tersebut lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.7**  
**Sarana Komunikasi Desa Doplang**

No.	Jenis Sarana	Jumlah (Buah)
1.	Pemilikan Pesawat TV	889
2.	Pesawat Radio	814
3.	Orari	2
4.	Pemilikan Antena Parabola	3
5.	Telepon (HP, telepon rumah)	1842
Jumlah		3555

*Sumber: Data Monografi Desa Doplang.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pemilikan televisi dan radio sebagai media informasi yang bisa untuk mengetahui apa yang terjadi di berbagai daerah dan berbagai negara telah banyak dimiliki dan menjadi suatu kebutuhan masyarakat Desa Doplang.

#### 5. Sarana Transportasi

Sarana transportasi penting bagi setiap orang, karena sarana ini bisa memperlancar kegiatan-kegiatan yang berada di luar rumah di mana jaraknya yang jauh, seperti aktivitas yang berhubungan dengan mata pencaharian orang yang bersangkutan. Secara rinci jumlah alat transportasi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Doplang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Alat Transportasi di Desa Doplang**

No.	Alat Transportasi	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Sepeda	251	49,31
2.	Dokar / Delman	-	0
3.	Gerobak	6	1,18
4.	Sepeda Motor	218	42,83
5.	Becak	-	0
6.	Mobil Pribadi	17	3,34
7.	Mini bus	2	0,39
8.	Truk	15	2,95
Jumlah		509	100

*Sumber: Data Monografi Desa Doplang.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa alat transportasi yang digunakan oleh penduduk Desa Doplang untuk menunjang aktivitas sehari-hari sangatlah bervariasi. Sebagian besar penduduk menggunakan sepeda dan sepeda motor untuk memperlancar kegiatan mereka.

#### **D. Permasalahan Kemiskinan Desa Doplang**

Dengan melihat kondisi Desa Doplang dari berbagai segi, maka permasalahan yang dapat ditemui di Desa Doplang antara lain:

##### 1. Lingkungan:

- a. Kondisi sebagian masyarakat Doplang yang tidak memiliki sarana dan prasarana dasar utamanya perumahan dan pemukiman yang layak, kualitas lingkungan yang relatif buruk dan tidak layak untuk dihuni
- b. Jalan desa dan lingkungan di beberapa RT kondisinya banyak yang sudah rusak, berlubang, belum diaspal / beton sehingga di musim penghujan air masih menggenangi hampir seluruh ruas jalan dan menyebabkan jalan menjadi licin. Hal ini membuat sarana transportasi warga menjadi tidak lancar dan mengganggu aktivitas ekonomi warga
- c. Banyak jalan desa dan lingkungan yang belum dibuat talud sehingga menyebabkan longsohnya bahu jalan (tanah di tepi jalan) karena terkikis oleh aliran air selokan / parit berpotensi mengakibatkan kerusakan pada jalan desa
- d. Belum dibangunnya saluran drainase menyebabkan limbah rumah tangga tidak bisa terbuang dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran udara dan pemandangan
- e. Tidak teraturnya warga dalam membuang sampah sehingga menimbulkan kesan kumuh di lingkungan permukiman dan menyebabkan bau tak sedap serta sarang penyakit



- f. Belum terpenuhinya standar dasar kesehatan warga yang disebabkan masih adanya rumah dari keluarga miskin yang tidak dilengkapi dengan jamban keluarga
- g. Jalan Poros Desa yang berlokasi di sebelah timur balai desa sampai dengan perbatasan Desa Tegalrejo sepanjang  $\pm 700$  m, berada dalam kondisi rusak total dan mengakibatkan kurang lancarnya transportasi dan ekonomi warga.

## 2. Sosial:

- a. Jumlah pengangguran pada usia produktif relatif besar
- b. Adanya kebutuhan untuk melakukan sebuah kegiatan bagi warga jompo yang karena keterbatasan fisik dan faktor usia, tapi masih mau bekerja untuk menambah pendapatannya
- c. Di beberapa RT terdapat anak yatim/piatu yang perlu disantuni
- d. Keterbatasan daya beli warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar pangannya
- e. Belum adanya pelayanan kesehatan bagi warga jompo/lansia untuk melakukan cek kesehatan dan pemberian vitamin secara rutin.

## 3. Ekonomi:

- a. Minimnya modal serta kurang tersedianya akses peminjaman bagi warga miskin ke beberapa lembaga keuangan menyebabkan warga miskin tidak mampu menciptakan peluang usaha maupun mengembangkan diri dalam kegiatan ekonomi produktif.

#### 4. Kesehatan:

- a. Banyaknya ibu-ibu yang mempunyai anak balita dan tidak memiliki pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang sering menyerang pada balita dan cara penanganannya
- b. Kurang lengkapnya imunisasi yang dilakukan pada balita berpotensi menyebabkan stamina fisik yang lemah dan mudah terserang penyakit
- c. Ketidakmampuan warga miskin dalam memenuhi kebutuhan gizi balita
- d. Pentingnya pengelolaan kesehatan mandiri yang bisa dilakukan oleh warga dalam satu wilayah RT terkait dengan penyakit-penyakit ringan yang menyerang warga setempat.

#### 5. Pendidikan:

- a. Prosentase penduduk Desa Doplang yang tidak tamat sekolah atau pendidikan dasar cukup tinggi, yaitu tamat SD sebesar 35,39 % dan tamat SMP 29,40 % sehingga totalnya mencapai angka 64,79 %. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa Doplang
- b. Masih kurangnya buku materi pelajaran dan alat teknis belajar mengajar lainnya yang dialami oleh TPA, TK / TK Madrasah di Desa Doplang.

#### **E. Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan**

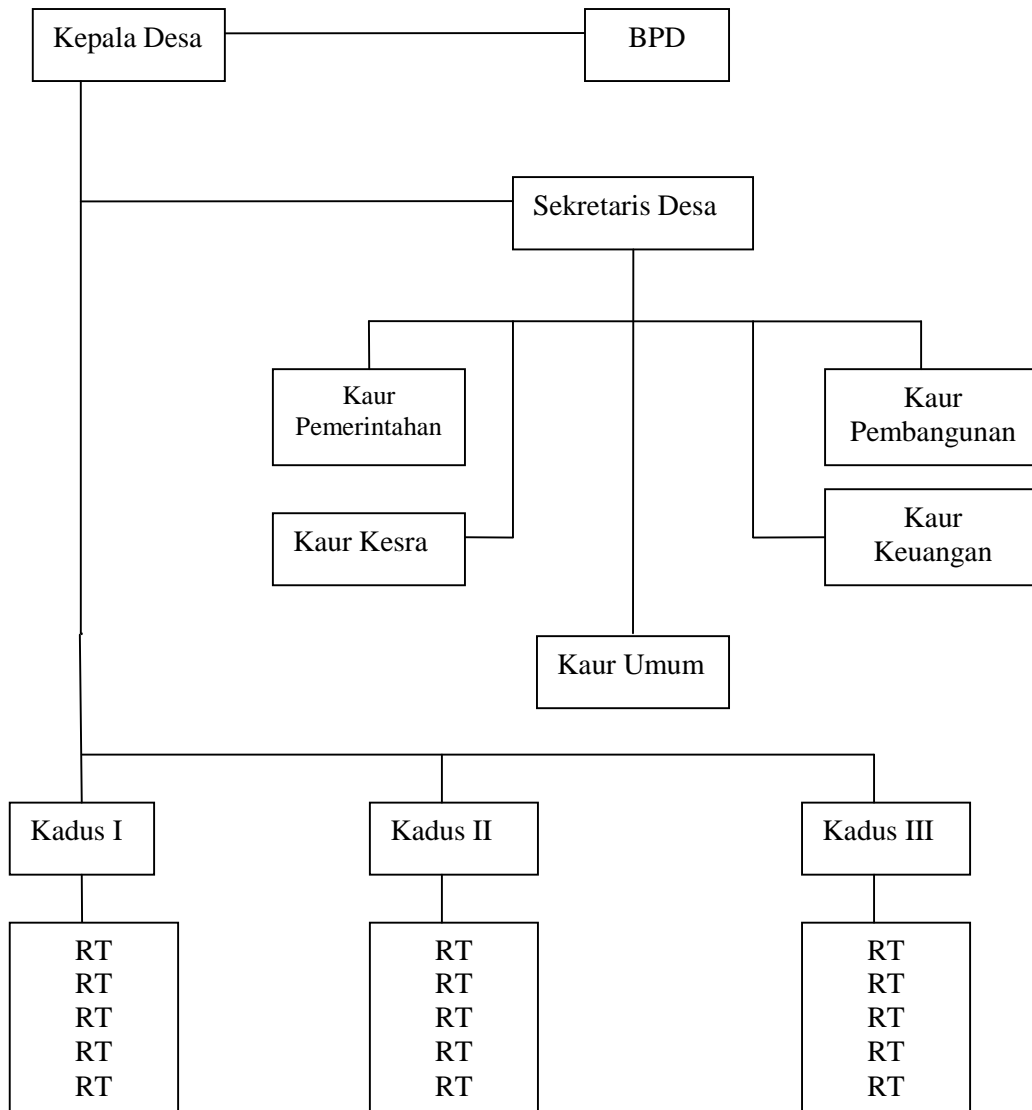
1. Memberikan bantuan stimulant untuk membangun prasarana dasar lingkungan, perumahan dan permukiman
2. Mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan usaha dalam rangka pemberdayaan warga miskin

3. Memberikan bantuan gizi balita, jompo/lansia dan pelayanan kesehatan
4. Membuka akses bagi warga miskin untuk mengajukan pinjaman usaha
5. Pengadaan peralatan periksa kesehatan serta bantuan obat-obatan untuk penyakit ringan di 8 posyandu.
6. Menyelenggarakan bantuan buku-buku materi pendidikan bagi anak sekolah dasar
7. Menggalang kermitraan dengan lembaga / dinas terkait serta kelompok peduli, seperti Polindes, Puskesmas, DKS, LSM-Perempuan.

#### **F. Organisasi Pemerintahan Desa Dopleng**

Dalam pemerintahan Desa Dopleng dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu Sekretaris Desa (Carik). Di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Desa juga dibantu oleh 5 orang Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum. Selain itu Kepala Desa juga dibantu oleh 3 orang Kepala Dusun. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi pemerintahan Desa Dopleng dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Doplang**



**Keterangan :**

Kepala Desa	: B. Wahyono
Sekretaris Desa	: -
Kaur Pemerintahan	: Dwi Titi Astugi
Kaur Pembangunan	: Mugiyono
Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra)	: Supardi
Kaur Keuangan	: Sujino
Kaur Umum	: Darwati

Kadus I : Slamet Citro M.  
Kadus II : Agus Wahyana  
Kadus III : Muh. Khurdi

*Sumber: Kaur Pemerintahan Desa Doplang.*

### **G. Deskripsi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

Untuk menanggulangi kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, pemerintah memandang perlu memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan maupun pedesaan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program yang telah dilaksanakan ini mengandung pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan. Bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan masyarakat dan juga untuk pendampingan teknis yang diperlukan dalam kegiatan itu. Di Desa Doplang, proyek ini mulai dilaksanakan pada tahun 2005.

P2KP memiliki visi “Terwujudnya masyarakat madani, yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif dan lestari”. Sedangkan misi P2KP adalah membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun dengan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.

Adapun P2KP mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi

pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya;

- Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM);
- Mengedepankan peran Pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat. *(Sumber: Pedoman Umum P2KP, Edisi September 2004).*

P2KP dalam pelaksanaan programnya berkaitan dengan pemberian dana hibah untuk pembangunan sarana prasarana fisik, kegiatan sosial, pelatihan dalam rangka meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial, dan pinjaman dana bergulir untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif. Cakupan sasaran P2KP yang ada di Desa Doplang semakin meluas, tidak hanya Keluarga Pra Sejahtera saja tetapi mulai mengarah pada kelompok usaha yang ada di Desa Doplang sebagai konsekuensi dari pengembalian pinjaman dan perguliran dana yang baik.

Adapun kelompok sasaran yang ikut menjadi peserta P2KP adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang punya usaha ekonomi produktif dan tergolong penduduk miskin (Pra Sejahtera dan Sejahtera 1) yang jumlahnya masih tergolong banyak. Berdasarkan Pemetaan Swadaya (PS) yang dilakukan oleh masyarakat desa dan didampingi oleh Tim PS P2KP, ditemukan bahwa di Desa Doplang terdapat KK miskin sebanyak 456 KK yang menjadi sasaran P2KP.

Desa Doplang mendapat alokasi bantuan dana P2KP sebesar Rp. 250.000.000,-. Alokasi pemanfaatan BLM P2KP tersebut melalui 3 tahap pencairan, yaitu *tahap pertama* dana cair sebesar 20% (Rp. 50.000.000,-), sedang *tahap kedua* dana cair sebesar 50% (Rp. 125.000.000,-), dan *tahap ketiga* dana cair sebesar 30% (Rp. 75.000.000,-). Untuk alokasi bantuan pinjaman dana bergulir sendiri berjumlah keseluruhan Rp. 97.475.000,- yang dicairkan pada tahap dua senilai Rp. 61.100.000,- dan pada tahap tiga senilai Rp. 36.375.000,-. Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada KSM-KSM yang telah terbentuk. Dana bergulir yang digunakan untuk modal usaha produktif ini pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat melalui suatu wadah yang dibentuk (BKM) melalui Unit Pengelola Keuangannya (UPK) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang sebelumnya telah membentuk Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dari dana bantuan tersebut, alokasi terbesar digunakan untuk kegiatan bantuan ekonomi yaitu pinjaman dana bergulir untuk modal usaha produktif, dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan. Alasan utamanya adalah, karena dengan pinjaman dana bergulir ini dapat dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama masyarakat dan membantu dalam hal modal bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan dengan kegiatan pembangunan fisik dimaksudkan agar fasilitas sarana dan prasarana dasar lingkungan yang menunjang aktivitas perekonomian warga bisa lancar sehingga dapat memperbaiki perekonomian warga.

### **G.1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)**

P2KP di Desa Dopleng dalam pelaksanaannya mempunyai suatu organisasi yang disebut BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). BKM adalah lembaga masyarakat warga (*Civil Society Organization*), yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*civil society*), yang dibangun dan dikelola berbasis pada nilai-nilai universal (*value based*). Sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi, BKM berbentuk pimpinan kolektif, dimana keputusan dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM, dimana musyawarah mufakat menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Sedangkan sebagai lembaga kepercayaan (*'board of trustee'*), anggota-anggota BKM terdiri dari orang-orang yang dipercaya warga, berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan, termasuk kerjasama dengan pihak luar. (*Sumber: Modul Pelatihan Bagi Sekretariat dan UPK BKM, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2005*).

BKM bertanggung jawab dalam menjamin keterlibatan semua warga dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif dalam pengembangan keswadayaan masyarakat. Dengan demikian, kedudukan dan posisi BKM adalah sebagai lembaga masyarakat yang benar-benar dibangun dari, oleh, untuk serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai representasi upaya-upaya untuk



membangun sinergi segenap potensi masyarakat menuju tatanan masyarakat madani dan mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya sendiri, di samping itu BKM mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan. Selain itu, BKM juga menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dalam upaya menganggulangi masalah kemiskinan dan pembangunan permukiman di wilayahnya.

BKM Desa Doplang berdiri pada bulan September 2005 dengan akta Notaris No. 77 / 30 September 2005, dan kemudian diberi nama BKM “Adil Makmur”. Anggota BKM Adil Makmur berjumlah 13 orang yang merupakan representasi dari warga masyarakat Desa Doplang yang paling dapat dipercaya, ikhlas, jujur, adil, peduli dan tanpa pamrih, sehingga bukan sebagai wakil kewilayahan, golongan atau perwakilan kelompok masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, BKM memiliki wewenang untuk membentuk Unit-unit Pengelola (UP) yang akan berperan sebagai tangan kanan dari BKM. Unit-unit Pengelola di Desa Doplang antara lain UPL, UPK, UPS.

Dalam proses kegiatan P2KP ini BKM mendapat BOP (Biaya Operasional Pelaksanaan). Besaran dana BOP yang diterima oleh BKM sebagai dana pendamping operasional kegiatan ditetapkan sebesar 3 % (Pagu BLM Rp. 250.000.000,-) dari pencairan dana BLM. Untuk pencairan tahap I sebesar Rp.

50.000.000,- x 3% adalah Rp. 1.500.000,-. Untuk pencairan tahap II sebesar Rp. 125.000.000,- x 3% adalah Rp. 3.750.000,- dan untuk pencairan tahap III sebesar Rp. 75.000.000,- x 3% adalah Rp. 2.250.000,-. Sehingga total dana BOP yang diterima BKM dari dana BLM-P2KP adalah Rp. 7.500.000,-. Selain itu, pasca pencairan dana BLM-P2KP, BKM juga menerima dana dari alokasi jasa pinjaman KSM sebesar 50% dari jasa pinjaman (1,5% flat). BOP ini digunakan untuk biaya kesekretariatan, administrasi, inventaris, honor / insentif UP, pendampingan KSM, biaya rapat dan pertemuan, biaya audit, komunikasi dan transportasi.

#### **G.1.1. Visi dan Misi BKM**

BKM Adil Makmur Desa Doplang mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal dan menjawab permasalahan kemiskinan secara bersama-sama dengan menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.

2. Misi :

- a) Meningkatkan kesejahteraan KK miskin melalui kegiatan-kegiatan peningkatan ketrampilan serta menumbuhkan kegiatan berusaha melalui kredit mikro kepada KK miskin yang berpotensi dalam pengembangan usahanya
- b) Memberikan santunan sosial serta meningkatkan kesejahteraan KK miskin melalui perbaikan sarana dan prasarana dasar yang berada di lingkungan sasaran

- c) Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, lansia serta penyuluhan yang berorientasi pada peningkatan kesadaran tentang bahaya penyakit yang umum diderita ibu hamil, balita dan lansia
- d) Adanya tenaga relawan di tiap 8 titik posyandu yang mampu menangani penyakit-penyakit ringan yang menyerang warga. Sehingga tercipta pelayanan kesehatan mandiri yang dikelola oleh, dari dan untuk warga masyarakat setempat
- e) Peningkatan keterampilan usaha yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan sektor usaha produktif masyarakat.

### **G.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi BKM**

Tugas pokok dan fungsi BKM dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok BKM**

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan setempat, termasuk penggunaan dana P2KP.
- b. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis dan rencana program penanggulangan kemiskinan (pronangkis).
- c. Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah kelurahan berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan kelurahan.

- d. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak penggalan ide sampai dengan evaluasi kerja
- e. Mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya
- f. Membangun transparansi kepada masyarakat dan pihak luar melalui berbagai media, rapat-rapat terbuka, papan pengumuman, dsb.
- g. Membangun akuntabilitas pada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor independen
- h. Melaksanakan rembug warga tahunan untuk mempertanggung jawabkan atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat
- i. Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang berada di bawah kendali BKM
- j. Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah kelurahan setempat untuk dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah
- k. Mengawasi penerapan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat dan P2KP dalam setiap langkahnya
- l. Menghidupkan serta menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat pada setiap tahapan dan proses kegiatan penanggulangan kemiskinan dan atau pembangunan kelurahan dengan bertumpu pada budaya masyarakat setempat.

## 2. Kewajiban BKM

- a. Membuat program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang
- b. Mematuhi segala ketentuan yang ada dalam AD / ART
- c. Melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat luas perihal visi, misi, tujuan, dan manfaat BKM beserta kelengkapan organisasi dan mekanisme kerjanya
- d. Mengadakan Rembug Warga Tahunan (RWT).

## 3. Wewenang dan Hak BKM

- a. Memilih koordinator dan sekretaris BKM
- b. Membentuk sekretariat sebagai pelaksana harian 3 (tiga) orang dengan kerja penuh waktu sehingga harus diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan BKM
- c. Membentuk satuan-satuan kerja / pengelola, seperti Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS).
- d. Mengangkat penasehat sesuai dengan kebutuhan dan bersifat relawan
- e. Melakukan kerjasama atau menjalin hubungan dengan pihak lain, baik yang menyangkut masalah manajemen maupun permodalan.

## 4. Fungsi BKM

- a. Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat

- b. Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku)
- c. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis
- d. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan
- e. Pusat pembangkit, dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat
- f. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan setempat
- g. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat
- h. Pusat pembelajaran masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lingkungan permukiman terpadu.

### **G.1.3. Tugas dan Fungsi UPK, UPL, dan UPS**

Secara umum tugas dan fungsi unit-unit pengelola BKM adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh BKM, sehingga posisi unit-unit pengelola adalah sebagai pelaksana operasional yang berkaitan dengan masing-masing tugasnya sesuai apa yang tertuang dalam PJM Pronangkis. Secara Rinci tugas masing-masing unit pengelola dijabarkan sebagai berikut:

#### **a. Unit Pengelola Keuangan (UPK)**

UPK berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- ✓ Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM Ekonomi

- ✓ Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi
- ✓ Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM Ekonomi, mengadakan administrasi keuangan
- ✓ Menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK.

b. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

UPL berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang lingkungan perumahan dan permukiman dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- ✓ Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh KSM/ Panitia pembangunan
- ✓ Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat dan terpadu
- ✓ Menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya
- ✓ Menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL.

c. Unit Pengelola Sosial (UPS)

UPS berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang sosial dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- ✓ Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM / Panitia

- ✓ Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/  
Panitia
- ✓ Membangun / mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui  
media warga / infokom
- ✓ Memfasilitasi dan mendorong masyarakat / relawan dalam Komunitas  
Belajar Kelurahan / Desa (KBK/D)
- ✓ Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan,  
beasiswa, sunatan missal, dll.
- ✓ Menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang  
mendukung program sosial UPS.

#### **G.1.4. Upaya BKM dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat**

BKM bertindak dalam memfasilitasi peran serta atau partisipasi yang tumbuh dari bawah. Sebagai kumpulan dari orang-orang yang paling dapat dipercaya maka BKM diharapkan benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan seluruh warga, terutama warga miskin sehingga akan dapat memotivasi masyarakat untuk secara sukarela terlibat aktif dan intensif dalam setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan penting yang menyangkut diri mereka sendiri. Artinya, warga memiliki akses yang memadai ke sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi dan sumberdaya, baik sumber daya swadaya yang mereka miliki maupun sumber daya dari pihak luar (*channeling program*).



Terkait dengan upaya BKM dalam menggerakkan partisipasi masyarakat atau sebagai lembaga yang memfasilitasi peran serta dari bawah, maka peran yang harus dilakukan oleh BKM adalah sebagai berikut:

- Berindak sebagai motor penggerak untuk senantiasa menggali dan melembagakan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bersifat universal, prinsip-prinsip universal, serta Tridaya
- Menumbuhkan solidaritas seta kesatuan sosial untuk menggalang kepedulian dan kebersamaan gerakan masyarakat warga dalam menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan
- BKM mengorganisasi warga untuk merumuskan program jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan dan rencana tahunan (PJM dan Renta Pronangkis) secara partisipatif
- Bertindak sebagai forum pengambilan keputusan dan kebijakan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan P2KP pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya
- Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka
- Menumbuhkembangkan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) dan mengoptimalkan peran relawan-relawan setempat
- Mengembangkan jaringan BKM di tingkat kota / kabupaten sebagai mitra kerja pemda serta kelompok peduli setempat sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakili, maupun dalam rangka mengakses berbagai potensi sumberdaya yang ada di luar untuk

melengkapi sumber daya yang dimiliki masyarakat (*partnership dan channeling programe*).

BKM hanya akan representatif, mengakar, dan dapat dipercaya oleh masyarakat desa setempat apabila mampu menggerakkan partisipasi seluruh masyarakat, senantiasa mengambil keputusan secara kolektif atas dasar kepentingan seluruh masyarakat, serta keputusan / kebijakan maupun kegiatan unit-unit pengelola (UPK, UPL, UPS) benar-benar bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama kesejahteraan masyarakat miskin.

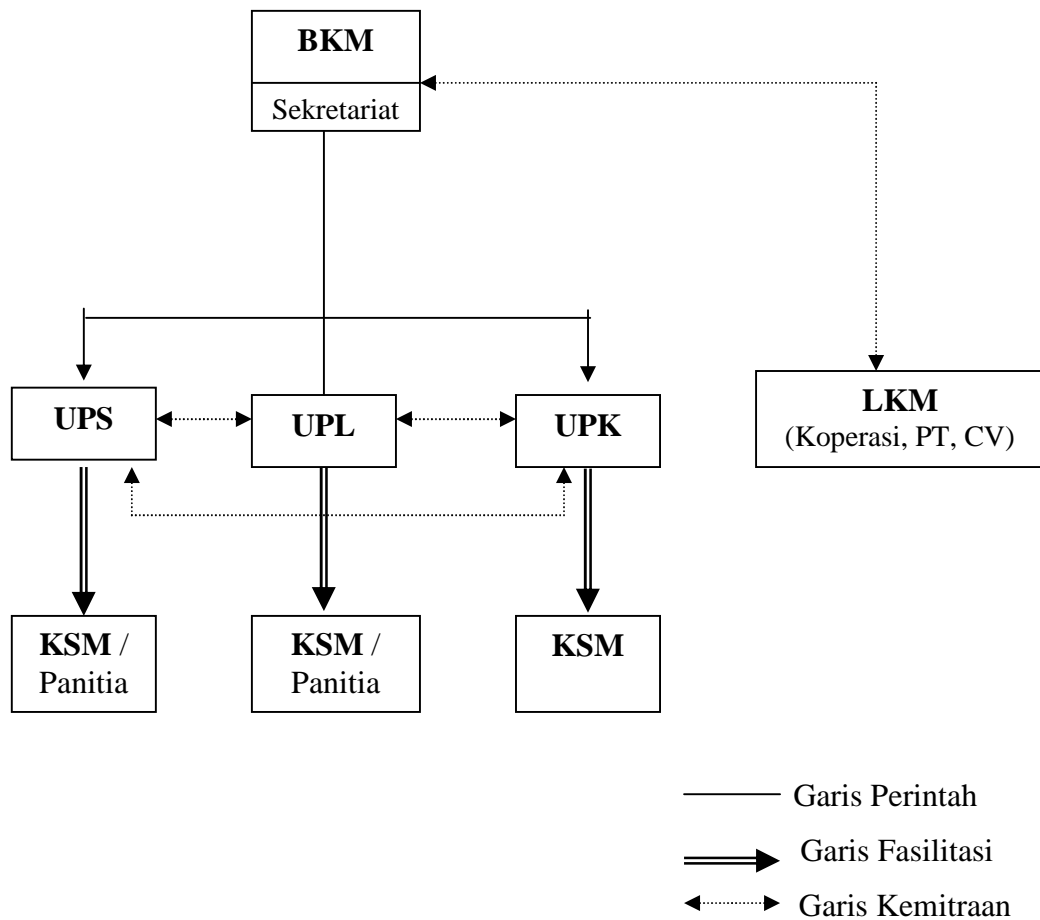
Mengingat betapa pentingnya partisipasi masyarakat, utamanya yang menjadi kelompok sasaran (*target group*), dalam mencapai tujuan proyek/ program pembangunan, maka sangat diperlukan upaya konkret dari pihak penyelenggara pembangunan untuk menggalang partisipasi mereka. Untuk memupuk dan menggalakkan partisipasi aktif kelompok masyarakat sasaran, maka BKM Adil makmur Desa Dopleng melakukan beberapa upaya konkret sebagai berikut:

- ✓ Menggalakkan sosialisasi P2KP
- ✓ Meningkatkan jalur komunikasi dan informasi
- ✓ Pemberian insentif dan penghargaan
- ✓ Merevisi dan menyesuaikan aturan-aturan.

#### **G.1.5. Struktur Organisasi BKM Adil Makmur Desa Dopleng**

Mengenai struktur organisasi BKM Adil Makmur Desa Dopleng dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi BKM “Adil Makmur” Desa Doplang**  
**Akta Notaris No. 77 / 30 September 2005**



LKM: Lembaga Keuangan Mikro

*Sumber : Sekretariat BKM Adil Makmur Desa Doplang.*

Dalam pelaksanaan P2KP di Desa Doplang, BKM membentuk Unit-unit Pengelola, yaitu unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Anggota-anggota BKM tidak diperkenankan merangkap menjadi pengelola dari unit-unit tersebut. Unit-unit pengelola tersebut dipimpin oleh seorang manager (atau istilah yang lain) dan staff sesuai kebutuhan yang dipilih melalui Rapat Anggota BKM. Khusus bantuan pinjaman dana bergulir untuk modal usaha produktif, pengelolaannya

diserahkan kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK ini merupakan salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana bantuan pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan P2KP, maupun dari pihak-pihak yang bersifat hibah.

Jadi BKM Adil Makmur di Desa Doplang merupakan organisasi tertinggi yang ada di tingkat kelurahan dan berkewajiban secara keseluruhan atas pelaksanaan P2KP serta bertanggungjawab atas pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan di Desa Doplang ini. BKM tersebut beranggotakan perwakilan dari RT, RW, perwakilan KSM-KSM, dan juga tokoh masyarakat. Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan menyelenggarakan musyawarah dengan seluruh anggota BKM.

## **G.2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)**

KSM adalah kelompok masyarakat pemanfaat langsung dari proyek P2KP yang langsung menikmati hasil dari program penanggulangan kemiskinan yang direncanakan secara partisipatif oleh masyarakat kelurahan di bawah koordinasi BKM. KSM ini terdiri anggota masyarakat miskin yang mempunyai keinginan untuk membentuk usaha di sektor kegiatan ekonomi produktif atau untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Usaha tersebut dapat berupa usaha bersama maupun usaha sendiri-sendiri (perseorangan) yang membentuk satu kelompok. Pembentukan KSM ini merupakan syarat untuk mendapatkan dana

pinjaman bergulir P2KP. KSM ada di setiap dusun / RW maupun di setiap RT. Sampai dengan bulan November 2007, jumlah KSM yang ada di Desa Dopleng mencapai 59 KSM dengan perincian untuk KSM Ekonomi Bergulir sebanyak 33 KSM, KSM Lingkungan sebanyak 19 KSM dan KSM Sosial sebanyak 7 KSM.

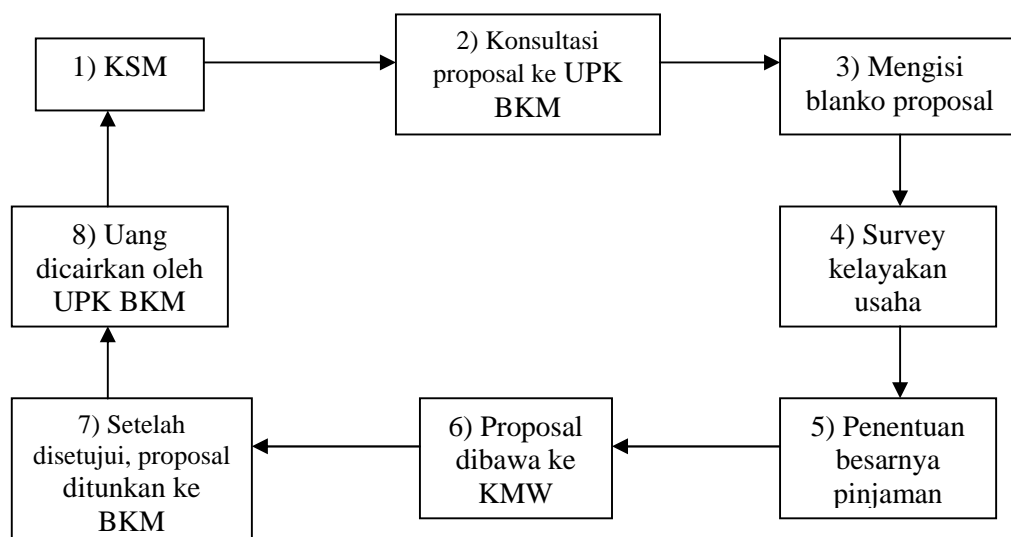
Pembangunan KSM perlu didorong sebagai kelompok basis dimana antar anggotanya dapat saling membantu, saling memperkuat dan saling belajar untuk bersama-sama keluar dari belenggu kemiskinan. Kesatuan dalam KSM ini didasari oleh ikatan pemersatu (*common bound*), antara lain kesamaan kepentingan dan kebutuhan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili, dll, yang mengarah pada upaya mendorong tumbuh berkembangnya modal sosial.

Jenis-jenis usaha yang dikembangkan oleh KSM tersebut antara lain produksi rambak / kerupuk, produksi pengasapan tembakau, produksi pembuatan bata merah, pembuatan genteng, warung, dagang, menjahit, kerajinan bambu, sablon, servis elektro, catering, serta beberapa usaha ternak yang mampu memberikan alternatif untuk pembangunan dan pengembangan usaha seperti ternak ayam, ternak puyuh, ternak lele, ternak kambing dan lembu. Dalam pelaksanaan P2KP ini KSM juga mendapatkan beragam pelatihan yang difasilitasi oleh BKM seperti pelatihan menjahit, servis elektro, dan sablon.

Proses pemberian pinjaman dana bergulir P2KP harus melalui suatu mekanisme, yaitu KSM terlebih dahulu berkonsultasi dengan fasilitator kelurahan (faskel) ataupun pihak BKM, dalam hal ini baik fasilitator maupun pengurus BKM memberikan arahan atau pendampingan, kemudian KSM yang bersangkutan mengisi blanko proposal dan diserahkan ke BKM. Setelah BKM

menerima proposal dari KSM, selanjutnya tim survey dari BKM melakukan survey ke tempat / lokasi usaha KSM yang bersangkutan untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha tersebut. Langkah selanjutnya BKM mengadakan rapat untuk menentukan besarnya pinjaman. Setelah itu proposal dibawa ke KMW oleh faskel untuk disetujui kemudian proposal diturunkan ke BKM, setelah semua proses dilalui maka dana pinjaman dapat dicairkan. Untuk lebih jelasnya proses pemberian pinjaman dana bergulir digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.3**  
**Proses Pinjaman Dana Bergulir P2KP Di Desa Doplang**



*Sumber : Sekretariat BKM Adil Makmur Desa Doplang.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Doplang, sebagai proyek yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, akan disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

##### **A. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat P2KP**

###### **1. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dalam P2KP di Desa Doplang**

Sosialisasi P2KP

Pembentukan BKM

Pembentukan KSM

Penyadaran dan Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap BKM dan KSM

###### **2. Pemanfaatan Dana P2KP Bagi Masyarakat**

Pemanfaatan dana untuk kegiatan ekonomi (menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada);

Pemanfaatan dana untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik/lingkungan guna menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat;

Pemanfaatan dana untuk kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial masyarakat dalam berusaha.

## B. Partisipasi Masyarakat dalam P2KP

B.1. Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi dan Perencanaan Kegiatan P2KP

B.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan P2KP

B.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hasil Kegiatan P2KP

C. Hal-hal Yang Mendukung Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Dopleng.

D. Hal-hal Yang Menghambat Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Dopleng.

## A. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat P2KP

Persepsi masyarakat terhadap manfaat P2KP sebagai proyek yang memberdayakan masyarakat masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang ada dalam P2KP serta bagaimana pemanfaatan dana P2KP bagi masyarakatnya.

### 1. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dalam P2KP di Desa Dopleng

#### 1.1. Sosialisasi Program

Sosialisasi atau pemasyarakatan P2KP merupakan kegiatan untuk memasyarakatkan P2KP kepada berbagai pihak yang terkait di tingkat kelurahan, agar tertanam suatu pengertian dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakannya sendiri.

Substansi pesan yang ingin disampaikan dalam sosialisasi P2KP ini adalah P2KP adalah rangkaian proses pembelajaran dan meningkatkan kesadaran kritis



(pemberdayaan) masyarakat dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Sosialisasi P2KP meliputi kegiatan-kegiatan untuk mengkomunikasikan keberadaan P2KP dan konsep-konsep, tujuan, ketentuan, nilai dan norma, metodologi P2KP serta pelaksanaan P2KP sehingga terjadi pemahaman kritis pada masyarakat sasaran dan dapat mengarah pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat menjadi tatanan masyarakat yang mandiri. Hasil yang diharapkan adalah pemahaman yang benar akan makna dari P2KP baik di tingkat masyarakat maupun aparat pemerintahan desa, diperolehnya dukungan nyata dalam pelaksanaan P2KP, dan juga kesadaran masyarakat mengenai pentingnya proses pembangunan organisasi dan kepemimpinan masyarakat untuk mendukung kegiatan dalam P2KP. Berikut ini penuturan Bapak Utama Wardana selaku Fasilitator Kelurahan (faskel) Desa Dopleng :

“Diadakannya sosialisasi itu dimaksudkan untuk memasyarakatkan P2KP kepada berbagai pihak yang terkait agar tertanam suatu pengertian dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat selalu diajak bicara...jadi masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, persiapan, sampai dengan pemecahan masalah.” (Wawancara, 10 Maret 2008 )

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Saryono selaku Sekretaris BKM Adil Makmur Desa Dopleng sebagai berikut :

“Sosialisasi ini menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam siklus proyek dan kegiatan-kegiatan spesifik proyek. Terkait dengan siklus, itu sebenarnya merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat. Sosialisasi mengenai program P2KP materinya mengenai apa sih P2KP, prinsip P2KP, konsep-konsep, ketentuan, nilai dan norma, pengelola program, alokasi dana terus dibuat jadwal sosialisasi ke tingkat basis atau dusun.” (Wawancara, 9 Maret 2008).

Sosialisasi Awal P2KP di Desa Dopleng untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2005 di Aula Balai Desa Dopleng. Persepsi

warga terhadap kegiatan sosialisasi P2KP ini pertama kali diawali dengan pertemuan tingkat desa atau RKM (Rembug Kesiapan Masyarakat) dengan dihadiri oleh aparat pemerintahan desa, pengurus RT/RW, lembaga-lembaga desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh wanita (PKK), wakil pemuda dan pemuka masyarakat yang lain. Dalam pertemuan tersebut, fasilitator kelurahan (faskel) memberikan informasi mengenai P2KP melakukan tanya-jawab mengenai kesiapan warga masyarakat dalam kegiatan P2KP nantinya. Dari kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) tersebut diperoleh keputusan bahwa masyarakat Desa Doplang siap untuk menerima program P2KP di wilayahnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nur Zaeni selaku Koordinator BKM Adil Makmur Desa Doplang :

“Sosialisasi program di tingkat kelurahan untuk pertama kalinya dilaksanakan tanggal 11 Januari 2005. Dulu....menghadirkan Tim Faskel dan Koordinator Kota (Korkot) Boyolali; yang diundang Aparat Pemerintahan Desa, pengurus RT/RW, lembaga-lembaga desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh wanita (PKK), wakil pemuda dan pemuka masyarakat yang lain. Setelah itu diadakan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)...Dari RKM tersebut dihasilkan keputusan bahwa warga menyatakan siap untuk menerima kehadiran P2KP.” (Wawancara, 12 April 2008).

Indikasi keberhasilan atau suksesnya sosialisasi di tingkat basis ini ditandai dengan antusiasme warga untuk hadir dalam sosialisasi dan peran aktif mereka pada waktu diadakan sosialisasi tersebut. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dalam tahapan sosialisasi P2KP dapat dilihat dari wawancara dengan Ibu Rini Anggoro Wati, seorang warga Rt 02/ Rw I. Ia adalah seorang tokoh wanita yang aktif dalam kepengurusan PKK Desa Doplang. Ibu Rini ini mengungkapkan pendapatnya tentang program P2KP sebagai berikut :

“P2KP itu adalah suatu program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan sehingga masyarakatnya dilatih untuk dapat memecahkan persoalan kemiskinannya sendiri...supaya tidak bergantung pada pihak lain. Setelah mendengar bahwa akan ada suatu program yang seperti itu ya saya senang sekali tho mbak...meskipun disini saya bukan merupakan sasaran proyek namun saya sebagai warga Desa Doplang saya ikut senang dan akan ikut mensukseskan program ini mbak...” (Wawancara, 11 Maret 2008).

Sedangkan Bapak Mustaqim, seorang tokoh masyarakat Desa Doplang yang berprofesi sebagai PNS menyampaikan :

“Ya senang sekali, karena P2KP selain untuk sarana fisik juga dialokasikan untuk kegiatan ekonomi seperti pinjaman bergulir dan juga pelatihan-pelatihan serta kegiatan santunan sosial....Saya akan berjuang untuk gakin di Desa Doplang ini agar mendapat bantuan dana yang sifatnya bergulir.” (Wawancara, 15 Maret 2008).

Pelaksanaan sosialisasi P2KP di Desa Doplang memberi kesan bahwa masyarakat cukup memahami bahwa P2KP merupakan program pemerintah yang berbeda dengan yang pernah ada seperti IDT beberapa tahun lalu yang pernah mereka terima. Beberapa kelompok masyarakat ada yang tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan P2KP, sementara sebagian masyarakat yang lain merasa kurang tertarik terutama kegiatan ekonomi produktif dimana kelompok yang memanfaatkan bantuan dana tersebut nantinya diwajibkan mengembalikan pinjaman plus bunga (jasa) sebesar 1,5 % perbulan. Kelompok yang kurang tertarik tersebut adalah masyarakat yang kondisi perekonomiannya sangat lemah sehingga ia takut kalau tidak bisa mengembalikan dana pinjaman tersebut.

Dalam kegiatan sosial pun ada sebagian kecil masyarakat yang kurang tertarik, misalnya untuk kegiatan pasar murah (bazar) ada masyarakat yang

sebenarnya merupakan warga miskin tetapi tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut karena tidak mempunyai uang untuk membeli paket sembako yang ditawarkan walaupun dalam harga yang sangat murah. Tanggapan lain yang muncul dari sebagian kelompok maupun dusun adalah memanfaatkan dana P2KP tersebut untuk kegiatan prasarana fisik/lingkungan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan sehingga memperlancar aktivitas perekonomian warga.

Sosialisasi di Desa Doplang tidak hanya dilakukan satu kali pada awal adanya proyek saja, tapi dilakukan berulang-ulang sesuai dengan tahapan kegiatan dan sesuai dengan kebutuhan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nur Zaeni selaku Koordinator BKM Adil Makmur desa Doplang yang menyatakan bahwa :

“Sosialisasi ini tidak hanya kali pada awal proyek saja, tapi kami terus melakukan sosialisasi sewaktu-waktu dibutuhkan, baik itu di tingkat desa maupun sosialisasi di tingkat basis (RT maupun RW).” (Wawancara, 14 Maret 2008).

Dari beberapa petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pada waktu diadakan sosialisasi sangat baik, mereka menanggapi dengan baik dan menyetujui untuk dilaksanakannya proyek P2KP di wilayah mereka.

## **1.2. Pembentukan BKM**

BKM merupakan sebuah organisasi yang mengelola P2KP di tingkat kelurahan. BKM bertindak sebagai forum musyawarah dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat setempat, yang berhak merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam jenis kegiatan P2KP.

Pengurus BKM merupakan pemegang amanat dalam mengelola kegiatan sehari-hari khususnya di bidang organisasi, manajemen, keuangan dengan didampingi oleh fasilitator kelurahan (faskel) dan kader masyarakat (relawan) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya KSM-KSM. BKM ini juga merupakan wadah organisasi untuk melakukan penggondokan atas aspirasi yang muncul dari masyarakat yang merupakan pelaku utama dalam P2KP, jadi BKM ini *manage* usulan-usulan program atau kegiatan yang muncul dari bawah. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Nur Zaeni selaku Koordinator BKM Desa Dopleng sebagai berikut :

“BKM sifatnya independent (mandiri), terlepas dari pemerintahan desa namun tetap harus berkoordinasi dengan pemerintahan desa. BKM ini sebagai lembaga yang mawadahi aspirasi masyarakat desa, *manage* usulan-usulan program atau kegiatan yang muncul dari bawah.” (Wawancara, 14 Maret 2008).

BKM dapat memfungsikan lembaga-lembaga yang telah ada di tingkat desa. Namun masyarakat desa Dopleng sepakat untuk membentuk lembaga baru yang berdiri sendiri terlepas dari pemerintahan desa. Dalam hal ini Bapak Saryono sebagai Sekretaris BKM Adil Makmur Desa Dopleng mengungkapkan bahwa:

“Kalau misal sudah ada lembaga di tingkat desa yang sudah dianggap masyarakat oke dan memenuhi persyaratan untuk dapat berfungsi sebagai BKM maka tidak perlu membentuk BKM, jadi lembaga itu bisa dianggap merangkap sebagai BKM. Namun di Desa Dopleng ini disetujui untuk membentuk BKM melalui proses pemilu yang murah biaya dan tanpa tendensi apapun, tanpa pencalonan, jadi benar-benar dari hati nurani rakyat.” (Wawancara, 9 Maret 2008).

Tujuan utama terbentuknya BKM ini adalah untuk melakukan suatu pemberdayaan masyarakat miskin agar mengerti dan paham mengenai bagaimana

berorganisasi dan bisa mengubah perilaku dan sikap serta pola pikir yang apatis menjadi kritis sehingga bisa mengkritisi atas segala kebijakan yang dijalankan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Saryono selaku sekretaris BKM Adil Makmur Desa Dopleng yang dulunya juga relawan, berikut ini :

“BKM dibentuk untuk melakukan suatu pemberdayaan masyarakat miskin serta berupaya dalam peningkatan partisipasi masyarakat sehingga bisa mengubah pola pikir masyarakat yang apatis menjadi kritis. BKM melakukan kerja-kerja pengorganisasian masyarakat, artinya bagaimana kita melembagakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat dalam bentuk KSM , dan mencoba memikirkan secara sistematis apa yang dibutuhkan masyarakat.” (Wawancara, 9 Maret 2008).

Persepsi warga masyarakat terhadap pembentukan BKM ini diawali dengan Rembug Sosialisasi dan pernyataan kesiapan masyarakat dalam pembentukan BKM, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus di Aula Balai Desa Dopleng dengan dihadiri oleh aparat pemerintahan desa, pengurus RT/RW, lembaga-lembaga desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh wanita (PKK), wakil pemuda dan pemuka masyarakat yang lain.

Indikasi keberhasilan atas suksesnya sosialisasi pembentukan BKM ini, didukung dengan daftar hadir peserta Rembug Sosialisasi dan Pernyataan Kesiapan Masyarakat dalam Pembentukan BKM yaitu sebanyak 85 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mereka semua menyatakan siap dan sanggup untuk membentuk BKM di Desa Dopleng.

Untuk pertemuan di tingkat desa, faskel bersama relawan memberikan sosialisasi melalui bentuk Diskusi Kelompok Terarah (DKT) atau yang sering disebut dengan FGD (Focus Group Discussion). Materi diskusi adalah mengenai

organisasi masyarakat dan perlunya lembaga atau institusi kepemimpinan kolektif yang mengakar dan representatif, dari sini mulai dikenalkan mengenai BKM. Berangkat dari pertemuan tingkat desa tersebut kemudian dilakukan serangkaian rembuk warga mulai dari tingkat RT, RW atau dusun yang ada di Desa Doplang. Pertemuan itu bisa dilaksanakan dalam forum-forum yang ada di tingkat RT maupun RW seperti pada pengajian, arisan, kelompok simpan pinjam, atau sejenisnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Maryanto (Anggota BKM) sebagai berikut :

“Pertemuan di tingkat basis itu bisa dilaksanakan dalam forum-forum yang ada di tingkat RT maupun RW seperti lewat pengajian, arisan, kelompok koprasia atau simpan pinjam, dan lain sebagainya.” (Wawancara, 4 Maret 2008).

Dari hasil pertemuan-pertemuan di tingkat RT dan RW itu, diambil kesepakatan tentang perlunya BKM sebagai institusi lokal untuk mewakili masyarakat dalam program P2KP ini. Pembentukan BKM ini sebenarnya mutlak, tidak wajib, sebenarnya lembaga desa seperti LKMD maupun Badan Desa seperti BPD dapat difungsikan menjadi BKM, namun masyarakat masyarakat Desa Doplang dalam pertemuan di tingkat RT maupun RW tersebut menyepakati untuk membentuk institusi lokal baru yaitu BKM. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur Desa Doplang) bahwa :

“ ...Setelah pertemuan di Balai Desa, kemudian di tiap-tiap dusun mengadakan pertemuan sendiri, mereka menyepakati untuk membentuk BKM daripada memfungsikan lembaga yang telah ada seperti LKMD maupun BPD untuk menjadi BKM.....” (Wawancara, 10 Maret 2008).

Hal ini menunjukkan bahwa persepsi warga terhadap pembentukan BKM ini adalah merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, disini terlihat antusiasme warga dalam pembentukan BKM tersebut. Mereka semua menyepakati untuk dibentuk sebuah lembaga yang bernama BKM.

Setelah disepakati untuk membentuk BKM, kemudian diadakan pemilihan anggota BKM. Mekanisme pemilihan ini dilakukan melalui pemilihan langsung yang bersifat demokratis dan tanpa pencalonan. Pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT kemudian baru dilaksanakan pemilihan di tingkat kelurahan. Dari tiap RT mengirimkan 5 orang wakilnya (sesuai kesepakatan) yang telah terpilih di tingkat RT berdasarkan perolehan suara terbanyak. Mereka yang terpilih tersebut adalah yang memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri dan tinggal di RT yang bersangkutan untuk mewakili RTnya. Selanjutnya, 5 nama urutan teratas pada pemilihan tingkat RT tersebut diundang ke Balai Desa untuk diadakan pemilihan tingkat kelurahan. Dari 19 RT yang ada di Desa Doplang semua mengirimkan wakilnya pada pemilihan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa warga Desa Doplang cukup menanggapi kegiatan pembentukan BKM ini, terlihat dengan tidak adanya RT yang tidak mengirimkan wakilnya, semuanya mengirimkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Nur Zaeni (Koordinator BKM Adil Makmur Desa Doplang) bahwa :

“Persepsi masyarakat dalam kegiatan pembentukan BKM ini sangat baik, hal ini terlihat dari tidak adanya RT yang tidak mengirimkan wakilnya, semua mengirimkan, namun mungkin pada pemilihan tahap kedua (di tingkat desa) ada wakil yang tidak terpilih.” (Wawancara, 14 Maret 2008).



Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Rini Anggoro Wati yang pada waktu itu terpilih sebagai perwakilan pada pemilihan tingkat RT namun tidak terpilih pada pemilihan tingkat kelurahan, bahwa :

“Saya senang sekali mbak pada waktu itu terpilih di tingkat RT, setelah itu, calon-calon yang terpilih di tingkat RT tersebut diundang ke Balai Desa untuk diadakan pemilihan di tingkat kelurahan/desa, tapi untuk di tingkat desa saya tidak lolos karena kalah suara....” (Wawancara, 11 Maret 2008).

Karena semua RT mengirimkan wakilnya, sehingga di tingkat kelurahan terkumpul perwakilan dari tiap RT sebanyak 95 orang (5 X 19 RT). Dalam pemilihan tingkat kelurahan, 95 orang sebagai perwakilan dari 19 RT yang ada di Desa Dopleng tersebut memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota BKM. Kemudian dilakukan pemilihan dengan cara menuliskan nama-nama tersebut di atas kertas secara rahasia dan tertutup, tanpa kampanye, tanpa pencalonan, dan tanpa upaya mempengaruhi atau rekayasa untuk memilih orang tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk secara bebas menentukan pilihannya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur Desa Dopleng) berikut ini :

“ Pembentukan BKM di Desa Dopleng dilakukan melalui proses pemilu yang murah biaya dan tanpa tendensi apapun, tidak ada penjagoan...ini merupakan proses demokrasi murni. Pemilihannya dilakukan secara rahasia, tanpa pencalonan, tanpa kampanye, dan tanpa upaya mempengaruhi untuk memilih si A si B...Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk

secara bebas menentukan pilihannya berdasarkan criteria yang telah ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri....” (Wawancara, 9 Maret 2008).

Persepsi masyarakat dalam proses pembentukan BKM ini adalah sangat mendukung dan menanggapi dengan baik, terlihat dengan hadirnya seluruh utusan RT dan komponen masyarakat yang diundang dalam pemilihan tersebut. Pemilu BKM di tingkat kelurahan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2005 di Balai Desa Dopleng. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak menghadapi hambatan yang berarti. Masyarakatpun menanggapi dengan baik atas terbentuknya BKM ini karena memang terbentuknya BKM ini juga berdasar pada inisiatif rakyat sendiri yang telah menyetujui untuk dibentuknya BKM. Masyarakat menyadari akan peran BKM yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayahnya dan mampu menjembatani aspirasi dan kebutuhan warga dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Dopleng.

### **1.3. Pembentukan KSM**

KSM dalam konteks P2KP adalah sekumpulan warga yang memenuhi kriteria sebagai sasaran proyek (keluarga miskin) dimana mereka mempunyai minat serta tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok yang sama, baik yang menyangkut prasarana dasar lingkungan (fisik), pengembangan SDM, serta pengembangan usaha bagi para anggota secara individu baik sebagai usaha baru maupun usaha yang sudah ada atau dalam rangka mengembangkan usaha kelompok.

Pembentukan KSM ini sengaja didorong sebagai kelompok basis dimana antar anggota dapat saling membantu, saling memperkuat, dan saling belajar untuk bersama-sama keluar dari belenggu kemiskinan. Kesatuan dalam KSM ini didasari oleh ikatan pemersatu, antara lain kesamaan kepentingan dan kebutuhan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili, dan lain-lain yang mengarah pada upaya mendorong tumbuh berkembangnya modal sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur Desa Doplang) mengemukakan pendapatnya bahwa :

” KSM itu bagaikan seikat sapu lidi. Sendiri-sendiri, bagaikan sebatang lidi mereka kurang bermanfaat dan mudah dipatahkan. Namun dengan diikat menjadi sapu lidi, akan menjadi lebih kuat, tidak mudah patah dan lebih bermanfaat.” (Wawancara, 9 Maret 2008).

Pembentukan KSM di Desa Doplang sepenuhnya diserahkan pada masyarakat, fasilitator kelurahan yang dibantu oleh relawan pada waktu itu hanya memberikan gambaran apa itu KSM, fungsi KSM itu sendiri sendiri. Intinya sebagai penanggungjawab, faskel memberi saran agar pembentukan KSM tidak asal tunjuk antar ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota karena sistem yang digunakan dalam KSM adalah tanggung renteng, artinya tanggung jawab ditanggung semua anggota KSM, bilamana salah satu anggota belum menyetor angsuran maka anggota yang lain harus ikut bertanggungjawab.

KSM ini dibentuk salah satu tujuannya adalah sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan P2KP, karena untuk mencairkan dana P2KP itu harus terbentuk KSM terlebih dahulu. Dalam penyusunan proposal pengajuan dana oleh KSM tersebut harus mencantumkan jenis usaha apa yang akan dijalankan maupun

usaha apa yang sudah dijalankan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Murtini (UPK-BKM Adil Makmur Desa Doplang) berikut ini :

”Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan P2KP ini harus membentuk dan bergabung dalam KSM terlebih dahulu...dan dalam proposal pengajuan dana harus mencantumkan jenis usaha apa yang akan dijalankan maupun usaha apa yang sudah dijalankan, jadi dana tersebut bukan untuk keperluan konsumsif masyarakat.....” (Wawancara, 06 Maret 2008).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Romzani (Ketua KSM Usaha Maju) bahwa :

” .....Setelah ada sosialisasi dari P2KP di tingkat RW, kemudian saya bersama tetangga-tetangga membentuk KSM Usaha Maju. Sesuai keterangan yang dijelaskan pada waktu sosialisasi pembentukan KSM, memang benar bahwa dana bantuan P2KP ini harus digunakan untuk menciptakan usaha atau mengembangkan usaha yang telah dijalankan oleh anggota KSM. Dan dalam proposal itu pengajuan dana itu memang harus mencantumkan jenis usaha apa yang akan dijalankan maupun usaha apa yang sudah dijalankan.” (Wawancara, 5 Maret 2008).

Dengan adanya KSM sebagai pihak peminjam maka program P2KP ini melarang adanya pinjaman individual maupun ”*sebrakan*” (untuk mencukupi kebutuhan mendadak).

Persepsi masyarakat dalam pembentukan KSM ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota KSM dan antusiasme warga saat menghadiri kegiatan tersebut. Pembentukan KSM ini dilakukan di tiap-tiap RT, ada tim faskel dan pihak BKM yang datang ke dukuh/RT-RT untuk mendampingi dalam pembentukan KSM itu.

Kegiatan pembentukan KSM ini berjalan lancar dan tidak menemui hambatan yang berarti. Pembentukannya diserahkan sepenuhnya pada masyarakat

sehingga dapat dianalisis bahwa persepsi dan daya dukung masyarakat terutama dalam membentuk KSM sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak BKM dengan faskel, dimana mereka dibiarkan untuk membentuk kelompok yang masing-masing anggotanya saling memahami karakteristik anggota yang lain.

Prinsip dasar yang harus dipegang dalam pembentukan KSM adalah membantu warga miskin sebagai prioritas utama, yang perlu ditekankan pula persyaratan perguliran dana serta jumlah anggota tiap KSM minimal 5 orang dan maksimal 15 orang dan harus terdaftar dalam KK miskin yang telah terdata oleh pihak P2KP. Namun dalam kenyataannya ada beberapa KSM yang anggotanya merupakan warga yang tidak terdaftar dalam KK miskin, atau mereka tergolong penduduk sejahtera, sebagian besar mereka sebelumnya adalah relawan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa relawan di Desa Doplang tidak semuanya berasal dari keluarga non miskin (keluarga sejahtera), tetapi relawan di Desa Doplang ini banyak yang berasal dari keluarga miskin. Relawan yang tergabung dalam KSM ini mempunyai tugas sebagai ketua, sekretaris maupun bendahara, namun tidak boleh ikut dalam kegiatan peminjaman bergulir. Jadi anggota KSM yang bukan merupakan KK miskin tersebut hanya membantu dalam hal administrasi seperti dalam penyusunan pengajuan pinjaman, kegiatan administrasi serta keorganisasian. Namun jika relawan tersebut tergolong KK miskin maka boleh ikut melakukan kegiatan pinjam meminjam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur Desa Doplang) berikut ini :

” .....Setiap anggota KSM minimal 5 orang dan maksimal 15 orang dan merupakan warga yang tergolong KK miskin, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada KSM yang beberapa anggotanya merupakan mantan relawan dan juga ada warga yang tergolong penduduk sejahtera, mereka hanya membantu kegiatan administrasi dan tidak boleh melakukan kegiatan pinjam meminjam, jadi tetap yang diutamakan adalah para warga miskin....Tetapi khusus untuk anggota KSM yang dulunya adalah relawan dan tergolong dalam KK miskin ya boleh ikut meminjam dana perguliran.....” (Wawancara, 9 Maret 2008).

Dari informasi yang peneliti peroleh ternyata ada sebagian warga yang sebenarnya tergolong dalam KK miskin tetapi mereka tidak mau tergabung dalam KSM untuk melakukan peminjaman bergulir dengan alasan karena takut kalau tidak bisa mengembalikannya karena untuk makan saja sulit, mereka harus gali lubang tutup lubang, sehingga mereka mempunyai persepsi bahwa mereka tidak mau terbebani hutang, kalau mereka ikut meminjam berarti mereka mempunyai hutang baru dan kalau tidak sanggup mengembalikan maka akan berakibat buruk pada anggota KSM yang lain yang tergabung dalam satu KSM dengan dirinya. Karena kalau ada salah satu anggota yang macet dan sistem tanggung renteng yang ditekankan pada KSMnya tidak berjalan maka untuk perguliran tahap berikutnya KSM tersebut sudah tidak boleh meminjam lagi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Maryanto (Anggota BKM Adil Makmur Desa Dopleng) bahwa :

” .....Ada sebagian warga yang sebenarnya tergolong dalam KK miskin tetapi mereka tidak mau tergabung dalam KSM untuk melakukan peminjaman bergulir dengan alasan karena takut kalau tidak bisa mengembalikannya karena untuk makan saja sulit, mereka harus gali lubang tutup lubang.....mereka tidak mau terbebani hutang lagi, kalau mereka ikut meminjam berarti mereka mempunyai hutang baru dan kalau tidak sanggup mengembalikan maka akan berakibat buruk pada anggota KSM yang lain yang tergabung dalam satu KSM dengan dirinya....mereka berpikir dari pada nanti hanya membebani anggota

KSM yang lain lebih baik tidak ikut pinjam saja lah....gitu Mbak...” (Wawancara, 4 Maret 2008).

Berangkat pada kenyataan tersebut, sebagai langkah untuk penyelamatan dana perguliran maka BKM mempunyai inisiatif untuk memperbolehkan warga yang tidak tergolong KK miskin masuk ke dalam KSM. Karena BKM punya persepsi bahwa apabila dana disalurkan hanya kepada kelompok miskin maka dana akan habis dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Nurzaeni (Koordinator BKM Adil Makmur Desa Doplang) bahwa :

”Sasaran P2KP kan semula adalah masyarakat Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Tetapi dari BKM ada pertimbangan tertentu, kalau dana langsung diserap masyarakat miskin maka dana akan habis untuk dikonsumsi.....minimal BKM bisa menyelamatkan dana....Oleh karena itu BKM memperbolehkan warga non miskin untuk masuk dalam KSM namun juga atas pertimbangan tertentu....” (Wawancara, 14 Maret 2008).

Dalam hal ini ada ketentuan yang harus diperhatikan bahwa masyarakat miskin tetap harus menjadi prioritas utama. Jika dalam anggota KSM ada masyarakat yang bukan berasal dari golongan KK miskin maka jumlahnya tidak boleh melebihi seperlima dari jumlah anggota KSM. Inisiatif untuk memasukkan warga non miskin ke dalam KSM ini diharapkan nantinya dapat memfungsikan ”tanggung renteng” dalam KSM tersebut.

Sesuai dengan himbauan dari P2KP, dalam KSM terdapat kegiatan-kegiatan misalnya pada awal pembentukan KSM, masyarakat diberi penyuluhan tentang P2KP dan pembentukan KSM. Dalam penyuluhan ini dijelaskan bahwa pembentukan KSM tidak sekedar hanya membentuk kelompok sebagai sarana untuk peminjaman dana P2KP saja, tetapi lebih dari itu. Tujuan pertama KSM

dibentuk memang sebagai sarana untuk mengajukan pinjaman uang sebagai modal atau tambahan modal untuk menciptakan usaha maupun mengembangkan usaha yang telah dijalankan, tetapi setelah itu hendaknya KSM-KSM yang telah terbentuk tersebut mengadakan pertemuan ataupun mengadakan evaluasi tentang usaha yang telah mereka jalankan serta melihat hasil yang telah tercapai. Selain itu juga sebagai wahana untuk saling berkomunikasi dan saling tukar informasi untuk kemajuan usaha mereka dan juga mengenai kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, sehingga nantinya bisa dikonsultasikan dengan pihak BKM ataupun UPK sehingga akan terjalin hubungan yang baik antara BKM dengan masyarakat (khususnya yang tergabung dalam KSM). Lebih jauh lagi, diharapkan pula bahwa dengan hasil usaha yang dicapai, masyarakat bisa menabung maupun membentuk koperasi kecil-kecilan atau simpan pinjam lokal antar masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan antar KSM-KSM tersebut akan saling membantu satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Murtini (UPK BKM Adil Makmur Desa Dopleng) berikut ini :

” Hendaknya KSM ini tidak cuma sekedar dibentuk sebagai sarana atau persyaratan untuk mengajukan pinjaman uang saja, tetapi hendaknya ada tindak lanjut dari usaha yang dilakukan serta bagaimana perkembangannya. Selain itu juga untuk berkomunikasi dan saling tukar informasi antar anggota KSM nya, sehingga nanti kalau ada kesulitan yang dihadapi bisa dipecahkan bersama atau dikonsultasikan dengan pihak BKM atau UPK, dengan demikian nantinya akan terjalin hubungan yang baik antara BKM dengan masyarakat (khususnya yang tergabung dalam KSM). Lebih jauh lagi, diharapkan pula bahwa dengan hasil usaha yang dicapai, masyarakat bisa menabung maupun membentuk koperasi kecil-kecilan atau simpan pinjam lokal antar masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan antar KSM-KSM tersebut akan saling membantu satu sama lain.....” (Wawancara, 6 Maret 2008).



Tetapi tidak semua KSM tyang terbentuk di Desa Doplang ini tanggap atau benar-benar tahu maksud dari pembentukan KSM tersebut. Ada KSM terbentuk hanya sekedar sebagai sarana atau syarat untuk pinjam uang P2KP saja. Mereka mengadakan pertemuan hanya pada waktu dana akan cair, setelah dana cair sudah tidak mengadakan pertemuan lagi atau jika mengadakan pertemuan hanya pada waktu pengembalian pinjaman saja. Mengenai hal tersebut, berikut ini penulis sajikan beberapa pendapat masyarakat yang tergabung dalam KSM, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Bapak Romzani (Ketua KSM Usaha Maju) bahwa :

”Kami sebenarnya sudah mengetahui mengenai fungsi KSM nantinya seperti apa karena sudah diberi penjelasan yang jelas dan rinci dari mas Saryono (Sekretaris BKM yang dulunya adalah relawan). Perkumpulan atau pertemuan yang kami lakukan hanya pada waktu pertama kali pembentukan KSM, kemudian pada waktu dana itu mau cair, dan pada waktu pengembalian pinjaman itu anggota KSM kami datang ke rumah saya untuk nitip uang cicilan angsuran, karena kebetulan saya ketua KSMnya, jadi saya yang mengkoordinir..nanti saya yang membayarkan uang itu ke Bu Murtini UPK. Sebenarnya ya pengen mengadakan pertemuan rutin....tapi ya karena kesibukan masing-masing anggota ya tidak terlaksana....Masalahnya juga karena dana tersebut untuk usaha perorangan, bukan dipergunakan untuk usaha kelompok. Jadi dana itu dikelola oleh masing-masing anggota dan pemanfaataannya diserahkan sepenuhnya pada anggota. Yang penting saat pembayaran angsuran tidak macet.” (Wawancara, 5 Maret 2008)

Sedang Bapak Harjono yang juga anggota KSM Usaha Maju mengemukakan bahwa :

”Pertemuan rutin di KSM saya ga ada mbak....ya paling kalau mau membayar angsuran kami datang ke rumah Mas Romzani nitip uang angsuran. Anggota KSM kami ada 11 orang, karena tempat tinggalnya satu RT ya kalau pas kebetulan ketemu di jalan atau di masjid atau pas yasinan gitu ya kita kadang ngobrol....ngomongin tentang kondisi usaha kami...” (Wawancara, 6 Maret 2008).

Lain halnya dengan pernyataan Bapak Suyono (Ketua KSM Lestari) berikut ini :

”Anggota KSM Lestari berjumlah 13 orang...kami semua juga tahu bahwa KSM itu dibentuk bukan hanya sebagai sarana pinjam uang saja....pada awal KSM terbentuk sampai dengan kurun waktu 5 bulan kami rutin mengadakan pertemuan seminggu sekali, bahkan kami juga mengadakan arisan KSM. Tapi sekarang sudah jarang mengadakan pertemuan. Dulu pertemuannya dilakukan dengan sistem anjongsana mbak...bergilir dari anggota yang satu ke anggota yang lain.” (Wawancara, 7 Maret 2008).

Selain itu Bapak Sarno (Ketua KSM Cempaka) mengemukakan bahwa :

”...Kalau saya pribadi mbak...saya paham mengenai fungsi KSM. Tapi kami mengadakan pertemuan KSM itu hanya pada waktu dana mau cair dan pada waktu pembayaran angsuran....Saya sebagai ketua KSM sebenarnya sudah pernah mengajak anggota KSM saya untuk mengadakan pertemuan rutin tapi ada beberapa anggota KSM saya yang tidak hadir dengan berbagai alasan....lama-lama ya macet mbak...sudah tidak ada pertemuan lagi”. (Wawancara, 7 Maret 2008).

Dari beberapa petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar KSM yang ada di desa Dopaang ini tidak mengadakan pertemuan rutin antar anggota KSMnya. Memang pada awalnya mereka juga mengadakan pertemuan rutin secara anjongsana atau di rumah ketua KSMnya, bahkan ada yang sampai mengadakan arisan. Tapi lama-lama kegiatan tersebut berangsur surut dan tidak berlangsung lama. Sebagian besar dari mereka sebenarnya sudah mengetahui apa fungsi KSM yang seharusnya bagi kemajuan usaha mereka, bahwa KSM bukan sekedar sarana untuk pinjam uang saja. Namun ada pula anggota yang kurang paham dan kurang sadar akan hal itu. Banyak anggota yang menganggap itu terlalu rumit dalam pelaksanaannya. Menanggapi hal tersebut,

Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur Desa Doplang) mengemukakan bahwa :

” Dari beberapa KSM yang ada (terutama untuk KSM ekonomi), sebagian besar tidak mengadakan pertemuan rutin antar anggotanya, walaupun ada yang mengadakan itu paling pada awal-awal KSM itu terbentuk, belum ada satu tahun sudah tidak berlanjut...Memang ada beberapa KSM yang sama sekali tidak mengadakan pertemuan lagi, tapi dalam hal pembayaran angsuran mereka lancar dan teratur. Saya sendiri pada waktu sosialisasi tentang pembentukan KSM mengalami kesulitan dalam menanamkan pola pikir kritis dan mandiri kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat disalahkan, yang penting mereka dapat merasakan manfaat dari pinjaman dana bergulir itu.....” (Wawancara, 9 Maret 2008).

#### **1.4. Penyadaran dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap BKM dan KSM**

Dalam proses kegiatan yang dilaksanakan dalam P2KP, faskel bersama relawan juga berusaha dalam hal penyadaran dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap BKM dan KSM. Perlunya hal ini dilaksanakan adalah agar masyarakat mempunyai pandangan yang lebih luas terhadap arti pentingnya BKM dan KSM. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Yuwono (Senior Fasilitator) bahwa :

“.....Kami (faskel beserta relawan) juga berusaha dalam kegiatan penyadaran dan peningkatan kepedulian masyarakat akan BKM dan KSM. Hal ini harus dilaksanakan agar masyarakat punya pandangan yang lebih luas terhadap BKM dan KSM. Kegiatan ini juga diperlukan agar masyarakat lebih memahami apa itu BKM dan KSM, arti pentingnya BKM dan KSM.....” (Wawancara, 10 Maret 2008).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Hj. Siti Rochmatun (UPS BKM Adil Makmur Desa Doplang dan juga mantan relawan) bahwa :

“.....memang benar pada waktu itu relawan membantu faskel dalam kegiatan penyadaran dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap BKM dan KSM, hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih tahu dan memahami akan pentingnya keberadaan BKM dan KSM.” (Wawancara, 7 Maret 2008).

Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, setelah BKM terbentuk maka selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BKM beserta relawan yang masih aktif. BKM melakukan kegiatan ceramah-ceramah mengenai P2KP, pemahaman mengenai BKM dan KSM. BKM juga melakukan pengarahan dan pendampingan kepada KSM, misalnya mengenai proses kegiatan dalam peminjaman dana bergulir untuk usaha ekonomi produktif, pendampingan dalam penyusunan proposal peminjaman dana bergulir. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Waladi (anggota BKM Desa Dopleng) bahwa :

“ Setelah BKM terbentuk, maka kegiatan penyadaran dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap BKM dan KSM dilakukan oleh BKM dengan tetap dibantu oleh relawan yang masih aktif. BKM melakukan ceramah-ceramah, pengarahan kepada KSM....pengarahan mengenai proses peminjaman dana bergulir untuk modal usaha ekonomi produktif, pendampingan KSM pada waktu pembuatan proposal peminjaman dana....” (Wawancara, 11 Maret 2008).

Kegiatan tentang penyadaran dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap BKM dan KSM ini memang perlu, karena ada sebagian masyarakat yang tidak tahu apa itu BKM, misalnya Ibu Jumiye (Anggota KSM Maju Lancar), berikut penuturannya :

“ .....BKM itu apa to mbak...saya itu tidak begitu tahu apa itu BKM. Waktu itu saya cuma tahu kalau ada pertemuan warga dan disuruh untuk membentuk kelompok (KSM). Saya pun ikut dalam KSM kemudian melakukan kegiatan simpan pinjam, peminjaman dan penyeteroran angsurannya melalui ketua KSM, jadi saya tidak berhubungan langsung dengan BKM....” (Wawancara, 12 maret 2008).

Persepsi masyarakat dalam kegiatan penyadaran dan peningkatan kepedulian terhadap BKM dan KSM ini ditandai dengan kesediaan dan keterbukaan sikap masyarakat pada waktu kegiatan ini dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut memberi kesan bahwa rasa keingintahuan masyarakat sangat besar untuk memahami apa itu BKM dan KSM. Hal ini didukung pula oleh kejelasan para pelaksana program, baik faskel, BKM, maupun relawan dalam memberikan pengarahan-pengarahan. Berikut penuturan dari Bapak Badrus Sajuri (Anggota KSM Usaha Maju) bahwa :

“Dulu saya bersama anggota KSM yang lain diundang untuk datang ke rumah mas Saryono (Sekretaris BKM dan juga mantan relawan)...disana ada suatu kegiatan penyadaran masyarakat tentang pentingnya BKM dan KSM..Waktu itu hadir pula perwakilan dari BKM, faskel, dan relawan untuk memberikan pengarahan...BKM sangat jelas dalam memberikan pengarahan-pengarahan tersebut....” (Wawancara, 11 Maret 2008).

## **2. Pemanfaatan Dana P2KP bagi Masyarakat**

Pemanfaatan dana P2KP bagi masyarakat sasaran proyek, dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- 2.1.Pemanfaatan dana untuk kegiatan ekonomi (menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada);
- 2.2.Pemanfaatan dana untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik/lingkungan guna menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat;
- 2.3.Pemanfaatan dana untuk kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial masyarakat dalam berusaha.

## **2.1. Pemanfaatan dana untuk ekonomi**

Kegiatan peminjaman dana bergulir P2KP yang diberikan kepada KSM ini bukan merupakan bantuan modal usaha yang bersifat gratis atau hibah. Pinjaman bergulir ini harus dikembalikan kepada UPK berikut biaya finansial atau jasa (bunga) yang ditimbulkannya, untuk kemudian dikembangkan sebagai persediaan dana agar jangkauan pelayanan pinjaman kepada KSM makin meluas. Jadi dana yang bergulir pada tahap perguliran ini adalah hasil pelunasan dari KSM peminjam sebelumnya yang dijadikan sebagai sumber pinjaman (modal) untuk dipinjamkan kepada KSM yang lain, sehingga dana P2KP ini bisa dikembangkan secara kontinyu dan berkelanjutan.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur), Bapak Nurzaeni (Koordinator BKM Adil Makmur), dan Bapak Maryanto (Anggota BKM Adil Makmur) diperoleh informasi bahwa dana P2KP ini memang diperuntukkan bagi masyarakat tetapi tidak untuk keperluan konsumtif, melainkan untuk menciptakan usaha atau mengembangkan usaha yang telah ada. Dari pinjaman dana P2KP tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelolanya dengan baik, sehingga dana itu secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan diharapkan pula sedikit demi sedikit dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Dopleng, asalkan dana itu tidak dipakai untuk keperluan konsumtif, karena kalau cuma untuk konsumsi dana itu cepat habis dan tidak ada gunanya. Kemudian Bapak Utama Wardana (Faskel) dan Bapak Yuwono (Senior Faskel) menambahkan bahwa keberhasilan itu adalah sebuah proses, jadi tidak bisa begitu saja secara singkat dapat tercapai, tetapi

sedikit demi sedikit, misalnya mengenai peningkatan pendapatan atau perkembangan usaha kelompok sasaran setelah memperoleh pinjaman itu merupakan sebuah proses.

Sebagian besar masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dari adanya bantuan pinjaman bergulir ini, sejauh untuk mengurangi beban mereka dan mencukupi kebutuhan normatif saja. Kehadiran P2KP sangat membantu dalam mendomonasi sumbangan pendapatan mereka, ada perubahan keadaan menjadi lebih baik, misalnya dari yang dulunya nganggur kini mampu menjalankan usaha, dari yang dulunya buruh kini dapat membuka usaha sendiri walaupun kecil-kecilan. Tetapi untuk peningkatan kesejahteraan memang belum tercapai, baru sebatas mengurangi beban untuk tetap dapat *survive* dan mencukupi kebutuhan normatif saja. Karena peningkatan kesejahteraan itu terkait dengan banyak faktor, bukan hanya modal dan sumber daya manusia saja, tetapi juga terkait dengan faktor alam, pasar, dan sebagainya.

Di Desa Doplang, anggota KSM yang memafaatkan pinjaman modal P2KP lebih banyak mereka yang sudah mempunyai usaha lama. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa KSM yang berada di Desa Doplang berada pada tingkat pengembangan, ini berarti bahwa sebagian besar KSM tersebut sudah lama berusaha dan mempunyai pasar sendiri. Dengan adanya P2KP tersebut, anggota KSM sangat terbantu dalam hal permodalan.

Berikut ini akan peneliti sajikan persepsi dari masyarakat yang menerima dana pinjaman bergulir BLM-P2KP:

1. Bapak Romzani (05 Maret 2008) :

“Setuju sekali dengan adanya bantuan pinjaman bergulir P2KP ini karena dapat membantu permodalan dalam usaha . Waktu pertama kali mendapat pinjaman sebesar Rp. 500.000,-, waktu itu mengajukannya Rp. 1.000.000,- tapi ternyata batas maksimal peminjaman untuk tahap pertama adalah Rp. 500.000,-. Karena saya beserta anggota KSM saya tidak pernah menunggak dalam membayar angsuran maka pada tahap berikutnya saya memperoleh pinjaman lagi sebesar Rp. 1.000.000,-. Dana itu saya gunakan untuk tambahan modal usaha membikin rambak (kerupuk) bekerjasama dengan bapak saya yang kebetulan juga satu KSM dengan saya. Sudah bisa merasakan manfaatnya, keadaan usahanya sekarang lumayan berkembang, pendapatan ya meningkat mbak..tapi sedikit karena harga bahan baku juga mahal.”

2. Bapak Harjono (06 Maret 2008) :

“Setuju sekali dengan adanya P2KP dan merasa terbantu karena dapat menggunakannya untuk bantuan modal usaha. Dulunya saya cuma buruh, tapi setelah dapat pinjaman saya jualan sayur keliling. Sekarang hasilnya lumayan...pendapatan meningkat, usaha saya lancar, jumlah barang dagangan juga meningkat. Tahap pertama memperoleh pinjaman Rp. 400.000,- lalu yang kedua Rp. 900.000,-“.

3. Bapak Ahmad Munazi (06 Maret 2008) :

“Setuju sekali karena saya sangat membutuhkannya untuk modal. Pertama dapat pinjaman Rp. 300.000,- lalu yang kedua Rp. 900.000,-. Saya gunakan untuk bakulan warung kecil-kecilan bersama dengan istri saya. Bantuan tersebut dapat menenangkan hati orang hidup. Karena usaha saya lancar, dagangan laku maka saya bisa mengangsur. Sebenarnya saya sudah menjalankan usaha ini sejak sebelum adanya pinjaman P2KP tapi sempat berhenti karena harga bahan baku semakin mahal, sedangkan modal saya juga mepet. Setelah mendapat pinjaman dari P2KP ini saya bisa kembali melanjutkan usaha saya yang sempat berhenti mbak...Ya sudah ada peningkatan pendapatan dari pada dulu sebelum mendapat bantuan ini.”

4. Bapak Badrus Sajuri (11 Maret 2008) :

“Sebenarnya saya sangat setuju dengan adanya pinjaman modal ini karena dengan adanya program semacam itu membantu pengusaha tingkatan kelas bawah untuk penyediaan modal usaha yang akan ditekuni. Sebelum dana itu turun saya punya rencana ke depannya akan saya gunakan untuk membeli mesin jahit supaya usaha jahitan saya bisa berkembang. Tapi sebelum dana itu turun saya mengalami kecelakaan Mbak...dan selama 1 bulan saya tidak bisa bekerja jadi uang itu saya gunakan untuk berobat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang



pertama dapat pinjaman Rp. 500.000,- lalu yang kedua Rp. 1.000.000,-. Tapi pinjaman yang kedua itu saya alihkan pada teman saya yang sama-sama satu KSM karena saya takut tidak bisa mengarsurnya nanti.”

5. Ibu Suparni (Bapak Giyanto) (07 Maret 2008) :

“Setuju sekali, senang dan merasa terbantu. Saya sudah bisa merasakan manfaatnya, dulu itu suami saya cuma petani, pendapatannya sangat minim, tapi setelah dapat pinjaman P2KP saya bersama suami menggunakannya untuk ternak bebek. Dulu dapat pinjaman Rp. 500.000,- dan berikutnya Rp. 1.000.000,-. Usaha mengalami kemajuan, pertamanya cuma punya 50 ekor, sekarang sudah menjadi 100 ekor. Sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan hasil dari ternak bebek ini saya sisihkan untuk beli pupuk Mbak...jadi ternak bebeknya mengalami kemajuan, pekerjaan suami sebagai petani pun ya tetep jalan. Pokoknya saya sangat berterimakasih Mbak pada P2KP.”

6. Ibu Kasmini (Bapak Sarno) (07 Maret 2008) :

“Saya senang sekali dan merasa terbantu dengan adanya pinjaman modal dari P2KP ini karena dulu itu saya dan suami saya cuma buruh ‘nyitak’ bata merah di tempat tetangga saya, tapi setelah dapat pinjaman saya gunakan untuk membuka usaha banon (bata merah). Ya walaupun belum punya tenaga tapi setidaknya saya sudah bisa membuka usaha sendiri Mbak.... Sebenarnya sudah lumayan lancar usahanya. Tapi belum bisa mencukupi kebutuhan hidup, kalau pendapatan ya memang meningkat, lebih baik dari pada waktu belum dapat pinjaman. Pertama dapat pinjaman Rp. 450.000,-, sebenarnya tahap yang kedua ini masih ingin pinjam lagi tapi sudah tidak diperbolehkan oleh pihak BKM karena anggota KSM saya macet, banyak yang nunggak. KSM saya anggotanya 9 orang tapi yang rutin membayar angsuran cuma 4 orang, padahal saya termasuk yang rutin membayar dan tidak pernah terlambat mengangsur lho Mbak...”

7. Bapak Maryanto (04 Maret 2008):

“Senang sekali dengan adanya pinjaman P2KP ini, bisa membantu permodalan, bisa melatih kemandirian....supaya kita bisa membuka usaha baru atau mengembangkan usaha sebelumnya. Pertamanya saya dapat pinjaman Rp. 500.000,- kemudian setelah lunas dapat pinjaman lagi Rp. 1.000.000,- karena saya tidak pernah menunggak. Uang itu saya gunakan untuk mengembangkan usaha bata merah saya Mbak. Keadaan usahanya sekarang sudah mengalami perkembangan, jumlah bata yang dicetak bisa lebih banyak dan hasilnya pun meningkat...lebih baik sekarang lah dari pada dulu sebelum dapat pinjaman P2KP.

Bahkan sekarang saya sudah mampu membayar tenaga Mbak...kalau dulu khan belum punya tenaga.”

8. Bapak Markoni (08 Maret 2008) :

“Sebenarnya saya itu sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya pinjaman P2KP ini. Dulu itu saya dapat pinjaman Rp. 400.000,- lalu yang kedua Rp. 900.000,-. Saya gunakan untuk jualan siomay dan es buah keliling....sebenarnya sudah berjalan baik, sudah lumayan...pendapatannya ada peningkatan...tapi karena saya sudah tua dan jatuh sakit ya saya berhenti jualan karena sudah tidak mampu keliling lagi.”

9. Ibu Jami (08 Maret 2008) :

“Sangat senang dengan adanya program seperti ini. Terimakasih pada P2KP karena bisa membantu permodalan saya untuk berdagang. Pertamanya dapat pinjaman Rp. 400.000,- dan yang kedua Rp. 900.000,- saya gunakan untuk tambahan modal buka warung jajanan di kantin Madrasah...Hasilnya lumayan, ya walaupun sedikit-sedikit tapi sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.”

10. Bapak Alimun (09 Maret 2008) :

“Pekerjaan saya bikin kerajinan bambu. Dulu saya dapat pinjaman Rp. 500.000,- lalu yang berikutnya Rp. 1.000.000,-, uang itu saya gunakan untuk tambah modal ngembangin usaha bambu saya...lalu saya bekerjasama dengan adik dan teman saya yang juga satu KSM dengan saya untuk menggabungkan modal supaya usaha bambu kita ini lebih maju gitu Mbak... Keadaan usahanya sekarang sudah jauh lebih baik...bisa meningkatkan pendapatan.”

11. Bapak Bambang Suyono (09 Maret 2008) :

“Dari dulu saya sudah produksi rambak tapi keadaan usahanya belum sebaik ini Dek...setelah dapat pinjaman P2KP saya gunakan untuk tambahan modal usaha untuk beli bahan baku seperti gandum, pati, bawang...sehingga saya bisa memproduksi rambak lebih banyak lagi setiap harinya. Sampai saat ini usaha saya berjalan lancar...pasarannya juga sudah makin meluas...sudah mampu meningkatkan pendapatan.”

Dari beberapa keterangan masyarakat yang mendapat dana pinjaman P2KP ternyata tidak semua menggunakannya untuk modal usaha maupun mengembangkan usaha yang telah ada. Ada dari masyarakat yang

menggunakannya untuk keperluan konsumtif maupun untuk biaya rumah tangga, namun ini hanya sebagian kecil masyarakat, seperti misalnya Bapak Badrus yang menggunakannya untuk berobat dan biaya hidup sehari-hari karena kebetulan waktu dana itu turun dia sedang sakit dan tidak bisa bekerja. Sebetulnya dia sudah berencana akan menggunakan dana itu untuk membeli mesin jahit namun karena ada halangan akhirnya dia gunakan untuk keperluan konsumsi. Selain itu anggota KSM di Bentangan Tegal juga ada yang menggunakannya untuk keperluan konsumtif.

Berdasarkan wawancara dengan nara sumber, sebagian besar nara sumber mengatakan bahwa pinjaman modal P2KP mereka gunakan sebagai tambahan modal usaha atau menciptakan usaha baru. Bagi yang sebelumnya sudah menjalankan usaha, sebelum meminjam dana dari P2KP sebagian besar mereka menggunakan modal pribadi dan setelah mendapat pinjaman modal P2KP usaha mereka menjadi lebih maju. Khusus bagi mereka yang dulunya belum memiliki usaha, sebelumnya mereka hanya bekerja sebagai buruh, setelah mendapat pinjaman mereka membuka usaha sendiri. Misalnya Bapak Romzani, telah memanfaatkan dana P2KP untuk mengembangkan usaha rambaknya, dulunya dia hanya menggorengkan rambak orang lain, dengan bantuan modal dari P2KP dia bisa produksi rambak sendiri, mulai dari pembuatan sampai pemasarannya. Demikian juga dengan Bapak Bambang Suyono, Bapak Alimun, Ibu Jami yang sampai sekarang usahanya tetap berjalan meskipun belum terlalu besar karena jumlah dana pinjaman P2KP yang kecil mereka masih sulit untuk mengembangkan usahanya. Adapun Bapak Harjono menggunakannya untuk jual

sayur keliling, Bapak Sarno memanfaatkannya untuk membuka usaha bata merah, Bapak Amat Munazi memanfaatkannya untuk membuka warung bakulan. Demikian juga dengan Bapak Giyanto yang sampai sekarang masih mempunyai ternak bebek yang seperti diinginkannya.

Perkembangan jenis usaha yang dengan mempergunakan dana pinjaman P2KP semakin meningkat sehingga anggota KSM yang mempergunakan dana pinjaman P2KP untuk ekonomi produksi semakin meningkat pendapatannya, meskipun kendala masih tetap ada, namun secara umum dana pinjaman P2KP mampu meningkatkan produktifitas dan menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat Desa Dopleng.

Batas maksimal pinjaman pertama kali bagi setiap anggota KSM adalah Rp. 500.000,-, sedangkan batas maksimal pinjaman untuk tahap berikutnya adalah Rp. 2.000.000,-. Hal ini dimaksudkan sebagai proses pembelajaran masyarakat sekaligus memperkuat orientasi sasaran P2KP, yakni masyarakat miskin (KSM). Untuk ikut serta dalam kegiatan pinjaman dana bergulir ini, setiap KSM harus memenuhi syarat-syarat atau tata tertib yang ditentukan oleh BKM beserta UPK dan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota KSM, serta ditetapkan dalam pertemuan anggota dan ditandatangani oleh seluruh anggota KSM, Koordinator BKM beserta UPK. Adapun syarat tersebut antara lain :

- Setiap KSM terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 15 orang.
- Menyertakan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
- Mengajukan proposal usulan pinjaman usaha ke sekretariat BKM
- Proposal pinjaman diserahkan ke UPK dengan persetujuan BKM

- Setiap anggota wajib menggunakan dana pinjaman tersebut untuk kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan dan mutu kehidupan keluarga
- Setiap anggota wajib membayar angsuran pinjaman bergulir P2KP kepada bendahara kelompok dalam pertemuan rutin yang dilaksanakan 3 hari sebelum jatuh tempo angsuran dan menandatangani bukti pembayaran
- Setiap anggota wajib membayar angsuran sesuai dengan nominal pinjaman yang diterima beserta jasa pinjaman sebesar 1,5 % per bulan
- Jangka waktu peminjaman 12 bulan
- Bagi anggota yang karena suatu hal, tidak bisa mengangsur, maka yang lain wajib menanggung beban angsuran anggota tersebut dengan ketentuan yang bersangkutan harus menyerahkan barang sebagai jaminan minimal senilai dengan besarnya angsuran kepada pengurus yang telah ditunjuk dalam rapat anggota
- Apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati, ternyata anggota tidak bisa menebus barang jaminan tersebut, maka barang tersebut akan dilelang/dijual untuk membayar tunggakan angsuran yang bersangkutan.

Persepsi masyarakat terhadap syarat atau tata tertib yang diberlakukan tersebut sebagian besar mengatakan tidak keberatan dan menanggapi dengan positif. Terhadap bunga 1,5 % yang diterapkan dalam kegiatan modal bergulir ini pun kelompok sasaran tidak merasa keberatan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Bapak Sumardi (KSM Bareng Makaryo) berikut ini :

“Kalau saya ya tidak keberatan dengan peraturan tersebut, wong dulu peraturan itu dibuat juga atas dasar kesepakatan bersama antar anggota KSM...lalu kami (KSM) juga menandatangani kesepakatan tersebut. Mengenai bunga yang ditetapkan itu kalau bagi saya ya ringan Mbak, wong Cuma 1,5 % per bulan...” (Wawancara, 6 Maret 2008).

Hal senada juga dikemukakan oleh Ibu Warni (KSM Usaha Maju)

berikut ini :

“Peraturan itu saya rasa tidak memberatkan kok Mbak....kan juga sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat, misalnya dengan adanya kewajiban tanggung renteng tersebut. Terus kalau mengenai bunga 1,5 % itu saya tidak keberatan kok Mbak! Lagi pula jangka waktu pengembaliannya 12 bulan, termasuk ringan itu Mbak!” (Wawancara, 7 Maret 2008).

Dari ungkapan kedua warga di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dana P2KP ini adalah positif dan mereka menanggapinya dengan baik, hal ini bersumber pada nilai manfaat yang dapat dirasakan warga terhadap adanya pinjaman modal usaha tersebut.

## **2.2. Pemanfaatan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan / fisik.**

Alokasi bantuan P2KP di Desa Doplang selain untuk pinjaman modal usaha ekonomi produktif juga dialokasikan sebagai hibah fisik. Bantuan hibah tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik yang menunjang kelancaran aktivitas perekonomian warga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Untuk KSM Lingkungan ini, dananya merupakan dana hibah bagi setiap RT yang ada di Desa Doplang. Besarnya dana untuk masing-masing RT tidak sama, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dukuh (RT) sesuai dengan usulan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta volume

pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Nurzaeni, selaku Koordinator BKM Adil Makmur Desa Doplang berikut ini:

“ Bantuan P2KP yang dialokasikan untuk pembangunan sarana fisik di Desa Doplang ini besarnya alokasi dana yang diberikan pada masing-masing RT itu tidak sama, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dukuh (RT) sesuai dengan usulan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta volume pekerjaannya. Nanti diimbangi dengan swadaya masyarakat, jadi bantuan P2KP tersebut hanya sebagai stimulan bagi dukuh-dukuh untuk memperbaiki kualitas lingkungan mereka”. (Wawancara, 14 Maret 2008).

Dana yang dimanfaatkan untuk kegiatan fisik / lingkungan ini merupakan BLM sebesar Rp.81.555.000,- dan menyerap swadaya masyarakat sebesar Rp.150.757.350,-. Untuk lebih jelasnya mengenai penyaluran dana untuk pembangunan sarana fisik/lingkungan di Desa Doplang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Penyaluran Dana Untuk Pembangunan Sarana Fisik/Lingkungan di Desa Doplang (BLM I-III)**

No.	Nama KSM	Jenis Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Nilai Usulan Kegiatan (Rp)	BLM P2KP (Rp)	Swadaya (Rp)
1	Gotong Royong	Pembuatan MCK	04/01	1 unit	3.100.000	1.357.000	1.743.000
2	Guyub Rukun	Pembuatan MCK	03/01	1 unit	3.000.000	1.357.000	1.643.000
3	Sejahtera	Pembuatan MCK	02/01	1 unit	3.000.000	1.388.500	1.611.500
4	Maju Lancar	Pembuatan talud jalan	06/02	300 m <sup>3</sup>	14.155.200	5.835.750	8.319.450
5	Bentangan Tegal Murni	Pembuatan talud jalan	01/02	50 m <sup>3</sup>	2.843.750	1.365.000	1.478.750
6	Bentangan Asri	Pembuatan drainase	02/02	400 m <sup>3</sup>	11.000.000	4.141.500	6.858.500
7	Melati	Pembuatan Grill	05/02	1 unit m <sup>3</sup>	1.896.000	805.250	1.090.750
8	Nurul Iman	Pembuatan talud jalan	01/01	450 m <sup>3</sup>	30.276.400	8.000.000	22.276.400
9	Gemah Ripah	Pembuatan talud jalan	03/02	138,61 m <sup>3</sup>	20.028.000	7.900.000	12.128.000

10	Mulia Sejati	Pembuatan talud jalan	01/03	129,80 m <sup>3</sup>	17.709.000	7.200.000	10.509.000
11	Karya Bakti	Pembuatan talud jalan	02/03	115,35 m <sup>3</sup>	15.830.000	6.500.000	9.330.000
12	Kuncen Asri	Pembuatan MCK umum	06/03	1 unit	3.000.000	1.250.000	1.750.000
13	Jati Makmur	Penyemiran jalan	08/03	1.000 m <sup>2</sup>	33.630.000	7.900.000	25.730.000
14	Tawengan Jaya	Betonisasi jalan	05/03	500 m <sup>2</sup>	11.500.000	430.000	6.770.000
15	Wijoyo Kusumo	Pembuatan MCK	01/03	1 buah	3.000.000	1.250.000	1.750.000
16	Maju Lancar	Betonisasi jalan	05/03	200 m <sup>3</sup>	7.002.000	2.500.000	4.502.000
17	Madu Asri	Pembuatan talud jalan	05/02	57,75 m <sup>3</sup>	8.342.000	3.500.000	4.842.000
18	Windu Makmur	Pembuatan talud jalan	09/03	89,70 m <sup>3</sup>	12.000.000	4.825.000	7.175.000
19	Kuncen Makmur	Pembuatan talud jalan	06/03	58,49 m <sup>3</sup>	7.000.000	2.500.000	4.000.000
20	Bentangan asri	Pembuatan talud jalan	02/02	74,3 m <sup>3</sup>	10.000.000	3.000.000	7.000.000
21	Bentangan Legal Murni	Pembuatan talud jalan	01/02	85,50 m <sup>3</sup>	11.000.000	3.000.000	8.000.000
22	Tri Karya	Pembuatan MCK	03/03	1 unit	3.000.000	1.250.000	1.750.000
<b>TOTAL</b>					<b>232.312.350</b>	<b>81.555.000</b>	<b>150.757.350</b>

Sumber : Sekretariat BKM Adil Makmur Desa Doplang, 2008

Untuk KSM Lingkungan ini dana yang diberikan merupakan dana hibah, Namur nantinya harus ada pertanggungjawaban pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan fisik tersebut. Pembangunan fisik ini ditujukan untuk membvantu perkembangan ekonomi warga dan perbaikan kualitas lingkungan di Desa Doplang. Sebagian besar pemanfaatan pembanguna fisik ini adalah untuk pembuatan talud jalan yang sangat menunjang ekonomi produktif mengingat kondisi ruas-ruas jalan yang mengalami pengikisan akibat hujan sehingga sangat mengganggu aktivitas warga. Selain itu juga dibangun MCK umum mengingat kondisi sebagian masyarakat yang belum mempunyai sarana MCK yang sehat dan memadai, kemudian juga dibangun sarluran irrigáis/ drainase yang menunjang



pertanian masyarakat. Dana hibah untuk pembangunan fisik ini tidak ditujukan untuk pembangunan tempat ibadah, karena meskipun tempat ibadah itu sangat penting namun dirasa kurang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur Desa Doplang) bahwa :

“ Dana hibah pembangunan fisik ini ditujukan untuk menunjang perekonomian produktif masyarakat serta perbaikan koalitas lingkungan, misalnya pembuatan talud jalan, MCK, pemasangan Grill, betonisasi jalan, dan pembuatan saluran irigasi / drainase. Perlu diketahui bahwa dana hibah pembangunan fisik itu bukan ditujukan untuk pembangunan tempat ibadah karena meskipun tempat ibadah itu sangat penting namun dirasa kurang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif masyarakat setempat”. (Wawancara, 9 Maret 2008).

Pembangunan sarana dan prasarana fisik/lingkungan di Desa Doplang ini sangat bermanfaat bagi warga masyarakatnya, karena dengan pembangunan tersebut kondisi lingkungan menjadi semakin baik, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Suyono (Ketua KSM Gemah Ripah) berikut ini :

“...di sini, RT 03/02 ini...dengan adanya BLM P2KP ditambah dari swadaya masyarakat RT 03/02 kami laksanakan pembangunan talud jalan...dulu itu totalnya sekitar Rp.20.028.000,- dengan rincian Rp.7.900.000,- dari BLM P2KP, dan Rp.12.128.000,- dari swadaya masyarakat sini..Dulu sebelum ada P2KP semua jalan disini belum dibuat talud Mbak...tepi-tepi jalan itu mengikis jadi kalau musim penghujan airnya tidak dapat tertahan di bahu jalan sehingga membanjiri jalan dan ini sangat mengganggu aktivitas warga. Namun setelah ada dana P2KP serta ditambah swadaya dari masyarakat sendiri, hasilnya sekarang bisa dilihat di seluruh jalan utama kampung ini kondisinya sudah berubah semakin baik dan aktivitas warga juga jadi lancar”. (Wawancara, 17 Maret 2008).

Sejurus dengan hal tersebut, Bapak Ihsan Noor (Ketua KSM Sejahtera) mengungkapkan :

“Kami merasa senang sekali Mbak dengan adanya dana stimulant dari P2KP untuk pembangunan sarana fisik ini....hal ini sudah terlihat di kampung kami Mbak...Dulu sebelum ada P2KP ini jalan-jalan di sini belum dibuat talud sehingga kalau musim hujan malah berubah fungsi jadi genangan air. Selain itu berkat P2KP juga kami membangun MCK umum di kampung ini...sangat bermanfaat bagi kami soalnya dulu khan masih banyak warga sini yang belum punya sarana MCK”. (Wawancara, 17 Maret 2008).

Selain itu Bapak Maryanto (Anggota KSM Lestari) menyatakan bahwa :

“Berkat P2KP ini pembangunan desa khususnya untuk sarana fisik sudah terlihat...Kami sudah dapat merasakan manfaatnya. Bahkan dengan adanya dana stimulant dari P2KP ini kami merasa ringan karena dulu khan kampung kami ada pembangunan lewat swadaya murni, nah sekarang sudah ada dana stimulant dari P2KP berapapun itu khan tetap membantu meringankan Mbak...Masyarakat khan iuran swadaya menjadi lebih ringan, misalnya dulu per KK 50.000 sekarang jadi 20.000.” (Wawancara, 4 Maret 2008).

Selanjutnya Ibu Ndari (salah satu warga Dopleng) menyatakan bahwa :

“ Pemasangan grill di kampung kami ini bermanfaat sekali mbak sehingga kesehatan lingkungan menjadi lebih baik”. (Wawancara, 17 Maret 2008).

Bapak Suprayogi (Ketua KSM Bentangan Asri) menyatkan bahwa:

“ Pembuatan drainase ini sangat bermanfaat karena daerah sini sulit mendapatkan air untuk pengairan sawah sehingga dengan adanya pembuatan drainase ini dapt memperlancar saluran air untuk pengairan sawah”. (Wawancara, 18 Maret 2008).

Dari beberapa penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan atau fisik ini adalah positif, mereka merasa senang dan terbantu sehingga mereka memanfaatkan dana tersebut dengan baik dan kini sudah bisa merasakan manfaat dari pembangunan sarana fisik tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan P2KP khususnya untuk pembangunan fisik, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah bahwa masyarakat merupakan pemilik kegiatan dan keputusan-keputusan pelaksanaan serta pertanggungjawaban ada pada masyarakat setempat, sedangkan Faskel, BKM, aparat pemerintah setempat dan pelaku P2KP lainnya berperan sebagai fasilitator. Oleh karena itu masyarakat setempat mendapat prioritas utama untuk bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama penduduk yang miskin. Prinsip lainnya adalah pengadaan alat dapat dilakukan bersama-sama, Namun untuk pengadaan bahan atau material bangunan harus dilakukan sendiri oleh masing-masing KSM dengan cara mencari toko penjual material yang termurah dengan cara melihat harga dari alternatif tiga toko kemudian dipilih yang mempunyai harga yang termurah. Bila ada pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh penduduk local, maka pekerjaan tersebut dapat dikerjakan oleh pihak luar sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

Dari informasi yang dikumpulkan bahwa hampir seluruh kegiatan P2KP khususnya untuk pembangunan fisik dapat dilaksanakan oleh penduduk setempat. Begitu juga dengan pengadaan bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam pekerjaan proyek pada dasarnya sudah menggunakan bahan local. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan yang berasal dari toko dibeli oleh masing-masing KSM dengan didampingi oleh petugas UPL BKM Adil Makmur guna untuk menghindari timbulnya penyelewengan harga bahan dan alat.

Dalam membangun sarana fisik seluruh masyarakat di RT masing-masing saling bekerjasama secara gotong royong, suka rela dan tidak mendapatkan upah atau gaji karena memang tidak ada yang menggaji. Untuk

kelompok kerjanya dibagi-bagi dengan sistem giliran bergotong royong yang dibagi pada masing-masing warga RT, misalnya berdasarkan kelompok ronda atau sistem pembagian yang lain, jadi setiap kepala keluarga dan karang taruna dapat jatah kerja masing-masing. Sesuai dengan keterangan Bapak Hartono (salah satu warga Bendosari) bahwa :

“ ...dulu dalam membangun talud jalan dan MCK umum ini, kami bekerja suka rela dan tidak mendapat gaji karena memang tidak ada yang menggaji, tapi kami ikhlas Mbak...kami menjalaninya dengan senang. Di sini kerjanya dibagi-bagi dengan sistem giliran...dulu itu yang membagi Pak RT kok Mbak, jadi semua dapat jatah kerja masing-masing. Pengalaman yang saya dapat dari membangun talud dan MCK itu ya saya dapat pengalaman dan pengetahuan bisa melihat tukang bangunan memasang conbloc secara benar dan rapi”. (Wawancara, 18 Maret 2008).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Margo Utomo (salah satu warga Tawengan) bahwa :

“ ....dana itu di kampung kami digunakan untuk betonisasi jalan. Kerjanya ya giliran dibagi sesuai dengan kelompok ronda, jadi semuanya dapat jatah kerja. Walaupun kami tidak mendapat upah, tapi kami tetap senang kerja suka rela ini karena ini juga untuk kepentingan kami sendiri. Kami sadar bahwa proyek seperti ini sangat memerlukan partisipasi aktif diri warganya”. (Wawancara, 20 Maret 2008).

Menurut Bapak Kwat Widodo (salah satu warga Bendosari) mengungkapkan bahwa :

“ Pekerjaan saya sebagai tukang bangunan Mbak. Waktu di kampung kami punya rencana untuk membangun talud jalan dan MCK yang mengerjakan ya saya dibantu warga yang lainnya. Kebetulan juga di kampung kami ada tiga tukang bangunan jadi bisa lebih cepat mengerjakannya. Meskipun tidak dapat upah tapi saya tetap senang karena hasilnya juga untuk kami semua”. (Wawancara, 18 Maret 2008).

Dari keterangan beberapa warga di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan sarana fisik, masyarakat bekerja sama secara suka rela, saling

bergotong royong dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan tanpa mendapat upah. Tapi mereka tetap senang dan semangat karena hasilnya juga untuk kepentingan mereka dan mereka sadar bahwa proyek seperti ini memang sangat membutuhkan partisipasi aktif dari warganya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang memperoleh dana stimulan dari P2KP ini. Meskipun dana dari P2KP ini tidak terlalu banyak tapi berhasil menjadikan rangsangan bagi masyarakat untuk menambah dana itu dalam bentuk swadaya masyarakat sehingga pembangunan bisa terlaksana.

Kesan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pembangunan mulai tahap persiapan, pencairan dana sampai pada pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan baik dan hati-hati. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sudah dapat terselesaikan atau dengan kata lain selesai tepat waktu. Selanjutnya oleh UPL BKM Adil Makmur yaitu Bapak Agung Wahyu, dilaporkan bahwa swadaya masyarakat gotong royong dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana fisik cukup tinggi. Secara keseluruhan di Desa Dopleng ini swadaya masyarakatnya mencapai Rp. 150.757.350,-. Selain dalam bentuk uang, swadaya masyarakat juga terwujud dalam bentuk pemberian makanan untuk para tukang dan warga yang bergotong royong dalam pembangunan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kegiatan ini pembangunan ini berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Di dalam pengarahannya, Bapak Yuwono (Fasilitator Kelurahan) P2KP menekankan sekali lagi program P2KP ini sebagai pembelajaran masyarakat dan

mendayagunakan seluruh potensi masyarakat desa, maka kunci sukses adalah disiplin agar dipegang dan dijunjung tinggi. Apabila tidak, masyarakat akan rugi sendiri.

### **2.3. Pemanfaatan dana untuk kegiatan pelatihan**

Alokasi bantuan P2KP di Desa Doplang selain untuk pinjaman modal usaha ekonomi produktif dan hibah fisik juga dialokasikan untuk kegiatan sosial yang salah satunya berupa kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial masyarakat. Kegiatan pelatihan tersebut berupa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Doplang, khususnya masyarakat kurang mampu / gakin, sehingga masyarakat menjadi lebih terampil dan punya pengetahuan baru dalam menjalankan usahanya. Selain itu diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

Kegiatan Pelatihan ini mencakup tiga macam kegiatan :

1. Pelatihan Menjahit, selain memperoleh sertifikat dari lembaga pengajar, peserta juga punya peluang untuk mendirikan usaha jasa pelayanan jahitan dengan memanfaatkan pangsa pasar lokal. Sehingga tidak begitu terpengaruh dengan perubahan iklim ekonomi dunia usaha khususnya sektor produksi / industri.
2. Pelatihan Menyablon (plastik, kertas, dan kain), bertujuan untuk memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar yang berhubungan dengan cetak / sablon. Dan tidak diperlukan modal yang banyak untuk mendirikan usaha sablon / cetak ini.

3. Pelatihan Elektro, diharapkan peserta setelah memperoleh bekal kemampuan ini juga bisa mendirikan sebuah usaha jasa pelayanan service atau perbaikan barang-barang elektronik di lingkungannya.

Alasan dan pertimbangan kegiatan tersebut diusulkan adalah selain mayoritas penduduk menginginkannya, juga dengan alasan agar warga miskin mampu menciptakan peluang usaha sendiri dengan memanfaatkan lingkungan dan potensi ekonomi sekitar.

Kegiatan pelatihan di Desa Doplang ini memperoleh alokasi dana yang bersifat hibah sebesar Rp.9.700.000,- dari BLM I P2KP dan menyerap swadaya masyarakat sebesar Rp.3.590.500,-.. Adapun mengenai realisasi pemanfaatan BLM tahap I untuk kegiatan pelatihan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Pemanfaatan BLM Tahap I untuk Kegiatan Pelatihan**  
**Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali**

No	Jenis Usulan Kegiatan	Lokasi (RT/RW)	Nilai Usulan Kegiatan (Rp.)	BLM P2KP (Rp.)	Swadaya (Rp.)
1	Pelatihan Menjahit	03 / 01	7.793.500	5.817.500	1.976.000
2	Pelatihan Menyablon	01 / 02	2.417.500	1.578.000	839.500
3	Pelatihan Elektro	03 / 03	3.079.500	2.304.500	775.000
<b>JUMLAH</b>			<b>13.198.500</b>	<b>9.700.000</b>	<b>3.498.500</b>

*Sumber : Laporan Pelaksanaan BLM Tahap I, BKM Adil Makmur Desa Doplang.*

Lokasi pelatihan dibagi menjadi 3 tempat / RW agar lebih merata dan diprioritaskan pada wilayah RT (dan sekitarnya) yang aling banyak pesertanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemerosotan presentase kehadiran peserta pada sat pelaksanaan pelatihan. Mengenai hal tersebut, berikut penuturan Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur) :

“ Kegiatan pelatihan di Desa doplang ini tidak diadakan per RT Namun digabung menjadi satu yang ditujukan untuk seluruh peserta warga Desa Doplang. Untuk satu macam kegiatan pelatihan diadakan pada satu lokasi. Untuk pelatihan menjahit bertempat di RT 03/01 yang kebetulan waktu itu berlokasi di rumah saya untuk menghemat uang sewa dan kebetulan di rumah saya ada ruang yang tidak terpakai. Kemudian pelatihan menyablon itu di RT 01/02, sedangkan pelatihan elektro berlokasi di RT 03/03”. (wawancara, 9 Maret 2008).

Kegiatan pelatihan di Desa Doplang ini difasilitasi oleh UPK BKM Adil Makmur karena kegiatan ini menjadi tanggungjawab dari UPK dengan didampingi oleh Fasilitator Kelurahan. Kemudian mengenai kepanitiaannya, UPK membentuk satu KSM pelatihan yang bernama KSM Ajar Makaryo yang berfungsi sebagai panitia yang menangani semua kegiatan pelatihan. KSM ini juga diharapkan dapat mengkoordinasikan dalam pemilihan pengadaan pelatihan dan pelatih yang diminati oleh mayoritas penduduknya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Nurzaeni (Koordinator BKM Adil Makmur) :

“ ...dana P2KP untuk kegiatan pelatihan ini memang merupakan dana hibah supaya dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengadakan pelatihan yang diminati oleh mayoritas penduduknya”. (Wawancara, 14 Maret 2008).

Setelah dana hibah untuk KSM Pelatihan ini cair, langkah seterusnya diserahkan pada masyarakat itu sendiri untuk mengadakan pelatihan sesuai apa yang diinginkan oleh mayoritas masyarakatnya. Meskipun dana tersebut bersifat hibah tapi setiap pelaksanaan kegiatan seharusnya ada pertanggungjawaban dari KSM yang kemudian dilaporkan ke BKM sebagai organisasi yang mengurus P2KP. Hal tersebut sudah sering dihimbau oleh BKM kepada KSM pelatihan. Hal ini dijelaskan oleh oleh Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Mkmur) bahwa :

“..kami sudah sering menghimbau pada KSM pelatihan dan KSM pembangunan fisik, meskipun dana itu bersifat hibah namunharus ada



pertanggungjawaban dari KSM itu keada BKM dalam pelaksanaan setiap kegiatan sebagai bukti bahwa kegiatan itu benar-benar dilaksanakan”. (Wawancara, 9 Maret 2008).

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari 2006 dan berakhir pada tanggal 21 Maret 2006. Adapun mengenai rincian waktu pelaksanaan dan jumlah penerima manfaatnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Waktu Pelaksanaan dan Jumlah Penerima Manfaat**  
**Kegiatan Pelatihan**

No.	Nama Kegiatan	Pelaksanaan		Penerima Manfaat			Trainer (Pelatih)
		Mulai	Selesai	L	P	Total	
1	Pelatihan Menjahit	20-02-2006	11-04-2006	-	26	26	LPK Mandiri-Teras
2	Pelatihan Menyablon	23-02-2006	23-03-2006	23	-	23	DSA Adv.
3	Pelatihan Elektro	24-02-2006	21-03-2006	20	-	20	Mojo Elkt.
JUMLAH				43	26	69	

*Sumber : Laporan Pelaksanaan BLM Tahap I, BKM Adil Makmur Desa Dopleng.*

Pelatihan menjahit dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 11 April 2006 (sebanyak 14 kali pertemuan) dengan durasi waktu 2,5 jam setiap pertemuannya (pukul 14.00 WIB – 16.30 WIB). Untuk pelatihnya berasal dari LPK Mandiri, yang merupakan sebuah LPK yang sudah cukup ternama di Boyolali. Kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta yang semuanya adalah perempuan. Semula pesertanya berjumlah 20 peserta kemudian ada penambahan peserta menjadi 26 peserta. Biaya penambahan diambilkan dari anggaran biaya pelatihan menyablon yang ternyata mengalami penyusutan peserta, yang semula 40 peserta menjadi 23 peserta. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur) bahwa :

“ Ada penambahan peserta menjahit, yang semula 20 menjadi 26 peserta, sehingga panitia mempunyai alternatif untuk mengambalikan biaya penambahan dari anggaran biaya pelatihan menyablon karena kebetulan mengalami penyusutan peserta sehingga anggarannya bisa kita fungsikan untuk biaya penambahan peserta pelatihan menjahit”. (Wawancara, 9 Maret 2008).

Pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit memberi kesan bahwa para peserta mempunyai persepsi yang cukup baik dalam menanggapi program ini. Mereka kelihatan sangat antusias dan memberikan respon yang baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan terjadi penambahan peserta karena sebelumnya mereka tidak terdaftar namun sangat ingin mengikuti pelatihan tersebut. Seperti misalnya Ibu Sutini, salah satu warga Dukuh Karangmojo. Ia seorang Ibu Rumah tangga yang ngotot mengikuti pelatihan padahal ia tidak terdaftar sebelumnya. Berikut penuturan Ibu Sutini (salah satu peserta pelatihan menjahit) :

“ Saya dulu itu tidak tahu kalau ada pelatihan menjahit dari P2KP karena saya tidak didaftar, kemudian setelah beberapa kali pertemuan saya dikasih tau tetangga kalau ada pelatihan karena kebetulan kan latihannya diadakan di kampung ini mbak....Akhirnya saya mendesak kepada Pak Saryono agar saya diijinkan untuk mengikuti pelatihan tersebut”. (Wawancara, 07 Maret 2008).

Mengenai hal tersebut Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur) mengatakan bahwa :

“ Saya lihat Ibu Sutini ini sangat antusias untuk mengikuti pelatihan...padahal waktu itu jumlah pesertanya sudah penuh, tapi atas kebijakan BKM maka kami mengijinkan Ibu sutini untuk mengikutinya, kebetulan juga ternyata ada sisa anggaran dari pelatihan menyablon itu jadi tiak ada salahnya kalau kami fungsikan untuk menambah peserta pelatihan menjahit”. (Wawancara, 9 Maret 2008).

Mengenai persepsinya terhadap kegiatan pelatihan menjahit ini Ibu Sutini mengungkapkan bahwa :

“ Saya senang sekali mengikuti pelatihan ini dan sekarang sudah mempraktekkannya untuk usaha kecil-kecilan di rumah membuka jasa pelayanan menjahit dan permak mbak...ya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa menambah uang belanja....Saya pengennya diadakan pelatihan lagi supaya bisa lebih mahir gitu mbak...Dulu itu waktu mengikuti pelatihan malah saya tidak begitu jelas karena materinya banyak sekali, tapi sesampainya di rumah saya pelajari lagi dengan melihat buku modul yang diberikan oleh tim pelatihnya...”. (Wawancara, 7 Maret 2008).

Selanjutnya, Ibu Sri Mulatsih (salah satu warga Bentangan Tegal yang juga peserta pelatihan menjahit) mengemukakan bahwa :

“Saya setuju sekali dengan diadakannya pelatihan menjahit ini karena kita jadi punya pengalaman tentang jahit-menjahit, sehingga kalau nanti ahli khan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga bisa mandiri dan tidak menggantungkan pada orang lain jadi bisa mengurangi jumlah pengangguran juga to mbak...Tapi terus terang saat ini secara pribadi saya belum mewujudkannya untuk membuka usaha jahitan mbak...karena saya keterima kerja di pabrik handuk, tapi ya lumayan lah mbak dengan mengikuti pelatihan menjahit itu saya dapat pengetahuan baru tentang jahit menjahit.” (Wawancara, 6 Maret 2008).

Selain itu Ibu Dwi Lestari (peserta pelatihan menjahit dari Bendosari) menyatakan bahwa :

“Dulu saya mengikuti pelatihan menjahit ya senang sekali mbak...dari yang tidak tahu menahu soal jahit menjahit jadi tahu...tapi saya belum mempraktekkannya untuk usaha karena tidak punya mesin jahitnya...”. (Wawancara, 6 Maret 2008).

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan masyarakat mempunyai persepsi yang baik terhadap adanya pelatihan menjahit ini. Namun tingkat kemanfaatannya baru sebatas menambah pengetahuan tentang jahit menjahit, sedangkan untuk mempraktekkannya dalam bentuk usaha jasa

pelayanan jahit dirasa masih sangat jarang karena selain keterbatasan modal juga disebabkan karena mereka lebih memilih untuk berprofesi lain.

Dalam rangka menyalurkan tenaga kerja, BKM Adil Makmur sebenarnya sudah melaksanakan channelling dengan pihak luar dalam hal ini melakukan kerja sama dengan PT. Ambassador, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi. BKM dan pihak trainer (LPK Mandiri) telah mengirimkan peserta pelatihannya untuk mengikuti tes penerimaan karyawan di PT tersebut, Namun dari Desa Dopleng tidak ada yang lolos. Kemudian BKM mengambil inisiatif untuk membuat kelompok (KSM Aneka Konveksi) yang anggotanya terdiri dari para peserta pelatihan menjahit yang dianggap paling aktif. KSM itu memperoleh pinjaman modal bergulir P2KP untuk membuka usaha konveksi dalam bentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur) bahwa :

“BKM sebenarnya sudah melakukan upaya channelling dengan PT. Ambassador, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi. Namun peserta dari Desa Dopleng tidak ada yang lolos seleksi. Kemudian BKM mengambil inisiatif untuk membuat kelompok (KSM Aneka Konveksi). KSM itu memperoleh pinjaman modal bergulir P2KP untuk membuka usaha konveksi dalam bentuk KUBE”. (Wawancara, 9 Maret 2008).

Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Sri Mulatsih (Ketua KSM Aneka Konveksi) mengemukakan bahwa :

“Memang waktu itu dibentuk KSM Aneka Konveksi yang merupakan bentuk KUBE...pada awalnya usaha kami jalan, sudah sempat mendapat borongan untuk membuat pakaian juga tapi sekarang macet karena tempatnya itu di rumahnya Bu Sutini Karangmojo...jauh mbak dan kita juga susah ngumpulnya. Selain itu modalnya juga kecil sekali”. (Wawancara, 6 Maret 2008).

Selain menjahit juga diadakan pelatihan menyablon, baik kertas, plastik maupun kertas. Pelatihan ini diadakan sebanyak 9 kali pertemuan dengan durasi waktu 2,5 jam untuk masing-masing pertemuan dengan menghadirkan pelatih dari DSA Advertising. Pelatihan ini diikuti oleh 23 peserta. Pada awalnya ada 40 peserta namun mengalami penyusutan karena sebagian peserta adalah para pemuda yang masih duduk di bangku SMA sehingga jika latihannya bukan hari minggu banyak dari mereka yang tidak bisa hadir.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaksanaan pelatihan ini berjalan lancar, peserta cepat memahami materi. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan ini cukup baik dan menanggapi dengan respon yang baik pula. Berikut ini pendapat dari Robari (peserta pelatihan menyablon dari Karangwuni) :

“Saya sangat senang dengan diadakannya pelatihan menyablon ini karena dengan begitu saya jadi tahu bagaimana teknik menyablon itu, sehingga saya bisa membuka usaha kecil-kecilan dengan menerima pesanan sablon...ya sablon untuk stiker, kaos, amplop, undangan gitu..sampai sekarang usaha saya masih jalan dan Alhamdulillah keuntungannya lumayan...”. (Wawancara, 8 Maret 2008).

Pelatihan menyablon ini telah memperlihatkan kemanfaatannya bagi sebagian besar peserta latihan. Dari beberapa peserta tersebut bergabung menjadi 1 KSM yang bernama KSM Ajar Makaryo. KSM ini tidak melakukan peminjaman modal bergulir dari P2KP tetapi barang-barang yang digunakan waktu pelatihan seperti screen, cat dihibahkan kepada KSM tersebut. Sampai sekarang usahanya masih tetap jalan dan bahkan bisa melakukan channelling sendiri ke dinas-dinas di Kabupaten Boyolali. Selain itu KSM ini dipercaya untuk menjadi pembuat berita sekaligus pencetak untuk buletin “Sahabat Rakyat” yang akan didistribusikan ke dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Boyolali. Bahkan

sekarang ini KSM tersebut lebih dari sekedar sablon, tapi mereka juga menyetting sendiri, materi mereka sendiri yang membuat kemudian melakukan kerjasama dengan percetakan-percetakan sebagai upaya kemitraan. Berkat kerjasama dengan percetakan tersebut KSM Ajar Makaryo dipercaya juga untuk mencetak buku “Pembukuan UPK” se Kecamatan Teras. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur) bahwa :

“Pelatihan menyablon ini sangat bermanfaat bagi para peserta latihan karena mereka bisa membuka usaha menyablon..seperti kita ketahui bahwa saat ini permintaan masyarakat dalam bidang tersebut semakin banyak. Ini merupakan sebuah peluang bagi mereka. Untuk KSM Ajar Makaryo sampai sekarang usahanya dalam masih berjalan bahkan semakin maju dengan melakukan channelling pada pihak luar dan bekerjasama dengan percetakan sehingga dipercaya untuk mencetak buku Pembukuan UPK se Kecamatan Teras serta sebagai pembuat berita sekaligus pencetak buletin Sahabat Rakyat.” (Wawancara, 9 Maret 2008).

Selain pelatihan menjahit dan menyablon, juga ada pelatihan elektro yang diikuti oleh 20 peserta. Pelatihan ini diadakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan durasi 2,5 jam setiap pertemuannya, dengan menghadirkan pelatih dari Mojo Elektronik. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini memberi kesan bahwa para peserta sangat antusias dan menaggapinya dengan respon ingá positif. Namun karena membutuhkan modal yang cukup besar maka kemanfaatan kegiatan pelatihan ini baru sebatas menambah pengetahuan di bidang service elektro saja, sedangkan untuk mengembangkannya dalam bentuk usaha jasa layanan service elektro belum ada sampai sekarang. Berikut penuturan Bapak Ainur Rofiq (peserta pelatihan elektro dari Bendosari) :

“Sebenarnya saya senang sekali dengan adanya pelatihan service elektro ini mbak...saya jadi tahu tentang service elektro yang sebelumnya itu saya sama sekali tidak tahu. Tapi untuk menjalankannya untuk usaha

belum mbak....tapi paling tidak berkat adanya pelatihan itu sekarang kalau TV atau radio di rumah saya rusak saya bisa membetulkannya sendiri....” (Wawancara, 08 maret 2008).

## **B. Partisipasi Masyarakat dalam P2KP**

Pemberdayaan sebagai paradigma baru dalam pembangunan, dikatakan terlaksana dengan baik apabila masyarakat ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Proyek P2KP sebagai salah satu realisasi dari paradigma ini, menjadikan peran masyarakat sebagai hal yang penting, oleh karena itu partisipasi masyarakat seutuhnya dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan sangatlah diperlukan. Respon baik masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan P2KP sangat diperlukan agar pelaksanaan proyek ini tepat sasaran.

### **B.1. Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi dan Perencanaan Kegiatan P2KP**

Dalam tahap sosialisasi dan perencanaan diperlukan keterlibatan masyarakat yang lebih besar, karena dalam tahap ini masyarakat diajak untuk membuat suatu keputusan yang menyangkut kebutuhan hidup mereka sendiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki, sehingga timbul kesadaran dan tanggungjawab untuk turut menyukseskan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap sosialisasi dan perencanaan ini tergolong cukup baik, dari jumlah presensi yang hadir dalam rapat sosialisasi awal P2KP di tingkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2005 tercatat sebanyak 85 peserta hadir. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat

pada tahap sosialisasi tergolong cukup baik. Bentuk partisipasi dari masyarakat dalam tahap ini dapat dilihat dari kehadirannya untuk memenuhi undangan dalam sosialisasi P2KP baik di tingkat desa maupun di tingkat basis (RT / RW). Segala hal yang belum dipahami mereka tanyakan pada forum tersebut sehingga dapat menjadi bekal untuk memasyarakatkan P2KP kepada kelompoknya (KSMnya) nantinya.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap ini juga bisa dilihat dari partisipasinya di dalam mengajukan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayahnya, masyarakat juga aktif menyumbangkan pikiran dan masukan dalam membuat jadwal musyawarah untuk kegiatan pembangunan fisik apa yang akan dilaksanakan.

Partisipasi yang lain adalah keaktifan para warga masyarakat dalam membuat Program Jangka Menengah Pronangkis sebagai usulan prioritas pembangunan fisik/lingkungan dan kegiatan ekonomi produktif, yang nantinya menjadi usulan prioritas dusun. Bentuk partisipasi dalam forum Musyawarah Desa ini setiap wakil kelompok dari dusun menyampaikan aspirasi dusunnya. Ini menandakan partisipasi warga masyarakat yang baik dalam tahap perencanaan ini. Selain kehadirannya di dalam Musdes, warga masyarakatpun aktif mengajukan usul maupun pertimbangan di dalam Musdes. Warga masyarakat yang lain yang tidak mengajukan usulan atau yang usulnya tidak diterima peserta yang lain ikut menyetujui dan mendukung keputusan musyawarah atas dasar kepentingan bersama.



Selain itu juga bisa dilihat dari kesediaannya untuk melaksanakan pemilu BKM secara bebas dan transparan sehingga bisa terbentuk kepengurusan BKM Adil Makmur yang benar-benar berasal dari masyarakat dan dapat mengemban aspirasi masyarakat bawah. Pada pemilihan BKM di tingkat RW yang serentak dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2005, secara umum masyarakat menunjukkan partisipasinya dengan memilih calon-calon sesuai hati nurani mereka. Demikian pula ketika dilaksanakan pemilu BKM di tingkat desa tanggal 13 Agustus 2005 yang merupakan kelanjutan dari pemilu BKM tingkat basis. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 69 peserta.

Setelah BKM terpilih, maka dibentuk KSM kemudian membentuk proposal dan peraturan masing-masing KSM. Setelah KSM terbentuk maka ada perwakilan dua orang dari tiap-tiap KSM, yaitu ketua dan anggotanya untuk hadir di Balai desa untuk mengadakan pertemuan. Sebagian besar masyarakat dan perwakilan KSM menghadirinya sehingga nanti hasil dari pertemuan itu dapat dijadikan bekal informasi untuk *digethok tularkan* kepada masing-masing anggota KSMnya.

Anggota KSM sebelum menerima bantuan pinjaman dari P2KP terlebih dahulu harus merencanakan kegiatan melalui pembuatan proposal kegiatan. Proposal kegiatan yang diajukan merupakan wujud nyata dari BKM yang secara langsung ikut mendorong warga Desa untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut cukup baik, hal ini terlihat dari respon dan antusiasme warga untuk

mengikuti kegiatan pembuatan proposal itu. Hal tersebut sesuai dengan wawancara Bapak Saryono selaku Sekretaris BKM Adil Makmur sebagai berikut :

“Dalam kegiatan perencanaan dan sosialisasi P2KP, masyarakat menunjukkan partisipasinya dengan baik, sehingga dapat kami katakan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap ini tergolong cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tanggapan atau respon warga menerima kehadiran program P2KP di wilayahnya, mereka terlihat sangat antusias dan mengikuti setiap kegiatan yang diadakan proyek ini.” (Wawancara, 14 Maret 2008).

Dari petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada tahap sosialisasi dan perencanan program dapat dikategorikan cukup baik, sebagian besar masyarakat menanggapi dengan baik. Beberapa respon dan peran serta masyarakat tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat menanggapi keberadaan proyek P2KP ini dengan baik.

## **B.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan P2KP**

Partisipasi masyarakat Desa Dopleng dalam program P2KP dapat dikategorikan cukup aktif. Hal ini tampak pada keberhasilan BKM Adil Makmur Desa Dopleng mencatatkan diri sebagai BKM pertama yang memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM) dari KPKN untuk wilayah Kabupaten Boyolali (Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus BKM Periode tahun 2006/2007). Disamping itu juga BKM Adil Makmur merupakan BKM yang pertama kali merealisasikan pencairan bantuan dana kredit ke KSM, sehingga proses pencairannya harus dihadiri langsung oleh Pihak Penanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam hal ini Kepala BAPPEDA beserta jajarannya. Keberhasilan tersebut tidak akan pernah diraih oleh BKM Adil

Makmur Desa Doplang, apabila kerja keras pengurus tidak didukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dimaksud adalah berupa peran aktif masyarakat dalam mewujudkan atau membentuk kelembagaan BKM sebagai syarat utama penetapan lokasi menjadi Desa/kelurahan target penerima bantuan P2KP. Hanya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (yaitu sekitar 1,5 bulan) seluruh komponen masyarakat Desa Doplang berhasil membentuk kepengurusan BKM, dalam suatu musyawarah warga Desa Doplang dengan acara tunggal rapat pembentukan dan pemilihan pengurus BKM pada tanggal 11 Agustus 2005 (Berita Acara Pembentukan BKM, 2005).

Peran masyarakat khususnya warga Desa Doplang yang tergolong pada keluarga kurang mampu sangat antusias merespon program BKM, terutama dalam mengajukan usulan kredit sebagai KSM. Partisipasi masyarakat tersebut bukan sesuatu yang dianggap sudah wajar adanya, sebab seseorang untuk mengajukan suatu usulan kredit (dalam P2KP) disyaratkan untuk terlebih dahulu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta membuat/mengisi Formulir Usulan Kredit yang menuntut suatu kecermatan dan keakuratan, tutamnya menyangkut rincian kebutuhan, modal swadaya awal, perkiraan pemasaran, dan lain sebagainya. Mengingat tingkat pengetahuan dari warga masyarakat yang tergolong kurang mampu relatif masih rendah, maka keharusan membuat usulan yang istilah lainnya adalah *proposal* membuat masyarakat harus berupaya lebih keras lagi seperti misalnya berkonsultasi dengan pengurus BKM atau dengan Fasilitator Kelurahan (Faskel). Walaupun menurut beberapa kalangan masyarakat adanya keharusan menyusun proposal bantuan kredit adalah sesuatu yang biasa,

namun bagi masyarakat kalangan bawah yang tergolong miskin hal itu menjadi luar biasa dan sangat memberatkan. Ditambah lagi pada masa-masa awal pelaksanaan P2KP, di seluruh Indonesia umumnya dan di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali khususnya, Form-form yang harus diisi oleh KSM calon penerima bantuan masih belum baku dan sering berubah-ubah. Dari keadaan yang demikian itu maka banyak KSM yang mengalami kebingungan dan tidak sudi lagi memperbaiki proposalnya, sehingga mereka tidak jadi mengajukan usulan bantuan kredit dari P2KP. Namun hal ini dapat diatasi melalui pendekatan yang dilakukan oleh pihak BKM dan Faskel yang selalu siap mendampingi dan memberikan pengarahan kepada KSM-KSM yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP bisa dibilang cukup baik. Hal ini terlihat dari antusiasme warga untuk mengikuti program P2KP di Desa Doplang sangat tinggi, walaupun kemampuan BKM untuk memenuhi keinginan para KSM relatif terbatas. Ini terlihat dalam antrian proposal yang sudah masuk di BKM yang berangsur-angsur dapat direalisasikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun terdapat hambatan yang dirasakan oleh masyarakat, namun toh pada akhirnya mereka bersedia berpartisipasi untuk mengikuti program yang disediakan oleh proyek, selain itu para anggota KSM juga berpartisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh BKM. Dengan demikian masyarakat akan aktif berperan dalam suatu program pembangunan, apabila mereka dapat merasakan sendiri dan terbukti bisa menguntungkan dirinya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KP juga terlihat dari kesadarannya untuk menggunakan pinjaman modal usaha yang diterimanya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suparni (Istri Bapak Giyanto anggota KSM Sukun Jaya) berikut ini :

“Pinjaman dari P2KP itu saya bersama suami menggunakannya untuk ternak bebek. Dulu dapat pinjaman Rp. 500.000,- dan berikutnya Rp. 1.000.000,-. Usaha mengalami kemajuan, pertamanya cuma punya 50 ekor, sekarang sudah menjadi 100 ekor.” (Wawancara, 7 Maret 2008).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Maryanto (Anggota KSM Lestari) berikut ini :

“Pertamanya saya dapat pinjaman Rp. 500.000,- kemudian setelah lunas dapat pinjaman lagi Rp. 1.000.000,- karena saya tidak pernah menunggak. Uang itu saya gunakan untuk mengembangkan usaha bata merah saya Mbak. Keadaan usahanya sekarang sudah mengalami perkembangan, jumlah bata yang dicetak bisa lebih banyak dan hasilnya pun meningkat...lebih baik sekarang lah dari pada dulu sebelum dapat pinjaman P2KP. Bahkan sekarang saya sudah mampu membayar tenaga Mbak...kalau dulu khan belum punya tenaga.” (Wawancara, 4 Maret 2008).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Harjono (Anggota KSM Usaha Maju) sebagai berikut :

“ Dulunya saya ini cuma buruh tidak tetap mbak, tapi dengan adanya pinjaman dari P2KP itu saya lalu menggunakannya untuk modal jualan sayur keliling.....ya lumayanlah mbak sampai sekarang usaha saya masih lancar-lancar saja.” (Wawancara, 6 Maret 2008).

Dari ungkapan ketiga warga penerima pinjaman di atas terlihat bahwa pinjaman modal usaha yang diterima mereka gunakan untuk menambah modal usaha yang telah dirintis maupun untuk menciptakan usaha baru. Dari segi perkembangan usahanya ada perbedaan antara pemanfaat yang satu dengan yang

lain, ada yang mengalami kemajuan, ada pula yang tidak. Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok sasaran memiliki daya tanggap yang positif terhadap pinjaman tersebut untuk melakukan kegiatan usaha, meskipun dengan perkembangan usaha yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Namun, ada pula sebagian kecil kelompok sasaran yang menanggapinya secara negatif pinjaman modal usaha yang diterimanya, artinya pinjaman yang diterimanya tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, tetapi hanya digunakan untuk konsumsi karena dirasakan tidak cukup untuk mengembangkan usaha, atau mungkin juga karena saat pinjaman itu diterimanya, ia sedang membutuhkannya untuk keperluan lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Badrus Sajuri (Anggota KSM Usaha Maju) berikut ini :

“Sebelum dana itu turun saya punya rencana ke depannya akan saya gunakan untuk membeli mesin jahit supaya usaha jahitan saya bisa berkembang. Tapi sebelum dana itu turun saya mengalami kecelakaan Mbak...dan selama 1 bulan saya tidak bisa bekerja jadi uang itu saya gunakan untuk berobat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang pertama dapat pinjaman Rp. 500.000,- lalu yang kedua Rp. 1.000.000,-. Tapi pinjaman yang kedua itu saya alihkan pada teman saya yang sama-sama satu KSM karena saya takut tidak bisa mengarsurnya nanti.” (Wawancara, 11 Maret 2008).

Dalam pelaksanaan P2KP di Desa Dopleng terlihat tingginya partisipasi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Hal ini ditunjukkan dengan semangat gotong royong warga untuk mengerjakan pelaksanaan pemnangunan sarana dan prasarana fisik di pedukuhan-pedukuhannya sendiri walaupun tidak ada yang menggaji ataupun memberi upah mereka tetap bersemangat dan sukarela dalam melaksanakan proyek tersebut. Bagi warg Desa

Doplang, lewat RTnya masing-masing dijadwalkan untuk ikut kerja bakti secara bergiliran dan bergantian tanpa memperoleh upah. Mereka semua menyadari bahwa partisipasi mereka sangat dibutuhkan karena ini menyangkut kebutuhan mereka sendiri dan yang memanfaatkan sarana yang akan dibangun tersebut juga mereka sendiri, sehingga mereka secara aktif bergotong royong melaksanakan pembangunan fisik di lingkungannya masing-masing.

Selain itu hibah fisik P2KP mampu menjadi stimulan bagi warga Doplang untuk menghimpun swadaya masyarakat di pedukuhan masing-masing. Swadaya masyarakat di Desa Doplang ini, selain dalam bentuk dana juga berbentuk makanan untuk para tukang dan warga yang bergotong royong dan sebagainya. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Saryono selaku Sekretaris BKM adil Makmur Desa Doplang berikut ini :

“ Dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan / fisik ini terlihat tingginya partisipasi warga dalam bentuk gotong royong serta terhimpunnya swadaya masyarakat, baik dalam bentuk dana maupun makanan dari warga pedukuhan-pedukuhan untuk memperbaiki kondisi lingkungannya. Ini berarti P2KP hanya pancingan saja, selebihnya itu dari warga sendiri.....” (Wawancara, 15 Maret 2008).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Nurzaeni selaku Koordinator BKM adil Makmur, sebagai berikut :

“ Pembangunan fisik yang mempergunakan dana hibah P2KP hanya bersifat stimulan saja, selebihnya warga di maing-masing pedukuhan yang berswadaya untuk memperbaiki prasarana dan sarana dasar lingkungannya. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik dapat dikategorikan tinggi.” (Wawancara, 14 Maret 2008).

Dalam pelaksanaan P2KP di desa Doplang untuk kegiatan fisik mengalokasikan dana BLM sebesar Rp.81.555.000,- serta mampu menyerap dana swadaya masyarakat sebesar Rp.150.757.350,-.

Hal yang sama juga terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sosial yang meliputi bantuan kambing bergulir, pemeriksaan kesehatan gratis, pasar murah, dan bantuan gizi balita. Dalam kegiatan tersebut terlihat antusiasme warga untuk turut serta mengikutinya. Khusus untuk kegiatan kambing bergulir, berikut pernyataan Bapak Mitro Sudarmo (pemanfaat kambing bergulir dari RT 02/01) :

“ Saya senang sekali waktu itu ada petugas yang datang kerumah memberitahukan bahwa saya mamperoleh kambing bergulir dari P2KP gitu mbak....ya saya langsung mau....saya rawat sampai sekarang sudah punya dua anak.” (Wawancara, 16 Maret 2008).

Dalam kegiatan pelatihan, partisipasi masyarakatnya dapat dikatakan cukup baik. Bahkan karena banyaknya formulir pendaftaran yang masuk untuk mengikuti pelatihan, mengharuskan BKM untuk mengeliminir sebagian masyarakat. Untuk Pelatihan sablon, rata-rata peserta yang hadir adalah 26 orang, pelatihan servis elektro sebanyak 20 peserta, dan pelatihan menjahit rata-rata peserta yang hadir adalah 26 peserta. Masyarakat peserta kursus tergolong rajin hadir dalam setiap pelatihan. Bahkan untuk pelatihan menjahit ada penambahan peserta, yang semula 20 peserta menjadi 26 peserta, hal ini terjadi karena banyaknya warga, khususnya wanita yang ingin sekali mengikuti pelatihan menjahit. Namun untuk pelatihan menyablon justru mengalami penyusutan peserta, yang semula 40 peserta menjadi 23 peserta, hal ini terjadi karena kebanyakan peserta menyablon adalah para pemuda yang umumnya masih duduk di



bangku sekolah (SMA atau sederajat) sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan jadwal pelatihan selain hari libur sekolah). Sehingga biaya penambahan peserta pelatihan menjahit dapat diambilkan dari sisa anggaran pelatihan menyablon.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan P2KP juga dapat dilihat dari keikutsertaannya menjadi relawan P2KP yang terbentuk sejak awal sebelum P2KP disosialisasikan di tingkat basis (RT atau RW). Setelah diadakannya pertemuan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) di tingkat kelurahan dan warga menyatakan siap, kemudian langsung dibentuk relawan dari masyarakat yang mau membantu secara sukarela dan tulus ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Pembentukan relawan dari masyarakat ini didasarkan bahwa masyarakat tersebut lebih memahami kondisi masyarakat setempat. Relawan ini berperan untuk membantu faskel dalam sosialisasi dan pemasyarakatan mengenai P2KP di tingkat basis (RT maupun RW). Adapun jumlah relawan P2KP di Desa Dopleng sampai saat penelitian ini dilakukan adalah sebanyak 37 orang.

### **B.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hasil Kegiatan P2KP**

Tahap pelestarian kegiatan modal bergulir di dalam program P2KP dilakukan dengan melanjutkan kegiatan modal bergulir yang dilakukan di dalam wadah KSM yang ada. Tahap pelestarian kegiatan modal bergulir di Desa Dopleng dimulai pada bulan Juli 2007, dimana warga penerima bantuan mulai melakukan pengangsuran baik pokok pinjaman maupun bunganya.

Berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya sebagian besar KSM yang ada telah menjalankan perguliran dana dengan baik, artinya setiap sebulan sekali

anggota-anggota KSM mengadakan pertemuan untuk melakukan pengangsuran pokok pinjaman dan ditambah bunga 1,5 %. Jadi, besarnya angsuran tiap anggota KSM ditentukan oleh besarnya pinjaman modal usaha yang diterimanya.

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kegiatan modal bergulir tergolong cukup baik, dimana pada umumnya mereka telah mengangsur secara teratur, meskipun tidak menutup kemungkinan ada anggota yang terkadang tidak bisa mengangsur pada bulan yang bersangkutan, maka bulan berikutnya merangkap. Seperti yang terjadi pada Bapak Sarno (Anggota KSM Bareng Makaryo) bahwa :

“ Saya pernah lowong 1 kali waktu itu saya memang belum ada uang untuk mengangsur, tapi bulan berikutnya saya dobeli mbak...(saya rangkap).” (Wawancara, 08 Maret 2008).

Dari ungkapan tersebut terlihat adanya partisipasi dari anggota KSM tersebut untuk bertanggung jawab melakukan pengangsuran yang pernah lowong, terlihat dia menambahkan angsuran bulan lalu pada bulan berikutnya. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibu Murtini (Manager UPK BKM Adil Makmur) bahwa :

“ Ya...biasalah, Mbak. Ada yang aktif dan ada sebagian kecil yang tidak aktif. Tpi bila tidak mengangsur bulan ini maka bulan berikutnya dirangkap.” (Wawancara, 06 Maret 2008).

Partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk kemauan anggota KSM untuk mengangsur pinjaman secara teratur ini didorong oleh kesadarannya bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk mengangsur pinjaman beserta bunganya. Hal ini terlihat dari *Repayment Rate* (RR atau tingkat pengembalian pinjaman) di Desa Doplang adalah diatas 80 %, sehingga Desa Doplang

memperoleh hadiah berupa program PAKET dimana program PAKET ini hanya diperuntukkan bagi desa-desa atau kelurahan yang mempunyai RR diatas 80 %, dan Desa Doplang merupakan salah satunya. Mengenai hal tersebut, berikut penuturan Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur) :

“ Partisipasi masyarakat, utamamanya para anggota KSM dalam kegiatan pelestarian pinjaman modal bergulir ini dapat dikategorikan cukup tinggi, merak melakukan pengangsuran secara teratur, ini juga terbukti dengan RR di desa Doplang ini di atas 80 % sehingga kita mendapat kucuran dana untuk program PAKET.” (Wawancara, 9 Maret 2008).

Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat juga berupa pengawasan terhadap pelestarian kegiatan modal bergulir, yang salah satunya adalah dengan menegur anggota KSM yang terlewat angsurannya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Munardi (Ketua KSM Sukun Jaya) bahwa :

“Anggota KSM saya yang tidak aktif saya tegur dan saya berikan pengertian untuk segera mengangsur....” (Wawancara, 08 Maret 2008).

Selain pengawasan dari ketua KSM, ternyata juga terdapat pengawasan dari sesama anggota anggota KSM. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Jumini (Anggota KSM Gotong Royong) berikut ini :

“Dulu pernah ada teman satu KSM saya lihat kok menunggak, lalusaya menegur dan mengingatkannya untuk segera melunasinya”. (Wawancara, 11 Maret 2008).

Selain pengawasan dari sesama anggota KSM, pihak BKM pun juga melakukan pengawasan. Apabila ada KSM yang membandel maka pihak BKM akan turun tangan mendatangi anggota KSM yang membandel tersebut untuk diberikan pengarahan agar segera mengangsur. Seperti yang terjadi pada salah satu anggota KSM Jadi Jaya, pihak BKM tidak ada bosan-bosannya untuk

memberikan teguran dan peringatan kepada warga tersebut. Berikut pernyataan

Bapak Nurzaeni (Koordinator BKM Adil Makmur) :

“Kami selaku pihak BKM berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses perguliran. Pernah terjadi dulu itu salah satu anggota KSM Jadi Jaya di Bentangan Tegal itu bandel sekali, dia menunggak beberapa kali angsuran. Karena membandel maka akan diberlakukan sanksi untuk 1 KSMnya tidak boleh pinjem lagi pada tahap berikutnya.” (Wawancara, 14 Maret 2008).

Bentuk partisipasi warga dalam tahap pelestarian hasil pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun melalui dana hibah fisik P2KP ini bias dikaterorikan cukup tinggi, hal ini dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan oleh masyarakat setempat dan jika memungkinkan dilakukan pengembangan lebih lanjut atas sarana dan prasarana yang telah dibangun.

Di Desa Dopleng kegiatan pelestarian terhadap hasil proyek fisik P2KP dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan secara swadaya oleh masyarakat sekitarnya. Mengenai cara pemeliharaannya semua diserahkan pada masyarakat terserah dengan sistem apa, biasanya melalui gotong royong atau dibuat jadwal secara bergiliran untuk warga di tiap-tiap RT. Misalnya saja, untuk hasil pembangunan yang berupa MCK umum pemeliharaannya adalah dengan membersihkannya setiap hari dibuat jadwal secara bergantian, kemudian untuk talud jalan adalah dengan membersihkannya secara gotong royong warga biasanya pada hari minggu, dan sebagainya.

Sampai dengan saat penelitian ini dilakukan, penulis memperoleh informasi bahwa dalam rangka pemeliharaan hasil pembangunan fisik/lingkungan dari proyek P2KP di Desa Dopleng ini akan dibentuk KPP (Kelompok Pemelihara dan Pengawas), yaitu sebuah Kelompok yang bertugas melakukan pengawasan

dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dari adanya proyek P2KP, kemudian melaporkan hasil dari pengawasannya tersebut kepada pihak BKM dan faskel mengenai kondisi dan kelanjutan dari hasil-hasil pembangunan tersebut. Adanya P2KP ini dimaksudkan agar masyarakat merasa memiliki sehingga mereka bersedia memeliharanya. Selama ini di Desa Doplang sudah ada wujud pemeliharannya dari masyarakat, mengenai pengaturannya semua itu diserahkan pada masyarakat. Tapi untuk ke depannya, pihak BKM Adil Makmur Desa Doplang beserta Fasilitator Kelurahan (faskel) yang menangani P2KP di Desa Doplang sedang menginisiasikan dan mempersiapkan adanya Tim KPP. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saryono selaku Sekretaris BKM Adil Makmur Desa Doplang berikut ini ;

“Saat ini kami beserta faskel dan Tim Peduli sedang menginisiasikan adanya Tim KPP untuk Desa Doplang ini, sehingga dengan terbentuknya KPP diharapkan masyarakat merasa memiliki terhadap hasil proyek P2KP ini sehingga mereka mau memeliharanya.” (Wawancara, 14 Maret 2008).

Upaya ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dari segenap warga beserta jajaran pelaku P2KP di Desa Doplang dalam rangka mengupayakan adanya pelestarian dan pemeliharaan terhadap hasil pembangunan proyek P2KP di Desa Doplang.

### **C. Hal-hal Yang Mendukung Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Doplang**

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui P2KP di Desa Doplang, hal-hal yang mendukung kegiatan tersebut diantaranya adalah kesiapan dan keterbukaan warga masyarakat untuk menerima adanya P2KP sejak diadakannya sosialisasi, dukungan faskel (fasilitator kelurahan) dalam setiap tahap kegiatan P2KP, dan juga dukungan aparat pemerintahan Desa Doplang.

Dengan adanya berbagai kemudahan tersebut sangat mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam P2KP di Desa Doplang sehingga dapat terlaksana dengan baik walaupun belum optimal. Untuk lebih jelasnya tentang hal-hal yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat melalui P2KP di Desa Doplang dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

#### **1. Kesiapan dan keterbukaan masyarakat akan adanya P2KP**

Pada saat Faskel pertama kali mensosialisasikan P2KP di desa Doplang, pada saat itu dihadiri oleh 85 orang yang terdiri dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, wakil dari tiap RT, RW, kelompok wanita, dan kelompok pemuda. Dalam forum tersebut masyarakat diberi penjelasan, pengarahan, dan pengenalan mengenai apa itu P2KP. Setelah diberi pengenalan, faskel juga menanyakan bagaimana tingkat kesiapan warga untuk menjalankan proyek P2KP ini. Dalam forum tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa warga masyarakat Desa Doplang menerima P2KP dan menyatakan kesiapannya untuk menjalankan segala kegiatan dalam P2KP tersebut.

Setelah forum sosialisasi tersebut, kemudian faskel mengadakan RKM (rembug Kesiapan Masyarakat) yang juga digelar di Balai Desa Doplang, tujuannya adalah untuk memantapkan kesiapan dari warga masyarakat Desa Doplang dalam menjalankan proses kegiatan P2KP nantinya. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Bapak Yuwono (Senior Faskel Desa Doplang) bahwa :

“ Dalam rembug kesiapan masyarakat (RKM) tersebut, mempunyai tujuan untuk lebih memantapkan dari kesiapan warga dalam melaksanakan proyek P2KP ini nantinya, sehingga bila masyarakat telah benar-benar siap, proses pemberdayaan akan lebih lancer dan efektif.....” (Wawancara, 10 Maret 2008).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Utama Wardana (Faskel Desa Doplang) bahwa :

“ RKM memang dilakukan setelah sosialisasi pertama kali, hal ini untuk meninjau kembali apakah masyarakat benar-benar telah siap untuk melaksanakan P2KP ini. Dengan pemantapan ini, kami dari faskel berharap bahwa pelaksanaan dari P2KP ini dapat terarah dan tepat sasaran...” (Wawancara, 10 Maret 2008).

Setelah masyarakat Desa Doplang sepakat untuk menerima adanya P2KP ini, dalam tahap kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti saat pembentukan BKM maupun pembentukan KSM, masyarakat telah siap dengan itu semua karena sebelumnya telah diadakan pertemuan-pertemuan mulai dari tingkat RT, RW, bahkan juga pertemuan-pertemuan di kelompok arisan, kelompok pengajian, dan sebagainya. Sehingga dalam proses pembentukan BKM maupun KSM pun dapat mudah dilaksanakan. Proses penjadwalan agenda kegiatan dari faskel sampai kepada BKM juga ikut berpengaruh terhadap kesiapan

masyarakat tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yuwono (Senior Faskel Desa Doplang) bahwa :

“ Di Desa Doplang sendiri pada saat pembentuka BKM ataupun KSM, masyarakat tetap memiliki kepedulian untuk turut berpartisipasi dan menyatakan siap dengan kegiatan tersebut. Hal ini juga dipengaruhi dengan penjadwalan agenda kegiatan dari faskel sendiri.” (Wawancara, 10 Maret 2008).

Dengan kesiapan dari masyarakat Desa Doplang akan adanya pelaksanaan proyek P2KP yang mengacu dan memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat miskin, hal ini memudahkan dalam setiap kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, seperti misalnya dalam tahap sosialisasi, pembentukan BKM dan KSM, kegiatan pelatihan ketrampilan, dan kegiatan lainnya. Dari hasil kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik, walaupun masih ada sedikit kekurangannya.

## **2. Swadaya Masyarakat**

Tingkat swadaya masyarakat Desa Doplang dalam pelaksanaan proyek P2KP ini tergolong cukup tinggi., khususnya dalam pelaksanaan proyek fisik. Hibah fisik P2KP mampu menjadi stimulan bagi warga Desa Doplang untuk bergotongroyong mengerjakan pembangunan sarana dan prasarana fisik di dukuh masing-masing. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Nurzaeni selaku Koordinator P2KP Desa Doplang berikut ini :

“Pelaksanaan P2KP disini, khususnya untuk kegiatan pembangunan fisik/lingkungan mampu menghimpun swadaya masyarakat, baik berupa dana maupun barang ataupun tenaga, untuk memperbaiki kondisi sarana dan prasarana fisik/lingkungannya.....ini berarti dana bantuan P2KP



tersebut hanya bersifat stimulan saja, selebihnya warga masyarakat di dukuh masing-masing yang berswadaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana lingkungannya....” (Wawancara, 14 Maret 2009).

Karena dana BLM-P2KP bersifat stimulant, maka sebagai konsekuensinya warga masyarakat yang menjadi pemanfaat dari kegiatan Tridaya P2KP harus berpartisipasi dengan kemampuan swadaya. Adapun besaran dana imbalan swadaya ditentukan dari jenis kegiatannya, seperti dalam kegiatan pembangunan fisik/lingkungan, ditetapkan untuk 40 % dana BLM-P2KP dan 60 % dana swadaya yang berwujud dana (*fresh money*), tenaga kerja, konsumsi dan biaya lainnya yang menjadi faktor pendukung/komponen biaya kegiatan lingkungan. Dana yang dimanfaatkan untuk kegiatan fisik/lingkungan tersebut merupakan BLM sebesar Rp.81.555.000,- dan menyerap swadaya masyarakat sebesar Rp.150.757.350,-

Berikut data tahapan pencairan BLM beserta partisipasi swadaya masyarakat :

**Tabel 3.4**  
**Tahap Pencairan BLM P2KP Beserta Jumlahnya**

TAHAP PENCAIRAN BLM					
BLM TAHAP	JENIS KEGIATAN				JUMLAH
	LINGKUNGAN	SOSIAL	EKONOMI	BOP	
I	24.250.000	14.550.000	9.700.000	1.500.000	50.000.000
II	35.480.000	24.670.000	61.100.000	3.750.000	125.000.000
III	21.825.000	14.550.000	36.375.000	2.250.000	75.000.000
TOT	81.555.000	53.770.000	107.175.000	7.500.000	250.000.000

Sumber : Laporan RWT (Rembug Warga Tahunan) BKM Adil Makmur Desa Dopleng, 2007.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Partisipasi Swadaya Masyarakat**

PARTISIPASI SWADAYA MASYARAKAT					
BLM TAHAP	JENIS KEGIATAN				JUMLAH
	LINGKUNGAN	SOSIAL	EKONOMI	BOP	
I	45.021.350	350.925	3.590.500	-	48.962.775
II	66.217.000	2.085.780	102.605.000	-	170.907.780
III	39.519.000	645.375	64.336.000	-	104.500.375
TOT	150.757.350	3.082.080	170.531.000	-	324.370.930

*Sumber : Laporan RWT (Rembug Warga Tahunan) BKM Adil Makmur Desa Doplang, 2007.*

### 3. Dukungan dari Faskel (Fasilitator Kelurahan)

Faskel melakukan berbagai kegiatan dalam P2KP mulai dari tahap sosialisasi atau pemasyarakatan P2KP, pengembangan institusi lokal (BKM dan KSM), dan juga kegiatan pendampingan serta pelatihan dasar kelembagaan bagi BKM. Faskel dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam P2KP ini benar-benar sangat membantu dan memudahkan pelaksanaan P2KP baik kepada BKM maupun KSM secara langsung. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Nurzaeni (Koordinator BKM Adil Makmur Desa Doplang) bahwa :

“Keberadaan faskel ini sangat membantu memudahkan dalam setiap tahap kegiatan P2KP, hal itu saya rasakan betul mbak, terut5ama bagi BKM sendiri. Ketika kami masih baru berdiri, faskel banyak membantu dengan memberikan arahan, bimbingan, bahkan pelatihan dasar bagi anggota BKM. Kalau untuk KSM, faskel juga turut mendampingi dalam kegiatan penyusunan rencana kegiatannya walaupun tidak semua KSM didampingi oleh faskel. Saya akuisendiri bahwa dengan adanya faskel

sangat memudahkan pelaksanaan P2KP di Desa Doplang, kalau ada masalah kita tinggal mengontak mereka.” (Wawancara, 14 Maret 2008).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak saryono selaku Sekretaris BKM Adil Makmur Desa Doplang, bahwa :

“Faskel telah banyak sekali membantu dalam pelaksanaan P2KP di Desa Doplang, dulu saat pertama kali BKM berdiri kalau nggak ada faskel mungkin nggak akan jalan mbak. Faskel yang menangani P2KP disini bertanggungjawab penuh mulai dari tahap sosialisasi, hingga pembentukan BKM dan KSM. Misalnya ada permasalahan dapat segera menghubungi mereka, faskel memberi arahan kemudian dalam BKM digodok hingga memunculkan keputusan.” (Wawancara, 9 Maret 2008).

Selain membantu dan memudahkan pelaksanaan P2KP di tingkat BKM, secara langsung faskel juga memudahkan di tingkat KSM walaupun tidak semuanya. Sebenarnya dalam pendampingan kepada KSM khususnya dalam kegiatan penyusunan rencana keuatan KSM sudah menjadi tanggung jawab dari BKM dan UPK-nya, namun di Desa Doplang faskel juga terlibat langsung dalam pendampingan kepada KSM-KSM terutama dalam penyusunan rencana kegiatan KSM. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yuwono (Senior faskel P2KP Desa Doplang) bahwa :

“Kami memang pernah terjun langsung ke lapangan dalam pendampingan KSM di Desa Doplang. Disana kami melakukan bimbingan, dialog, dan tanya jawab mengenai apa itu KSM, fungsi dan kedudukan, dan juga alur kegiatan dalam kegiatan pinjaman dana bergulir.” (Wawancara, 10 Maret 2008).

#### **4. Dukungan dari aparat pemerintahan Desa Doplang**

Dalam pelaksanaan P2KP di Desa Doplang ini memang aparat pemerintah desa tidak terlibat secara langsung dalam P2KP. Keterlibatan

dalam kegiatan P2KP hanya sebatas pada pemberian ijin kegiatan dan juga penempatan kantor sekretariat BKM Adil Makmur di samping/sebelah Balai Desa Doplang. Namun dalam setiap agenda dan forum BKM seperti kegiatan pencairan dana P2KP, pembahasan proposal kegiatan, dan monitoring dari PjOK, KMW maupun dari Bank Dunia (World Bank), aparat pemerintah desa tetap dilibatkan. Hal ini se bagai bentuk dukungan dari pemerintah desa sebagai penguasa wilayah administratif di Desa Doplang. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Saryono (Sekretaris BKM Adil Makmur Desa Doplang) bahwa :

“Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan P2KP di Desa Doplang, namun peran dan dukungan dari aparat pemerintah desa tetap kami butuhkan misalnya dalam setiap forum dari BKM mereka selalu diundang, entah itu dalam pencairan dana ataupun pengajuan proposal kegiatan, mereka juga ikut terlibat. Kalau tidak sepengetahuan dari Kepala Desa kami juga nggak bakal bisa mengucurkan dana P2KP itu. Namun alhamdulillah aparat pemerintah Desa Doplang benar-benar mendukung dalam kegiatan P2KP ini dan sangat membantu serta memudahkan kami dalam setiap tahap kegiatan pemberdayaan dalam P2KP ini.....” (Wawancara, 9 Maret 2008).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Bambang Wahyono (Kepala Desa Doplang) bahwa :

“Kami secara penuh tetap mendukung dengan adanya P2KP di Desa Doplang ini, kan tujuannya baik dan mulia yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu kan masyarakat diharapkan bisa berdaya, sejahtera, dan meningkatkan pendapatannya serta menjadi lebih baik kualitas hidupnya. Hubungan perangkat desa dengan BKM kan sebagai mitra, jadi kami istilahnya wajib membantu apabila dibutuhkan kapan saja. Intinya kami sepenuhnya mendukung demi terciptanya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Desa Doplang.” (Wawancara, 15 Maret 2008).

Dengan bentuk dukungan tersebut, diharapkan nantinya hubungan antara aparat pemerintah desa dan BKM tetap saling mendukung dengan adanya P2KP ini. Karena walaupun tidak terlibat secara langsung, bentuk dukungan dari aparat pemerintah desa tersebut ternyata memudahkan dalam setiap kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dalam P2KP, baik itu oleh BKM maupun Faskel.

#### **D. Hal-hal Yang Menghambat Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Doplang**

Dari hasil penelitian, walaupun tidak banyak permasalahan yang dihadapi namun penulis menemukan beberapa hambatan yang bisa mengganggu upaya pemberdayaan masyarakat dalam proyek P2KP di Desa Doplang, meskipun hal itu sedapat mungkin telah diminimalisir dan diupayakan pemecahannya. Hal-hal yang menghambat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Masih adanya persepsi yang keliru dari sebagian kecil warga masyarakat mengenai P2KP.**

Kekeliruan persepsi ini dapat ditemui dalam pemahaman dari sebagian warga yang menganggap P2KP sama dengan program-program pemerintah yang lain, seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS), sehingga muncul anggapan bahwa dana bantuan kredit P2KP berasal dari uang negara yang

sekali habis dan tidak perlu dikembalikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yuwono (Faskel P2KP Desa Doplang) berikut ini :

“ Kendala yang dihadapi, karena P2KP memerlukan proses yang lama, dan materinya baru, maka perlu mengubah *image* masyarakat bahwa program ini adalah program yang terus berkelanjutan dan tidak sekali habis, sehingga pinjaman kredit modal usaha tersebut harus dikembalikan untuk keberlanjutan program. Ini salah satu kendala kami”. (Wawancara, 10 Maret 2008).

Selain dari yang dikemukakan di atas, faktor rongrongan dari oknum yang memberikan informasi yang tidak benar tentang P2KP, yaitu informasi bahwa P2KP tidak lain halnya seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang karena sesuatu dan lain hal banyak mengalami kegagalan. Banyak anggota KSM yang pada awalnya memperoleh informasi bahwa bantuan kredit P2KP tidak perlu dikembalikan, karena dana itu memang untuk orang miskin jadi tidak perlu dikembalikan. Sehingga pihak pengurus BKM pada mulanya agak kerepotan menghadapi rongrongan dari para “provokator” agar masyarakat yang menerima bantuan kredit kembali percaya bahwa dana P2KP ini memang milik dan diperuntukkan bagi seluruh warga masyarakat Desa Doplang, sehingga program tersebut harus berkelanjutan dan bantuan kredit tersebut harus dikembalikan demi keberlanjutan program.

Sejurus dengan hal tersebut, Bapak Sarno (Ketua KSM Cempaka) mengemukakan bahwa :

“Kalau saya secara pribadi sih sudah tau Mbak program P2KP itu seperti apa, beda dengan program-program JPS sebelumnya....Tapi ada sebagian anggota KSM sini yang salah persepsi karena pada awalnya mereka memperoleh informasi yang keliru tentang P2KP, yaitu bahwa P2KP ini sama seperti program JPS sebelumnya yang bantuan kreditnya tidak perlu dikembalikan, jadi ada sebagian dari anggota KSM yang tidak mau

mengembalikan....ya gara-gara ‘diprovokatori’ itu Mbak...tapi pihak BKM sudah pernah berusaha untuk meluruskan hal tersebut”. (Wawancara, 7 Maret 2008)

## **2. Terjadinya pergantian kepengurusan BKM**

Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan menghasilkan, dan rata-rata pekerjaan tersebut berada di luar kota. Krena pekerjaan sebagai pengurus BKM adalah pekerjaan yang mengandung amanah dan bersifat sukarela sehingga banyak yang memilih pekerjaan lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Nurzaeni selaku Koordinator BKM Adil Makmur Desa Dopleng berikut ini :

“Permasalahan lain yang ada, walaupun tidak banyak ditemukan adalah karena ada pengurus BKM yang keluar karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar kota, sehingga ia lebih memilih pekerjaan barunya. Hal ini walaupun tidak mengganggu secara signifikan pelaksanaan kegiatan, akan tetapi kami harus mempersiapkan kader berikutnya, dan hal itu dapat kami tanggulangi dengan menunjuk serta mensepakati peserta magang pada peringkat berikutnya.” (14 Maret 2008).

Selain itu kepengurusan yang duduk dalam BKM rata-rata sudah memiliki pekerjaan sehingga dalam mengimplementasikan proyek hanya merupakan pekerjaan sambilan (sehingga tidak maksimal).

## **3. Rentannya anggota KSM dalam mempertahankan kondisi usahanya.**

Hal ini sebagai akibat dari minimnya modal yang dimiliki termasuk yang berasal dari pinjaman P2KP. Untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya, suatu anggota KSM merasakan sangat berat, sebab minimnya jumlah pinjaman modal yang diberikan. Hal ini yang dialami oleh KSM

Aneka Konveksi yang bergerak dalam bidang jahit menjahit. Selain karena minimnya jumlah modal yang dipinjamkan juga terkait dengan persoalan kurangnya lahan pemasaran. Selain itu juga terkait dengan hambatan yang berasal dari intern anggota KSM, yaitu bahwa dari kelima anggota KSM Aneka Konveksi tersebut tak ada satupun yang memiliki mesin jahit. Berikut ini petikan wawancara dengan Ibu Sutini (salah satu anggota KSM Aneka Konveksi) :

“Saya merasa senang mbak dengan adanya bantuan modal usaha dari P2KP tersebut, cuman yaaa itu mbak...bantuan pinjemannya cuma dikit, ngga cukup untuk beli mesin jahit, sedangkan 1 KSM saya ini kan ngga ada yang punya mesin jahit mbak....itu yang bikin kerjaan jadi terhambat” (Wawancara, 7 Maret 2009).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Mulatsih (anggota KSM Aneka Konveksi) bahwa :

“Senang sekali mbak dengan adanya bantuan modal usaha ini jadi bisa buka usaha bersama terima jahitan, tapi sayangnya bantuannya kurang mencukupi untuk beli mesin jahit sendiri mbak...Awalnya kan kita makai mesin jahit punyanya keponakannya salah satu anggota KSM kami mbak...tp kan akhirnya juga kami kembalikan...tp sayangnya bantuan itu baru bisa untuk beli bahan-bahan aja mbak...Pengennya sih dikasih mesin jahit gitu mbak, seperti di daerah lain itu dapat bantuan mesin jahit dari pemerintah kabupaten, tapi katanya waktu itu di KSM kita telat ngajuinnya jadi ya ngga dapet....” (Wawancara, 6 Maret 2008).

Dari petikan wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rentannya anggota KSM dalam mempertahankan kondisi usahanya, hal ini merupakan salah satu hambatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui P2KP.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, pada Bab Keempat ini dapat disimpulkan secara garis besar bahwa Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan di Desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dapat dinyatakan berhasil dan berjalan sesuai rencana. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam proyek P2KP tersebut dapat dinyatakan cukup baik.

Strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) mengindikasikan munculnya paradigma pembangunan yang bersifat partisipatoris. Indikasi tersebut ada dua perspektif yaitu, yang pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pelestarian program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi masyarakat setempat, pola sikap dan pola berfikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Yang kedua adalah membuat umpan balik (*feedback*) yang pada hakekatnya merupakan bagian yang tak terlepas dari kegiatan pembangunan. Mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berbasis pada

pemberdayaan, yang dilaksanakan di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, dapat dijelaskannya kesimpulannya sebagai berikut :

#### **A. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANFAAT P2KP**

Penilaian akan pemanfaatan proyek/program bagi masyarakat Desa Doplang dapat dilihat dari persepsi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana proyek. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, persepsi masyarakat terhadap manfaat P2KP sebagai proyek yang memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang ada dalam P2KP serta bagaimana pemanfaatan dana P2KP bagi masyarakatnya.

##### **1. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dalam P2KP di Desa Doplang**

Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang ada dalam P2KP dapat dilihat dari :

###### **1.1. Sosialisasi P2KP**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pada waktu diadakan sosialisasi sangat baik, mereka menanggapinya dengan antusias dan menyetujui untuk dilaksanakannya proyek P2KP di wilayah mereka.

Indikasi keberhasilan atau suksesnya sosialisasi tersebut ditandai dengan antusiasme warga untuk hadir dalam sosialisasi dan peran aktif mereka pada waktu diadakan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi P2KP di Desa Doplang memberi kesan bahwa masyarakat cukup memahami bahwa P2KP merupakan program pemerintah yang berbeda dengan yang pernah ada seperti IDT beberapa tahun lalu yang pernah mereka terima. Beberapa

kelompok masyarakat ada yang tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan P2KP, sementara sebagian masyarakat yang lain merasa kurang tertarik terutama kegiatan ekonomi produktif dimana kelompok yang memanfaatkan bantuan dana tersebut nantinya diwajibkan mengembalikan pinjaman plus bunga (jasa) sebesar 1,5 % perbulan. Kelompok yang kurang tertarik tersebut adalah masyarakat yang kondisi perekonomiannya sangat lemah sehingga ia takut kalau tidak bisa mengembalikan dana pinjaman tersebut.

## **1.2. Pembentukan BKM**

Persepsi warga masyarakat terhadap pembentukan BKM ini diawali dengan Rembug Sosialisasi dan pernyataan kesiapan masyarakat dalam pembentukan BKM, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus di Aula Balai Desa Dopleng dengan dihadiri oleh aparat pemerintahan desa, pengurus RT/RW, lembaga-lembaga desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh wanita (PKK), wakil pemuda dan pemuka masyarakat yang lain.

Indikasi keberhasilan atas suksesnya sosialisasi pembentukan BKM ini, didukung dengan daftar hadir peserta Rembug Sosialisasi dan Pernyataan Kesiapan Masyarakat dalam Pembentukan BKM yaitu sebanyak 85 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mereka semua menyatakan siap dan sanggup untuk membentuk BKM di Desa Dopleng. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi warga terhadap pembentukan BKM ini adalah merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, disini terlihat antusiasme warga dalam pembentukan BKM

tersebut. Mereka semua menyepakati untuk dibentuk sebuah lembaga yang bernama BKM. Persepsi masyarakat dalam proses pembentukan BKM ini adalah sangat mendukung dan menanggapinya dengan baik, terlihat dengan hadirnya seluruh utusan RT dan komponen masyarakat yang diundang dalam pemilihan tersebut. Pemilu BKM di tingkat kelurahan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2005 di Balai Desa Dopleng. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak menghadapi hambatan yang berarti. Masyarakatpun menanggapinya dengan baik atas terbentuknya BKM ini karena memang terbentuknya BKM ini juga berdasar pada inisiatif rakyat sendiri yang telah menyetujui untuk dibentuknya BKM. Masyarakat menyadari akan peran BKM yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayahnya dan mampu menjembantani aspirasi dan kebutuhan warga dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Dopleng.

### **1.3. Pembentukan KSM**

Persepsi masyarakat dalam pembentukan KSM ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota KSM dan antusiasme warga saat menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan pembentukan KSM ini berjalan lancar dan tidak menemui hambatan yang berarti. Pembentukannya diserahkan sepenuhnya pada masyarakat sehingga dapat dianalisis bahwa persepsi dan daya dukung masyarakat terutama dalam membentuk KSM sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak BKM dengan faskel, dimana mereka dibiarkan untuk membentuk

kelompok yang masing-masing anggotanya saling memahami karakteristik anggota yang lain.

#### **1.4. Penysadaran dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap BKM dan KSM**

Persepsi masyarakat dalam kegiatan penyadaran dan peningkatan kepedulian terhadap BKM dan KSM ini ditandai dengan kesediaan dan keterbukaan sikap masyarakat pada waktu kegiatan ini dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut memberi kesan bahwa rasa keingintahuan masyarakat sangat besar untuk memahami apa itu BKM dan KSM. Hal ini didukung pula oleh kejelasan para pelaksana program, baik faskel, BKM, maupun relawan dalam memberikan pengarahan-pengarahan.

### **2. Pemanfaatan Dana P2KP bagi Masyarakat**

Pemanfaatan dana P2KP bagi masyarakat sasaran proyek, dibagi menjadi 3 macam yaitu:

#### **2.1. Pemanfaatan dana untuk ekonomi**

Sebagian besar masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dari adanya bantuan pinjaman bergulir ini, sejauh untuk mengurangi beban mereka dan mencukupi kebutuhan normatif saja. Kehadiran P2KP sangat membantu dalam mendomonasi sumbangan pendapatan mereka, ada perubahan keadaan menjadi lebih baik, misalnya dari yang dulunya nganggur kini mampu menjalankan usaha, dari yang dulunya buruh kini dapat membuka usaha sendiri walaupun kecil-kecilan. Tetapi untuk

peningkatan kesejahteraan memang belum tercapai, baru sebatas mengurangi beban untuk tetap dapat *survive* dan mencukupi kebutuhan normatif saja. Karena peningkatan kesejahteraan itu terkait dengan banyak faktor, bukan hanya modal dan sumber daya manusia saja, tetapi juga terkait dengan faktor alam, pasar, dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan nara sumber, sebagian besar nara sumber mengatakan bahwa pinjaman modal P2KP mereka gunakan sebagai tambahan modal usaha atau menciptakan usaha baru. Bagi yang sebelumnya sudah menjalankan usaha, sebelum meminjam dana dari P2KP sebagian besar mereka menggunakan modal pribadi dan setelah mendapat pinjaman modal P2KP usaha mereka menjadi lebih maju. Khusus bagi mereka yang dulunya belum memiliki usaha, sebelumnya mereka hanya bekerja sebagai buruh, setelah mendapat pinjaman mereka membuka usaha sendiri.

Perkembangan jenis usaha yang dengan mempergunakan dana pinjaman P2KP semakin meningkat sehingga anggota KSM yang mempergunakan dana pinjaman P2KP untuk ekonomi produksi semakin meningkat pendapatannya, meskipun kendala masih tetap ada, namun secara umum dana pinjaman P2KP mampu meningkatkan produktifitas dan menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat Desa Dopleng.

## **2.2. Pemanfaatan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan / fisik.**

Persepsi masyarakat terhadap pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan atau fisik ini adalah positif, mereka merasa senang dan terbantu sehingga mereka memanfaatkan dana tersebut dengan baik dan kini sudah bisa merasakan manfaat dari pembangunan sarana fisik tersebut. Dalam pembangunan sarana fisik, masyarakat bekerja sama secara suka rela, saling bergotong royong dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan tanpa mendapat upah. Tapi mereka tetap senang dan semangat karena hasilnya juga untuk kepentingan mereka dan mereka sadar bahwa proyek seperti ini memang sangat membutuhkan partisipasi aktif dari warganya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang memperoleh dana stimulan dari P2KP ini. Meskipun dana dari P2KP ini tidak terlalu banyak tapi berhasil menjadikan rangsangan bagi masyarakat untuk menambah dana itu dalam bentuk swadaya masyarakat sehingga pembangunan bisa terlaksana.

Kesan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pembangunan mulai tahap persiapan, pencairan dana sampai pada pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan baik dan hati-hati. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sudah dapat terselesaikan atau dengan kata lain selesai tepat waktu. Selanjutnya oleh UPL BKM Adil Makmur yaitu Bapak Agung Wahyu, dilaporkan bahwa

swadaya masyarakat gotong royong dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana fisik cukup tinggi. Secara keseluruhan di Desa Dopleng ini swadaya masyarakatnya mencapai Rp. 150.757.350,-. Selain dalam bentuk uang, swadaya masyarakat juga terwujud dalam bentuk pemberian makanan untuk para tukang dan warga yang bergotong royong dalam pembangunan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kegiatan ini pembangunan ini berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti.

### **2.3. Pemanfaatan dana untuk kegiatan pelatihan**

Pelaksanaan kegiatan pelatihan, baik itu menjahit, sablon, maupun service elektro memberi kesan bahwa para peserta mempunyai persepsi yang cukup baik dalam menanggapi program ini. Mereka sangat antusias dan memberikan respon yang baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut, bahkan untuk pelatihan menjahit terjadi penambahan peserta karena sebelumnya mereka tidak terdaftar namun sangat ingin mengikuti pelatihan tersebut.

Khusus untuk pelatihan menjahit, masyarakat mempunyai persepsi yang baik terhadap adanya pelatihan tersebut. Namun tingkat kemanfaatannya baru sebatas menambah pengetahuan tentang jahit menjahit, sedangkan untuk mempraktekkannya dalam bentuk usaha jasa pelayanan jahit dirasa masih sangat jarang karena selain keterbatasan modal juga disebabkan karena mereka lebih memilih untuk berprofesi lain.



Untuk pelatihan service elektro, pelaksanaan kegiatan tersebut memberi kesan bahwa para peserta sangat antusias dan menanggapi dengan respon yang positif. Namun karena membutuhkan modal yang cukup besar maka kemanfaatan kegiatan pelatihan ini baru sebatas menambah pengetahuan di bidang service elektro saja, sedangkan untuk mengembangkannya dalam bentuk usaha jasa layanan service elektro belum ada sampai semarang.

Sedangkan untuk pelatihan menyablon pelaksanaannya berjalan lancar, peserta cepat memahami materi. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan ini cukup baik dan menanggapi dengan respon yang baik pula. Pelatihan menyablon ini telah memperlihatkan kemanfaatannya bagi sebagian besar peserta latihan. Dari beberapa peserta tersebut bergabung menjadi 1 KSM yang bernama KSM Ajar Makaryo. Sampai sekarang usahanya masih tetap jalan dan bahkan bisa melakukan channelling sendiri ke dinas-dinas di Kabupaten Boyolali. Selain itu KSM ini dipercaya untuk menjadi pembuat berita sekaligus pencetak untuk buletin "Sahabat Rakyat" yang akan didistribusikan ke dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Boyolali.

## **B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM P2KP**

### **B.1. Partisipasi Masyarakat dalam Sosialisasi dan Perencanaan Kegiatan P2KP**

Partisipasi masyarakat dalam tahap sosialisasi dan perencanaan ini tergolong cukup baik, dari jumlah presensi yang hadir dalam rapat sosialisasi awal P2KP di tingkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2005 tercatat sebanyak 85 peserta hadir. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat pada tahap sosialisasi tergolong cukup baik. Bentuk partisipasi dari masyarakat dalam tahap ini dapat dilihat dari kehadirannya untuk memenuhi undangan dalam sosialisasi P2KP baik di tingkat desa maupun di tingkat basis (RT / RW). Keterlibatan masyarakat dalam tahap ini juga bisa dilihat dari partisipasinya di dalam mengajukan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayahnya, masyarakat juga aktif menyumbangkan pikiran dan masukan dalam membuat jadwal musyawarah untuk kegiatan pembangunan fisik apa yang akan dilaksanakan. Dari situ dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada tahap sosialisasi dan perencanaan program dapat dikategorikan cukup tinggi, sebagian besar masyarakat menanggapi dengan baik. Beberapa respon dan peran serta masyarakat tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat menanggapi keberadaan proyek P2KP ini dengan baik.

## **B.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan P2KP**

Partisipasi masyarakat Desa Dopleng dalam program P2KP dapat dikategorikan cukup aktif. Hal ini tampak pada keberhasilan BKM Adil Makmur Desa Dopleng mencatatkan diri sebagai BKM pertama yang memperoleh Surat Perintah Membayar (SPM) dari KPKN untuk wilayah Kabupaten Boyolali. Disamping itu juga BKM Adil Makmur merupakan

BKM yang pertama kali merealisasikan pencairan bantuan dana kredit ke KSM, sehingga proses pencairannya harus dihadiri langsung oleh Pihak Penanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam hal ini Kepala BAPPEDA beserta jajarannya.

Kadar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP bisa dibilang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari antusiasme warga untuk mengikuti program P2KP di Desa Doplang sangat tinggi, walaupun kemampuan BKM untuk memenuhi keinginan para KSM relatif terbatas. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KP juga terlihat dari kesadarannya untuk menggunakan pinjaman modal usaha yang diterimanya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kelompok sasaran memiliki daya tanggap yang positif terhadap pinjaman tersebut untuk melakukan kegiatan usaha, meskipun dengan perkembangan usaha yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan P2KP di Desa Doplang terlihat tingginya partisipasi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Hal ini ditunjukkan dengan semangat gotong royong warga untuk mengerjakan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik di pedukuhan-pedukuhannya sendiri walaupun tidak ada yang menggaji ataupun memberi upah mereka tetap bersemangat dan sukarela dalam melaksanakan proyek tersebut.

Dalam kegiatan pelatihan, partisipasi masyarakatnya dapat dikatakan cukup baik. Bahkan karena banyaknya formulir pendaftaran yang masuk

untuk mengikuti pelatihan, mengharuskan BKM untuk mengeliminir sebagian masyarakat. Untuk Pelatihan sablon, rata-rata peserta yang hadir adalah 26 orang, pelatihan servis elektro sebanyak 20 peserta, dan pelatihan menjahit rata-rata peserta yang hadir adalah 26 peserta. Masyarakat peserta kursus tergolong rajin hadir dalam setiap pelatihan. Bahkan untuk pelatihan menjahit ada penambahan peserta, yang semula 20 peserta menjadi 26 peserta, hal ini terjadi karena banyaknya warga, khususnya wanita yang ingin sekali mengikuti pelatihan menjahit.

### **B.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hasil Kegiatan P2KP**

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kegiatan modal bergulir tergolong cukup baik, dimana pada umumnya mereka telah mengangsur secara teratur, meskipun tidak menutup kemungkinan ada anggota yang terkadang tidak bisa mengangsur pada bulan yang bersangkutan, maka bulan berikutnya merangkap. Dari situ terlihat adanya partisipasi dari anggota KSM tersebut untuk bertanggung jawab melakukan pengangsuran yang pernah lowong, terlihat dia menambahkan angsuran bulan lalu pada bulan berikutnya. Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat juga berupa pengawasan terhadap pelestarian kegiatan modal bergulir, yang salah satunya adalah dengan menegur anggota KSM yang terlewat angsurannya

Bentuk partisipasi warga dalam tahap pelestarian hasil pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun melalui dana hibah fisik P2KP ini bias dikategorikan cukup tinggi, hal ini dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan oleh masyarakat setempat dan jika memungkinkan dilakukan

pengembangan lebih lanjut atas sarana dan prasarana yang telah dibangun. Di Desa Doplang kegiatan pelestarian terhadap hasil proyek fisik P2KP dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan secara swadaya oleh masyarakat sekitarnya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui P2KP di Desa Doplang didukung oleh beberapa hal. Hal-hal yang mendukung kegiatan tersebut diantaranya adalah kesiapan dan keterbukaan warga masyarakat untuk menerima adanya P2KP sejak diadakannya sosialisasi, swadaya masyarakat, dukungan faskel (fasilitator kelurahan) dalam setiap tahap kegiatan P2KP, dan juga dukungan aparat pemerintahan Desa Doplang.

*Pertama* adalah kesiapan dan keterbukaan warga masyarakat akan adanya P2KP. Pada saat Faskel pertama kali mensosialisasikan P2KP di desa Doplang, pada saat itu dihadiri oleh 85 orang yang terdiri dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, wakil dari tiap RT, RW, kelompok wanita, dan kelompok pemuda. Dalam forum tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa warga masyarakat Desa Doplang menerima P2KP dan menyatakan kesiapannya untuk menjalankan segala kegiatan dalam P2KP tersebut. Dengan kesiapan dari masyarakat Desa Doplang akan adanya pelaksanaan proyek P2KP yang mengacu dan memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat miskin, hal ini memudahkan dalam setiap kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, seperti misalnya dalam

tahap sosialisasi, pembentukan BKM dan KSM, kegiatan pelatihan ketrampilan, dan kegiatan lainnya.

*Kedua* adalah swadaya masyarakat. Tingkat swadaya masyarakat Desa Doplang dalam pelaksanaan proyek P2KP ini tergolong cukup tinggi., khususnya dalam pelaksanaan proyek fisik. Hibah fisik P2KP mampu menjadi stimulan bagi warga Desa Doplang untuk bergotongroyong mengerjakan pembangunan sarana dan prasarana fisik di dukuh masing-masing. Dana yang dimanfaatkan untuk kegiatan fisik/lingkungan tersebut merupakan BLM sebesar Rp.81.555.000,- dan menyerap swadaya masyarakat sebesar Rp.150.757.350,-.

*Ketiga* adalah dukungan dari faskel (Fasilitator Kelurahan) dalam setiap tahapan kegiatan P2KP. Faskel melakukan berbagai kegiatan dalam P2KP mulai dari tahap sosialisasi atau pemasyarakatan P2KP, pengembangan institusi lokal (BKM dan KSM), dan juga kegiatan pendampingan serta pelatihan dasar kelembagaan bagi BKM. Faskel dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam P2KP ini benar-benar sangat membantu dan memudahkan pelaksanaan P2KP baik kepada BKM maupun KSM secara langsung.

*Keempat* adalah dukungan dari aparat pemerintahan Desa Doplang. Dalam pelaksanaan P2KP di Desa Doplang ini memang aparat pemerintah desa tidak terlibat secara langsung dalam P2KP. Keterlibatan dalam kegiatan P2KP hanya sebatas pada pemberian ijin kegiatan dan juga penempatan kantor sekretariat BKM Adil Makmur di samping/sebelah Balai Desa

Doplang. Namun dalam setiap agenda dan forum BKM seperti kegiatan pencairan dana P2KP, pembahasan proposal kegiatan, dan monitoring dari PjOK, KMW maupun dari Bank Dunia (World Bank), aparat pemerintah desa tetap dilibatkan. Dengan demikian hubungan antara aparat pemerintah desa dan BKM tetap saling mendukung dengan adanya P2KP ini. Karena walaupun tidak terlibat secara langsung, bentuk dukungan dari aparat pemerintah desa tersebut ternyata memudahkan dalam setiap kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dalam P2KP, baik itu oleh BKM maupun Faskel.

Selain bentuk dukungan tersebut di atas, penulis juga menemukan beberapa hambatan yang bisa mengganggu upaya pemberdayaan masyarakat dalam proyek P2KP di Desa Doplang, meskipun hal itu sedapat mungkin telah diminimalisir dan diupayakan pemecahannya. Hal-hal yang menghambat tersebut :

*Pertama* adalah masih adanya persepsi yang keliru dari sebagian kecil warga masyarakat mengenai P2KP. Kekeliruan persepsi ini dapat ditemui dalam pemahaman dari sebagian warga yang menganggap P2KP sama dengan program-program pemerintah yang lain, seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS), sehingga muncul anggapan bahwa dana bantuan kredit P2KP berasal dari uang negara yang sekali habis dan tidak perlu dikembalikan. Selain itu juga faktor rongrongan dari oknum yang memberikan informasi yang tidak benar tentang P2KP, yaitu informasi bahwa P2KP tidak lain halnya seperti Program Jaring Pengaman Sosial

(JPS) lainnya yang karena sesuatu dan lain hal banyak mengalami kegagalan.

*Kedua* adalah terjadinya pergantian kepengurusan BKM. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan menghasilkan, dan rata-rata pekerjaan tersebut berada di luar kota. Karena pekerjaan sebagai pengurus BKM adalah pekerjaan yang mengandung amanah dan bersifat sukarela sehingga banyak yang memilih pekerjaan lain.

*Ketiga* adalah rentannya anggota KSM dalam mempertahankan kondisi usahanya. Hal ini sebagai akibat dari minimnya modal yang dimiliki termasuk yang berasal dari pinjaman P2KP. Untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya, suatu anggota KSM merasakan sangat berat, sebab minimnya jumlah pinjaman modal yang diberikan. Selain karena minimnya jumlah modal yang dipinjamkan juga terkait dengan persoalan kurangnya lahan pemasaran. Selain itu juga terkait dengan hambatan yang berasal dari intern anggota KSM.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbangunnya persepsi, kebersamaan dalam makna warga masyarakat desa terhadap program kegiatan P2KP, semakin positif makna persepsi warga masyarakat terhadap P2KP akan semakin tinggi kesiapan mereka untuk berpartisipasi. Demikian pula sebaliknya, bila persepsi mereka kurang bermakna positif (yaitu negatif) maka mereka pun enggan berpartisipasi secara aktif.



Strategi/pendekatan yang digunakan dalam P2KP berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Perencanaannya tidak memakai sistem *top down planning* tetapi *bottom up planning*. Dalam pemberdayaan masyarakat, warga masyarakat desa diberikan kebebasan dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah kelompok masyarakat. Dengan demikian warga masyarakat desa merasa memiliki dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi/pendekatan pemberdayaan dalam P2KP yang telah dilaksanakan di Desa Dopleng, ternyata mampu membangun persepsi warga masyarakat desa, membangun kebersamaan dalam makna, yang selanjutnya kesamaan persepsi tersebut mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan proyek P2KP.

## **B. SARAN**

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang didapat, penulis berusaha mengajukan saran, yang diharapkan saran tersebut dapat berguna sebagai masukan untuk pelaksanaan selanjutnya. Adapun saran tersebut antara lain :

1. BKM sebagai organisasi pengelola P2KP dan wakil masyarakat dalam P2KP, dan didampingi oleh faskel, hendaknya lebih memantapkan sosialisasi tentang kebijakan dan program/proyek P2KP ini kepada masyarakat dan aparat pemerintah desa, melalui kunjungan dan berdialog dalam suatu forum atau pertemuan khusus. Sosialisasi ini diarahkan untuk membangun komitmen yang lebih *intens* antara pemerintah desa dengan

warga masyarakat desa demi tercapainya kesamaan persepsi dan pandangannya terhadap proyek penanggulangan kemiskinan, khususnya P2KP ini serta terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, dan diharapkan pula akan terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah desa, pelaku P2KP serta masyarakat desanya. Dan juga agar masyarakat desa sasaran proyek memiliki kesamaan persepsi mengenai apa sebenarnya dan bagaimana P2KP ini berbeda dengan program penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya karena P2KP ini menggunakan pendekatan/strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, sehingga masyarakat disana benar-benar paham dan mengerti akan tujuan P2KP.

2. BKM dan Unit-unit pengelolanya dalam pelaksanaan pendampingan bagi KSM harus lebih menumbuhkembangkan sikap dan pola pemikiran kritis, mandiri, dan berdaya dengan melalui berbagai dialog, ceramah, dan diskusi secara rutin dengan KSM-KSM misalnya dengan melakukan pertemuan tiap bulan sekali. Hal ini bertujuan agar masyarakat menyadari bahwa KSM sebagai pelaku utama dalam P2KP ini tidak hanya semata-mata organisasi untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir P2KP saja, tetapi lebih dari itu, melalui KSM ini masyarakat dapat bertukar informasi, saling berkomunikasi, mengembangkan usaha secara bersama sehingga KSM tersebut menjadi kuat dan bermanfaat.
3. Selain kegiatan simpan pinjam, di tingkat KSM perlu diadakan kegiatan lainnya seperti mengadakan penyimpanan tabungan anggota dan penarikan

uran wajib bagi anggota tiap kali pertemuan. Hal ini juga bertujuan untuk mengantisipasi apabila ada anggota yang telat atau tidak bisa membayar angsuran pinjaman.

4. Dari hasil pelatihan ketrampilan yang telah dilaksanakan dengan difasilitasi oleh UPK BKM, ternyata hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mempraktekkannya untuk mengembangkan usaha. Maka dari itu untuk selanjutnya perlu diadakan lagi secara rutin, misalnya tiap 3 bulan sekali diadakan pelatihan ketrampilan namun tetap dengan mempertimbangkan jenis pelatihan dari usulan masyarakat itu sendiri dan sekiranya berpotensi untuk dikembangkan dalam usaha oleh masyarakat Desa Dopleng.
5. Agar upaya peningkatan partisipasi masyarakat lebih meningkat, maka disarankan terutama bagi para pengurus BKM agar lebih serius melakukan perencanaan program kerja serta giat melakukan koordinasi yang terpadu, baik diantara maupun antara institusi/organisasi terkait di tingkat lokal Kelurahan/Desa. Upaya perbaikan tanpa ditunjang dengan koordinasi dari para pelaksananya, maka tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berusaha menumbuhkan dan mempertahankan komitmen para pengurus untuk lebih meluangkan waktu dan menuangkan pemikiran yang bijaksana demi turut serta menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan wilayahnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ibrahim Indrawijaya. 1989. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Sinar Baru.
- Anggito Abimanyu dkk. 1995. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : PAU-SE UGM bersama BP. FE.
- Arbi Sanit dkk. Tanpa Tahun. *Otonomi Daerah Versus Pemberdayaan Masyarakat (Sebuah Kumpulan Gagasan)*. Klaten : Mitra Parlemen.
- Awan Setya Dewanta dkk. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Bagong Suyanto. 1995. *Perangkap Kemiskinan : Problem dan Strategi Pengentasannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Gunawan Sumodiningrat. 1996. *Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta: Penakencana Nusadwipa.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pemberdayaan Sosial. (Kajian Ringkas tentang Pemberdayaan Manusia Indonesia)*. Jakarta : Kompas.
- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar, Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Is Hadri Utomo, dkk. 2000. *Laporan Penelitian: Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Implementasi Proyek Peremajaan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Kalianyar Mojosongo*. FISIP UNS. Surakarta : UNS Press.
- Khairuddin. 1992. *"Pembangunan Masyarakat" Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta : Liberty.
- Kutut Suwondo. 2002. *Perubahan Pola Pemerintahan Dan Kepemimpinan Lokal*. Salatiga: Forsa Pustaka.
- Loekman Soetrisno. 2006. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius.
- M. Dawam Raharjo. 1985. *Esei-esei Ekonomi Politik*. Jakarta: LP3ES.

- Miftah Thoha. 1993. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1995. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, arah dan Strategi*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Mohtar Mas'oe'd. 2003. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubyarto dkk. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Nurhadi. 2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana.
- R. Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso Sastropetro. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : PT. Alumni
- Soetomo. 2006. *Stratregi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar*. Cetakan I.. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Stephen P. Robbins 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Tadjuddin Noer Effendi. 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Taliziduhu Ndraha. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tjahya Supriatna. 2000. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, dan Pengembangan Bahasa. Depdikbud. 1988. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Winardi. 2001. *Organisasi dan Pemasalahan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yulius Slamet. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: UNS PRESS.

\_\_\_\_\_. 2001. *Teknik Pengambilan Sampel: untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Surakarta: PT. Pabelan.

Yuwono, dkk. 2006. *Pelayanan Publik dan Kemiskinan (Sebuah Alternatif Administrasi Pelayanan Publik)*. Surakarta: UNS Press.

### **Sumber Lain:**

Bappeda Kabupaten Boyolali. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKP-D) Kabupaten Boyolali Tahun 2006*.

Tim KMW SWK XIV Jawa Tengah. 2005. *Apa dan Bagaimana P2KP Tahap II*. Klaten: PT. Tera Buana.

Departemen Pekerjaan Umum- Dirjen Cipta Karya. November 2005. *Kumpulan Modul Pelatihan Pra Tugas Fasilitator PNPM P2KP KMW XIII Jawa Tengah*.

Inpres No. 21 Tahun 1998 Tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Adil Makmur Desa Doplang. *Program Jangka Menengah-Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) Desa Doplang Tahun 2006-2008*.

Tim Persiapan P2KP. *Pedoman Umum P2KP*. Edisi Revisi. September 2004. Jakarta: Dirjen Perumahan dan Permukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah – PMU P2KP .

Tim Persiapan P2KP. 2005. *Buku Petunjuk Teknis Pelaksana Badan Keswadayaan Masyarakat*. Jakarta: Dirjen Perumahan dan Permukiman, Departemen Kimpraswil – PMU P2KP.

*Modul P2KP II*. 2005. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

*Juklak P2KP II*. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

*Data Monografi Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali*.

*Data Pemetaan Swadaya Tiap RT Desa Doplang*. Sekretariat BKM Adil Makmur Desa Doplang.

Republika. Edisi Selasa, 06 November 2007.

Berita Resmi Statistik No.47/IX/1September 2006. ([www.simpuldemokrasi.com](http://www.simpuldemokrasi.com)).

Konsep Dasar P2KP. [www.p2kp.org](http://www.p2kp.org)

[www.ngo-link.com](http://www.ngo-link.com).

[www.info@bkksi.or.id](mailto:www.info@bkksi.or.id)

[www.ekonomi.rakyat.org](http://www.ekonomi.rakyat.org)

#### **Jurnal Internasional :**

Ted K. Bradshaw "Community Development": *International Journal of The Community Development Society*, Vol. 38, No. 1, page 9, Spring 2007. Academic Research Library 19. 7.

Herbert J. Rubin: *Journal of Public Administration Review*; "Understanding The Ethos of Community Based Development : Ethno Graphic Description for Public Administrators", Sep/Oct 1993; Vol. 53, No. 5; ABI/INFORM Research pg. 431. Northern Illinois University.

Glenn A. Bowen: "Community Development Journal" Vol 43 No 1 January 2008 pp. 65 & Oxford University Press and Community Development Journal.2007.[journals.permissions@oxfordjournals.org](mailto:journals.permissions@oxfordjournals.org);doi:10.1093/cdj/b sm011. Advance Access publication 26 April 2007.

#### **Skripsi :**

Bimo Dwi Darminto. 2004. *Evaluasi P2KP Tahap I di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman*. FISIP UGM.

Puji Limaningsih. 2001. *Implementasi P2KP di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul*. FISIP UNS.

